



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATARAM

JALAN ADI SUCIPTO, PEJARAKAN KARYA KEC. AMPENAN - MATARAM 83124
TELEPON (0370) 6194701, 6194702, FAKSIMILE (0370) 6194703
LAMAM www.kkp.go.id

14 Juli 2025

Yth. Kepala BPPMHKP
Cq. Tim Kerja Pelaporan Kinerja Sekretariat BPPMHKP
di
Jakarta

SURAT PENGANTAR

Nomor: B.111/BKIPM.MTR/TU.140/VII/2025

No	Dokumen yang Dikirim	Jumlah	Keterangan
1.	Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Balai KIPM Mataram	1 (satu) buku	Disampaikan dengan hormat untuk diketahui. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Balai Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Mataram



Ditandatangani
Secara Elektronik

M. Farchan



LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan
**Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Mataram**
Jl. Adi Sucipto Kel. Pejarakan Karya,
Kec. Ampenan, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat
0370-6194701



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT., Balai KIPM Mataram dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Tahun 2025 dengan tepat waktu.

LKj Triwulan II Tahun 2025 Balai KIPM Mataram disusun dalam rangka memberikan informasi tentang capaian kinerja terkait pelaksanaan program dan kegiatan Balai KIPM Mataram selama triwulan II tahun 2025.

LKj ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Atas dasar peraturan tersebut, Laporan Kinerja diukur berdasarkan indikator sasaran kegiatan dan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Balai KIPM Mataram yang merupakan penjabaran dari target kinerja tahun 2025.

Untuk mewujudkan unit kerja yang akuntabel, indikator kinerja disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Seperti halnya pada triwulan IV tahun 2024 terkait SOTK baru tentang perubahan tugas dan fungsi BPPMHKP, maka terjadi perubahan indikator kinerja baik dalam hal uraian ataupun targetnya.

Sesuai dengan Nota Dinas Nomor 504/SJ.3/RC.610/III/2025 tentang Hasil Rapat Pembahasan Perubahan Pengukuran Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN dan Penyesuaian Target Tahun 2025 s.d.2029, maka target indikator IP ASN pada semester 1 berubah menjadi 75, dimana pada awalnya ditargetkan 81.

Semoga LKj Triwulan II Tahun 2025 Balai KIPM Mataram ini dapat menjadi sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban kinerja Balai KIPM Mataram, serta dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi bagi seluruh jajaran Balai KIPM Mataram agar memacu kinerja ke depan agar lebih produktif, profesional, efektif dan efisien dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.



Mataram, 14 Juli 2025
plt. Kepala Balai KIPM Mataram,

M. Farchan



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Ikhtisar Eksekutif	vi
BAB I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Visi dan Misi Organisasi	3
1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	4
BAB II. Perencanaan Kinerja	6
2.1 Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja	6
BAB III. Akuntabilitas Kinerja	8
3.1 Capaian Kinerja	8
3.2 Analisis dan Evaluasi.....	11
3.3 Realisasi Anggaran	47
BAB IV. Penutup	50
Lampiran-lampiran	51



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Balai KIPM Mataram Tahun 2025	6
Tabel 3.1	Klasifikasi Warna Capaian Berdasarkan Status Kinerja	8
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Balai KIPM Mataram Triwulan II Tahun 2025	9
Tabel 3.3	Target dan Realisasi IKS.1	15
Tabel 3.4	Target dan Realisasi IKS.2	19
Tabel 3.5	Target dan Realisasi IKS.3	22
Tabel 3.6	Target dan Realisasi IKS.4	24
Tabel 3.7	Target dan Realisasi IKS.5	25
Tabel 3.8	Target dan Realisasi IKS.6	29
Tabel 3.9	Target dan Realisasi IKS.7	31
Tabel 3.10	Target dan Realisasi IKS.8	32
Tabel 3.11	Target dan Realisasi IKS.9	38
Tabel 3.12	Target dan Realisasi IKS.10	39
Tabel 3.13	Target dan Realisasi IKS.11	40
Tabel 3.14	Target dan Realisasi IKS.12	42
Tabel 3.15	Target dan Realisasi IKS.13	43
Tabel 3.16	Target dan Realisasi IKS.14	44
Tabel 3.17	Kategorisasi Kepuasan Pelayanan	46
Tabel 3.18	Target dan Realisasi IKS.15	47
Tabel 3.19	Penyerapan Anggaran per Nama Kegiatan Triwulan II T.A. 2025	48
Tabel 3.20	Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Triwulan II T.A. 2025	49





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Balai KIPM Mataram	5
Gambar 2	Dashboard Capaian Indikator Kinerja Triwulan II Tahun 2025	9
Gambar 3	Persentase TLHP Balai KIPM Mataram pada Triwulan II Tahun 2025	40
Gambar 4	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik Balai KIPM Mataram	46





IKHTISAR EKSEKUTIF

Nilai capaian kinerja IKU dan IKM Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sampai dengan triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 114,41. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Kegiatan dan target Indikator Kinerja Balai KIPM Mataram yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

- A. Dari 15 indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2025, ada 8 indikator kinerja yang terdapat target pada triwulan II, seluruh indikator telah tercapai sesuai target dan/atau melebihi target.
- B. Uraian capaian indikator kinerja dengan target triwulanan:
 - 1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%). Ditargetkan pada triwulan II 70% dan tercapai 100% atau dalam persentase kinerja 120%;
 - 2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%). Terealisasi 100% dari target 70% pada triwulan II atau setara dengan 120% persentase kinerja;
 - 3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%). Tercapai 100% dari target 99% atau setara dengan 101,01% persentase kinerja;
 - 4. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%), terealisasi 100% dari target 85%, atau tercapai 117,65% dalam persentase kinerja.;
 - 5. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%), terealisasi 100% dari target 76%, atau tercapai 120% dalam persentase kinerja;
 - 6. Survey kepuasan masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Mataram (nilai). Ditargetkan 88 dan tercapai 95,55 atau dengan persentase 108,63%.
- C. Uraian capaian indikator kinerja dengan target semester dan tahunan:
 - 1. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%), dengan target tahunan 75%;
 - 2. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup



- UPT Balai KIPM Mataram (%), dengan target tahunan 75%;
3. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Mataram, target semester I nilai 85 dan semester II target 92. Pada semester I tercapai 98,41 atau sebesar 115,78%;
 4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Mataram, merupakan indikator kinerja dengan target tahunan 71,5 (nilai);
 5. Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%), merupakan indikator kinerja dengan target tahunan 100%;
 6. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Mataram (indeks), dengan target semester I nilai 75 dan target semester II nilai 87. Capaian semester I sebesar 84,92 atau dengan persentase 113,23%;
 7. Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Mataram, merupakan indikator kinerja dengan target tahunan 86 (nilai);
 8. Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%) dengan target tahunan 70%;
 9. Inovasi pelayanan publik lingkup UPT Balai KIPM Mataram (unit) dengan target 1 inovasi/unit.

Realisasi penyerapan anggaran Balai KIPM Mataram sampai Triwulan II tahun 2025 sebesar Rp 2.827.992.427 atau mencapai 34,25% dari alokasi anggaran sebesar Rp 8.257.015.000 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.19 dan Tabel 3.20 sebagai berikut untuk setiap kegiatan dan jenis belanja.

Dari Laporan Realisasi Penerimaan PNBPN, jumlah total penerimaan PNBPN sampai Triwulan II tahun 2025 sebesar Rp 30.410.000 dari target Rp 18.550.000 atau mencapai 163,93%. Pencapaian PNBPN tersebut dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jasa Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Selain itu juga dengan adanya perubahan sistem layanan penerbitan sertifikat yang menggunakan sistem aplikasi baru yaitu Aplikasi SiapMutu serta PMK Nomor 1 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan sehingga mengakibatkan adanya perubahan tarif pengujian laboratorium.

Dengan adanya reorganisasi BKIPM menjadi BPPMHKP sehingga terjadi perubahan tugas dan fungsi BPPMHKP, maka terjadi perubahan beberapa indikator





kinerja pada tahun 2024 baik dalam hal uraian ataupun targetnya. Hal ini mempengaruhi realisasi PNBK tahun 2024 yang tidak dapat mencapai target karena terjadi pengurangan PNBK dengan adanya pengalihan PNBK untuk BKHIT yang merupakan PNBK Karantina.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada tahun 2025 terjadi penurunan target PNBK pada seluruh unit pelaksana teknis BPPMHKP.





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

SAKIP merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebagai fakta obyektif instansi pemerintah/unit kerja mengimplementasikan SAKIP.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap unit kerja di Kementerian atas penggunaan anggaran untuk mencapai Target Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Laporan Kinerja disusun periodik baik triwulanan (LKj



Interim) maupun tahunan (LKj Tahunan). Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja, evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai terhadap hasil capaian Target Kinerja.

Pelaporan Kinerja dilaksanakan dengan tujuan:

- a. memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
- b. sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Pelaporan dilakukan menggunakan metode *bottom-up*. Data diperoleh dari Unit terbawah lalu dikumpulkan di Unit di atasnya. Data capaian (dan Target) disampaikan secara lengkap disertai dokumen data dukung yang dibuat secara terpisah dari laporannya.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa Balai KIPM Mataram berkewajiban menyusun Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Laporan kinerja memuat informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud dan pencapaian sasaran dilaksanakan dengan membandingkan kinerja aktual dengan rencana atau target tahun-tahun sebelumnya yang berdasarkan pada target jangka



menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra).

Laporan Kinerja (LKj) atau sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup:

1. pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. realisasi pencapaian target kinerja organisasi;
3. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
4. perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis organisasi.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKj, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

LKj Triwulan II Tahun 2025 Balai KIPM Mataram disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai KIPM Mataram dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama dan/atau sampai dengan triwulan II tahun 2025 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP. Di samping itu juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholder* demi perbaikan kinerja Balai KIPM Mataram selanjutnya.

1.2. VISI DAN MISI ORGANISASI

Visi Balai KIPM Mataram mengacu pada visi BPPMHKP, yaitu Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu yang terdepan untuk memastikan keamanan, kualitas, keberlanjutan dan daya saing hasil kelautan dan perikanan, dalam rangka mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang



berkelanjutan untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Balai KIPM Mataram mempunyai misi yang sejalan dengan misi BPPMHKP, yaitu:

- 1) Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan melalui inspeksi, sertifikasi, surveilans, pengambilan contoh uji, pengujian dan monitoring.
- 2) Meningkatkan penerapan praktik yang baik di setiap rantai pasok dan kepatuhan terhadap pemenuhan standar mutu hasil kelautan dan perikanan.
- 3) Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional.
- 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

1.3. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka mencapai visi, misi, fungsi, tujuan, serta sasaran strategis, Balai KIPM Mataram perlu didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepada Balai KIPM Mataram secara efektif dan efisien. Untuk itu kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan.

1. Kedudukan, tugas dan fungsi Balai KIPM Mataram:

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Balai KIPM Mataram merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (UPT BPPMHKP) mengemban tugas menyelenggarakan Pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai KIPM Mataram



menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- b. pelaksanaan pengendalian dan pengawan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

2. Struktur organisasi Balai KIPM Mataram

Balai KIPM Mataram merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPMHKP di bidang pelayanan operasional, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.92/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai KIPM Mataram mempunyai jumlah SDM aparatur yang mendukung saat ini berjumlah 19 orang ASN, yang terdiri dari 16 orang PNS dan 3 orang tenaga PPPK dengan komposisi pegawai 10 orang laki-laki dan 9 orang perempuan.

Gambar 1

Struktur Organisasi Balai KIPM Mataram *



*Berdasarkan Permen KP Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 Balai KIPM Mataram, jumlah indikator kinerja kegiatan berjumlah 15 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Berikut indikator kinerja kegiatan yang terdapat pada dokumen PK Tahun 2025 Balai KIPM Mataram.

Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Balai KIPM Mataram Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	70
		3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	99



SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	75
		5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Nilai)	92
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Nilai)	71,5
		8.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	100
		9.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Indeks)	87
		10.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Nilai)	86
		11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	85
		12.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	76
		13.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	70
		14.	Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Unit)	1
		15.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Nilai)	88



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Pelaksanaan pengukuran kinerja Balai KIPM Mataram, sebagaimana unit kerja lain di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja secara online yaitu melalui website www.kinerjaku.kkp.go.id. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan pedoman Manual IKU yang telah disusun sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Adapun output yang dihasilkan aplikasi paling sedikit meliputi:

1. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) / Skor Kinerja Organisasi; dan
2. Nilai Pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Manajerial (IKU dan IKM) Organisasi.

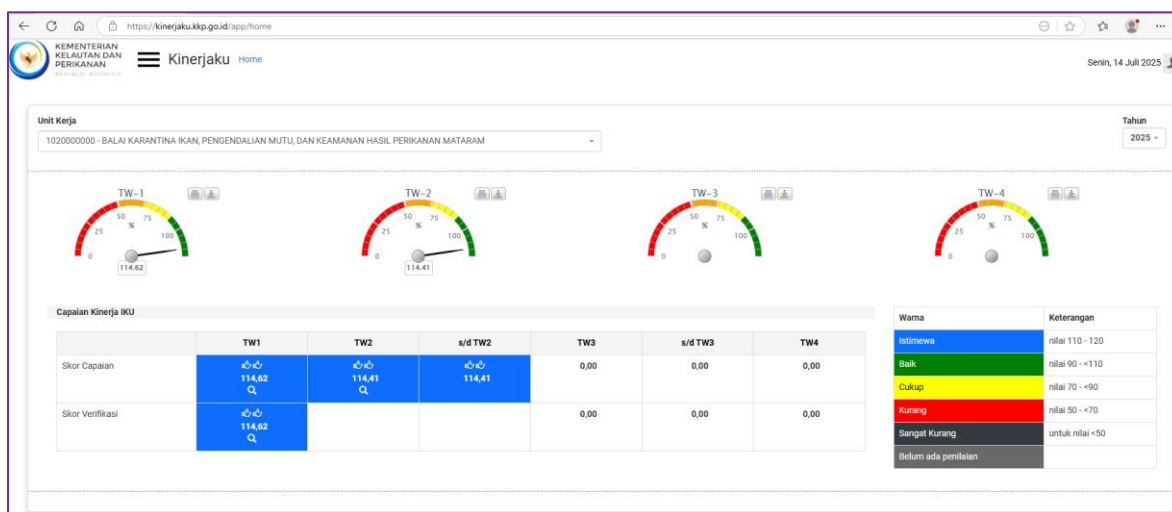
Pencapaian kinerja untuk setiap Sasaran dan Indikator Kinerja pada aplikasi kinerjaku diklasifikasikan dengan warna berdasarkan status kinerja sebagaimana Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Klasifikasi Warna Capaian Berdasarkan Status Kinerja

Warna	Keterangan
Istimewa	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum ada penilaian	

Capaian kinerja Balai KIPM Mataram sampai dengan triwulan II Tahun 2025 masuk dalam klasifikasi capaian “Istimewa”, hal ini ditandai dengan Skor Kinerja atau Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 114,41 dan ditandai dengan warna biru seperti ditampilkan gambar *Dashboard* Aplikasi Kinerjaku Balai KIPM Mataram berikut ini.

Gambar 2
Dashboard Capaian IKU dan IK Triwulan II Tahun 2025



Secara rinci capaian Indikator Kinerja pada masing-masing Sasaran Balai KIPM Mataram yang ditargetkan pada Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Balai KIPM Mataram Triwulan II Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2025	TARGET TW II	REALISASI TW II %	% thd TARGET 2025
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu							
SK1.1	Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	70%	70%	100% 120%	120%
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	70%	70%	100% 120%	120%
		3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	99%	99%	100% 101,01%	101,01%
Kegiatan 2. Kegiatan Manajemen Mutu							
SK2.1	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan	4	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	75%	75%	-	-



	mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar						
		5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	75%	75%	-	-
KEGIATAN 3. Dukungan Manajemen Internal							
SK3.1	Tata kelola pemerintahan yang baik	6	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Nilai)	92	85	98,41 115,78%	106,97%
		7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Nilai)	71,5	-	-	-
		8	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	100%	-	-	-
		9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Indeks)	87	75	84,92 113,23%	97,61%
		10	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Nilai)	86	-	-	-
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	85%	85%	100% 117,65%	117,65%
		12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	76%	76%	100% 120%	120%
		13	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	70%	-	-	-
		14	Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Unit)	1	-	-	-
		15	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Nilai)	88	88	95,59 108,63%	108,63%



3.2. ANALISIS DAN EVALUASI

Capaian kinerja berdasarkan sasaran kegiatan secara lebih detail menurut indikator kinerjanya dijelaskan sebagai berikut.

Sasaran Kegiatan 1. Pengendalian Mutu

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan

Penjelasan atas pencapaian Sasaran Kegiatan 1 secara rinci sebagai berikut:

IKS.1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)

Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI)
2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku

Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.



Formula untuk menghitung capaian IK:

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB

B = Persentase Unit menerapkan CPIB

C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB

E = Persentase Unit Usaha menerapkan CDOIB

F = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)*)

**) Komponen pembentuk yang dihitung berdasarkan karakteristik sertifikasi jaminan mutu sektor produksi primer yang ada di UPT*

Pada triwulan II tahun 2025 BPPMHKP Mataram hanya melakukan sertifikasi terhadap 1 jenis sertifikasi yaitu: Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan

Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) adalah sertifikat yang diberikan kepada kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan

Dengan memperhatikan tahapan pembongkaran ikan, standar fasilitas penanganan dan penyimpanan ikan di kapal perikanan, standar prosedur penanganan dan penyimpanan ikan di kapal perikanan, dokumen dan hygiene karyawan.

Kegiatan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan dilaksanakan pada 21 kapal:

1. Kapal Andika 07
2. Kapal Borneo Afgan
3. Kapal Cahaya Indah 07
4. Kapal Cahaya Indah 08



5. Kapal Dimas Jaya 01
6. Kapal Harapan Baru LB 01
7. Kapal Harapan Baru LB 04
8. Kapal Harapan Baru LB 05
9. Kapal Hasil Bersama 06
10. Kapal Jamila
11. Kapal Rizky Maulana
12. Kapal Ulan Sari 01
13. Kapal Usaha Baru 19
14. Kapal Aisah 17
15. Kapal Akarni Jaya 08
16. Kapal Akarni Jaya 09
17. Kapal AlKahfi 01
18. Kapal Arijia SP 01
19. Kapal Armada AGP 02
20. Kapal Arya Husna 01
21. Kapal Lautan Mas 02

Pelaksanaan Inspeksi Sertifikasi Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan ini dilaksanakan oleh inspektur mutu BPPMHKP Mataram.

- Pada triwulan II tahun 2025, sektor produksi primer lingkup Balai KIPM Mataram terdapat realisasi Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) di Kapal Perikanan sebanyak 21 sertifikat atau tercapai 100% dari target 70% atau dengan persentase sebesar 120%. Untuk triwulan yang sama pada tahun sebelumnya tidak ada capaian karena indikator ini mulai digunakan pada triwulan IV tahun 2024.

Berikut capaian dan perhitungan IK “Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Mataram”:



- **Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) di Kapal Perikanan:**

Target Sertifikat CPIB = 21 sertifikat

Capaian Sertifikat CPIB = 21 sertifikat

Persentase Capaian = $21/21 \times 100\% = 100\%$

- **Capaian Indikator IKS.1:**

$\%X = (100\%/1) \times 100\%$

$= 100\% \times 100\%$

$= 100\%$

- Output dari kegiatan ini terdiri dari :

21 Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) di Kapal Perikanan dengan masa berlaku 2 tahun yang terbit pada triwulan II tahun 2025.

Untuk melaksanakan kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp.125.000.000 yang digunakan untuk :

1. Sertifikasi CBIB pada Pembudidayaan Ikan dan CPPIB Rp. 34,000,000
2. Sertifikasi CPIB pada Pembenihan Rp. 14,990,000
3. Bimtek Sertifikasi CBIB, CPIB Pembenihan dan CPIB Kapal Rp. 20,010,000
4. Sertifikasi CPIB Kapal Perikanan Rp. 30,000,000
5. Sosialisasi CBIB, CPIB Pembenihan dan CPIB Kapal Rp. 26,000,000

Indikator ini mendapatkan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 125.000.000 dan belum ada realisasi karena adanya efisiensi anggaran sehingga anggaran terblokir.

Jumlah SDM yang terlibat pada kegiatan Sertifikasi CPIB Kapal pada TW II sebanyak 8 orang yang terdiri dari 8 Inspektur Mutu BPPMHKP Mataram.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator:

1. Melakukan kerjasama dengan PPN Pengambengan, Direktorat Jenderal Tangkap wilayah NTB sebagai pembina untuk melaksanakan pelatihan dasar kepada nahkoda maupun ABK kapal Cara Penanganan Ikan Yang Baik di atas Kapal dimana sertifikat pelatihan yang diperoleh sebagai salah satu syarat dalam penerbitan sertifikat CPIB di Kapal secara daring pada tanggal 3 Juni 2025.
2. Remote Inspection Sertifikasi CPIB di Kapal Perikanan sebanyak 21 Kapal sebagai solusi anggaran yang masih diblokir pada tanggal 7 dan 8 Mei 2025.

Permasalahan yang dihadapi pada kegiatan sertifikasi CPIB di Kapal Perikanan antara lain:



1. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman para pemilik kapal baik nahkoda dan ABK Kapal dalam memahami standar sertifikasi CPIB di Kapal.
2. Adanya temuan dari DG SANTE (Uni Eropa) terkait kapal-kapal yang belum tersertifikasi CPIB Kapal yang salah satunya berasal dari wilayah kerja BPPMHKP Mataram.
3. Keterbatasan anggaran karena adanya efisiensi anggaran dari pemerintah sehingga kegiatan validasi produk pada sektor produksi primer (inspeksi/verifikasi/surveilans) tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Perbandingan capaian indikator sampai dengan triwulan II tahun 2025 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, pada triwulan dan tahunan berjalan serta Renstra 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Target dan Realisasi IKS.1

Realisasi					Tahun 2025							Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi TW Sblmnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian thd Target TW II	Kenaikan thd TW sblmnya	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK 2025	Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	-	-	-	100%	100%	70%	100%	120	0	70%	120	-	70%	120

Ket. : Tahun 2020 s.d. 2023 tidak terdapat IKU tersebut

Capaian indikator belum dapat dibandingkan dengan target Renstra BPPMHKP 2025-2029 karena dokumen Renstra BPPMHKP belum terbit yang dikarenakan dokumen Renstra KKP 2025-2029 juga belum terbit sampai pada saat laporan kinerja ini disusun.

IKS.2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)

Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan



perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Formula untuk menghitung capaian IK:

$$\%X = \frac{A+B}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.

A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk

B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (2)*)

**) Komponen pembentuk yang dihitung berdasarkan karakteristik sertifikasi jaminan mutu sektor produksi pasca panen yang ada di UPT*

HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya yang bersifat biologi, kimia



dan fisik pada hasil perikanan untuk konsumsi manusia. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu bahaya yang mungkin akan muncul di dalam proses pengolahan (*in process inspection*) dapat dilakukan sehingga tindakan pengendalian dan pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan.

Sertifikat penerapan HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya. Sertifikasi penerapan HACCP mengacu kepada persyaratan dan tata cara penerbitan sertifikat penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ HACCP sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/PERMEN-KP/2018, Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011, dan Keputusan Kepala BKIPM Nomor 32 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/*Hazard Analysis And Critical Control Point*.

Sertifikat HACCP yang diterbitkan berdasarkan jenis produk dan jenis proses serta potensi bahaya (*hazard*).

Permohonan sertifikat penerapan HACCP:

- UPI mengajukan permohonan
- Dilakukan audit kecukupan oleh Pusat SM
- Inspeksi oleh inspektur mutu
- UPI melakukan tindakan perbaikan
- Evaluasi dan verifikasi tindakan perbaikan
- Penerbitan sertifikat HACCP

Perpanjangan sertifikat penerapan HACCP:

- Verifikasi dan survailen konsistensi penerapan HACCP di UPI
- Penerbitan sertifikat HACCP

Sertifikat Kelayakan Pengolahan disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha terhadap setiap unit pengolahan ikan yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi.

Pelaku Usaha industri Pengolahan Ikan yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Standar



Sanitasi diberikan SKP bagi setiap jenis ikan yang ditangani dan/atau jenis produk yang diolah.

Persyaratan permohonan untuk memiliki SKP:

- a. NIB;
- b. Salinan SPI atau sertifikat keterampilan di bidang keamanan pangan yang setara untuk penanggung jawab mutu;
- c. panduan mutu penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan pemenuhan persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi; dan
- d. rekomendasi Kelayakan Pengolahan dari Pembina Mutu di daerah.

Pada Triwulan II tahun 2025, realisasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) lingkup UPT Balai KIPM tidak ada.

Sedangkan realisasi Sertifikat *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) ruang lingkup produk terdapat 2 sertifikat HACCP yaitu ruang lingkup Dried Seaweed dan Seaweed Powder di PT Razindo Global Nusantara Kabupaten Lombok Barat NTB.

Berikut penghitungan capaian indikator ini:

HACCP

Target Sertifikat HACCP = 2 sertifikat

Capaian Sertifikat HACCP = 2 sertifikat

Persentase Capaian (B) = $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$

Capaian Indikator IKS.2:

$$\begin{aligned}\%X &= \frac{100\%}{1} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Jadi, capaian indikator “Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan” triwulan II tahun 2025 sebesar 100% dari target 70% atau dengan capaian persentase kinerja sebesar 120%.

Indikator ini merupakan indikator baru dari hasil revisi indikator kinerja di triwulan IV tahun 2024 dengan pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 141.000.000 yang digunakan untuk :

1. Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) Rp. 30,000,000
2. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) Rp. 25,000,000

3. Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) Rp. 25,000,000
4. HACCP Dasar dan Sertifikasi Noreg Rp. 30,000,000
5. Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik/Inpres 01 Rp. 25,000,000
6. Rapat Koordinasi Quality Assurance Rp. 6.000.000

Realisasi anggaran sampai dengan triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp.3.500.000 atau 2,48%.

Jumlah SDM yang terlibat pada kegiatan Inspeksi HACCP triwulan II sebanyak 8 orang yang terdiri dari 8 Inspektur Mutu BPPMHKP Mataram.

Pelaksanaan Inspeksi Sertifikasi HACCP di PT Razindo Global Nusantara Kabupaten Lombok Barat NTB dengan 2 ruang lingkup sertifikasi yaitu ruang lingkup Dried Seaweed dan Seaweed Powder pada tanggal 16 Mei 2025.

Selain itu juga telah dilaksanakan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi NTB terkait pelaksanaan sertifikasi Pasca Panen (SKP, HACCP dan SPDI) pada tanggal 19 Juni 2025.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan inspeksi HACCP:

1. Belum adanya pelatihan HACCP kepada personil baru yang dimiliki BPPMHKP Mataram.
2. Keterbatasan anggaran karena adanya efisiensi anggaran dari pemerintah sehingga kegiatan validasi produk pada sektor produksi pasca panen (inspeksi/verifikasi/surveilans) tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Perbandingan capaian indikator sampai dengan triwulan II tahun 2025 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, pada triwulan dan tahunan berjalan serta Renstra 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.4 Target dan Realisasi IKS.2

Realisasi					Tahun 2025								Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi TW Sblmnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian thd Target TW II	Kenaikan thd TW sblmnya	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK 2025		Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	-	-	-	100%	100%	70%	100%	120	0	70%	120		-	70%	120

Ket. : Tahun 2020 s.d. 2023 tidak terdapat IKU tersebut

Capaian indikator belum dapat dibandingkan dengan target Renstra BPPMHKP 2025-2029 karena dokumen Renstra BPPMHKP belum terbit yang



dikarenakan dokumen Renstra KKP 2025-2029 juga belum terbit sampai pada saat laporan kinerja ini disusun.

IKS.3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Mataram

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).

Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.

Pada triwulan II tahun 2025 BPPMHKP Mataram hanya melakukan Evaluasi UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan terhadap 3 Unit Pengolahan Ikan (UPI) pada UD. Dahlia, PT. Blue Ocean Lobster dan PT. Live Shell Indonesia, yang menghasilkan 3 Surat Keterangan Hasil Surveilans (SKHS).

Sertifikat Kesehatan (*Health Certificate*) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

Pada triwulan II tahun 2025 HC Mutu yang terbit sebanyak 56 sertifikat (Lampiran IKS.3) dan seluruhnya tidak ada penolakan dari negara tujuan ekspor.

Formula untuk menghitung capaian indikator:

$$\%X = \frac{A-B}{A} \times 100\%$$

%X = Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor (%)



A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP Mataram = 56 HC Mutu

B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan = 0 (tidak ada yang ditolak)

Capaian indikator IKS.3:

$$\begin{aligned}\%X &= \frac{A-B}{A} \times 100\% \\ &= \frac{56-0}{56} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Indikator ini baru di triwulan IV tahun 2024 yang merupakan hasil revisi dokumen kinerja pada Oktober tahun 2024 sehingga capaian indikator pada triwulan II tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian triwulan II tahun sebelumnya.

Dari perhitungan capaian indikator ini pada triwulan II tahun 2025 sebesar 100% dari target 99% atau setara dengan 101,01%.

Untuk melaksanakan kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp.53.000.000 yang digunakan untuk :

- 1) Investigasi Kasus Penahanan/Penolakan Produk Perikanan Rp.5.000.000
- 2) Evaluasi UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Rp.15.000.000
- 3) Registrasi UPI Ke Negara Mitra dan atau Negara Tujuan Ekspor Rp.8.000.000
- 4) Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 Rp.25.000.000

Realisasi anggaran untuk indikator ini sampai dengan triwulan II tahun 2025 belum ada.

Jumlah SDM yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini sebanyak 10 orang yang terdiri dari 8 Inspektur Mutu dan 2 Pranata Komputer BPPMHKP Mataram.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian target indikator ini yaitu melakukan pelayanan sertifikasi dan konsultasi kepada pengguna jasa menggunakan aplikasi SiapMutu BPPMHKP yang secara bertahap telah dilakukan penyempurnaan aplikasi SiapMutu dan penyelesaian permasalahan terkait sertifikasi HC Mutu melalui WA group Aplikasi SiapMutu oleh tim pengembang pusat.



Selain itu juga dilaksanakan Forum Konsultasi Publik lingkup BPPMHKP Mataram kepada pengguna jasa terkait pelayanan sertifikasi pada tanggal 16 Mei 2025.

Perbandingan capaian indikator sampai dengan triwulan II tahun 2025 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, pada triwulan dan tahunan berjalan serta Renstra 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.5 Target dan Realisasi IKS.3

Realisasi					Tahun 2024							Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi TW Sblmnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian thd Target TW II	Kenaikan thd TW sblmnya	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK 2025	Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
100	-	-	100	100	100%	99%	100%	101,01	0	99%	101,01	98%	99%	101,01

Ket. : Tahun 2021-2022 tidak terdapat IKU tersebut

Capaian indikator belum dapat dibandingkan dengan target Renstra BPPMHKP 2025-2029 karena dokumen Renstra BPPMHKP belum terbit yang dikarenakan dokumen Renstra KKP 2025-2029 juga belum terbit sampai pada saat laporan kinerja ini disusun.

Sasaran Kegiatan 2. Manajemen Mutu

Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar

Penjelasan atas pencapaian Sasaran Kegiatan 2 secara rinci sebagai berikut:

IKS.4. Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup Balai KIPM Mataram

Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.



ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri

Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji (ISO 17025) di laboratorium official control yang dinilai melingkupi:

1. Ruang Lingkup;
2. Acuan Normatif;
3. Persyaratan Umum;
4. Persyaratan Struktural;
5. Persyaratan Sumber Daya;
6. Persyaratan Proses;
7. Persyaratan Sistem Manajemen

Penghitungan capaian indikator terkait nilai kulaitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium:

$$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

$\bar{X}$ = Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium

Rata-rata nilai tingkat pemenuhan klausa dalam ISO 17025 yang terverifikasi

$\bar{X}$ = Rata rata

$x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n$ = Nilai tingkat pemenuhan ke – 1, 2 , 3, ..., n

n = banyaknya nilai tingkat pemenuhan

Indikator ini baru di tahun 2025 dan ditargetkan tahunan. Sedangkan pada tahun 2024 indikator penerapan sistem manajemen mutu laboratorium digabung dengan system penerapan mutu lembaga inspeksi dengan capaian 83,10%. Rincian capaian tersebut yaitu capaian penerapan sistem manajemen mutu laboratorium sebesar 84,85% dan capaian penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi sebesar 81,35%.

Pagu anggaran untuk indikator ini sebesar Rp. 111.000.000,- dengan realisasi Rp. 7.812.900 atau setara dengan 7,44% dari pagu anggaran.



Perbandingan capaian indikator sampai dengan triwulan II tahun 2025 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, pada triwulan dan tahunan berjalan serta Renstra 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.6 Target dan Realisasi IKS.4

Realisasi					Tahun 2025							Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi TW Sblmnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian thd Target TW II	Kenaikan thd TW sblmnya	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK 2025	Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	-	-	-	84,85%	-	-	-	-	-	75%	-	-	70%	-

Ket. : Tahun 2020 s.d. 2023 tidak terdapat IKU tersebut

Capaian indikator belum dapat dibandingkan dengan target Renstra BPPMHKP 2025-2029 karena dokumen Renstra BPPMHKP belum terbit yang dikarenakan dokumen Renstra KKP 2025-2029 juga belum terbit sampai pada saat laporan kinerja ini disusun.

IKS.5. Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup Balai KIPM Mataram

Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17020 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai melingkupi:

1. Persyaratan Umum
2. Persyaratan Struktural



3. Persyaratan Sumberdaya
4. Persyaratan Proses
5. Persyaratan Sistem Manajemen

Penghitungan capaian indikator terkait nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi:

$$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

$\bar{X}$ = Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi

Rata-rata nilai tingkat pemenuhan klausa dalam ISO 17020 yang terverifikasi

$\bar{X}$ = Rata rata

$x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n$ = Nilai tingkat pemenuhan ke – 1, 2 , 3, .., n

n = banyaknya nilai tingkat pemenuhan

Indikator ini baru di tahun 2025 dan ditargetkan tahunan. Sedangkan pada tahun 2024 indikator penerapan sistem manajemen mutu laboratorium digabung dengan system penerapan mutu lembaga inspeksi dengan capaian 83,10%. Rincian capaian tersebut yaitu capaian penerapan sistem manajemen mutu laboratorium sebesar 84,85% dan capaian penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi sebesar 81,35%.

Pagu anggaran untuk indikator ini sebesar Rp. 45.000.000 dengan realisasi Rp. 8.500.000 atau sebesar 18,89%.

Perbandingan capaian indikator sampai dengan Triwulan II tahun 2025 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, pada triwulan dan tahunan berjalan serta Renstra 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.7 Target dan Realisasi IKS.5

Realisasi					Tahun 2025							Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi TW Sblmnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian thd Target TW II	Kenaikan thd TW sblmnya	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK 2025	Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	-	-	-	81,35%	-	-	75%	-	-	75%	-	-	70%	-

Ket. : Tahun 2020 s.d. 2023 tidak terdapat IKU tersebut

Capaian indikator belum dapat dibandingkan dengan target Renstra BPPMHKP 2025-2029 karena dokumen Renstra BPPMHKP belum terbit yang



dikarenakan dokumen Renstra KKP 2025-2029 juga belum terbit sampai pada saat laporan kinerja ini disusun.

Sasaran Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup UPT Balai KIPM Mataram

Penjelasan atas pencapaian Sasaran Kegiatan 3 secara rinci sebagai berikut:

IKS.6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Balai KIPM Mataram

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
- Kurang, apabila nilai IKPA < 70

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ini merupakan sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu pengelolaan uang persediaan, data kontrak, kesalahan SPM, retur SP2D, halaman III DIPA, revisi DIPA, penyelesaian tagihan, rekon LPJ, renkas, realisasi, pagu minus dan dispensasi SPM.

Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10%

- ✓ Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan satker dalam satu triwulan dimana frekuensi revisi 1 kali dalam satu triwulan (tidak kumulatif)
- ✓ Revisi kewenangan IKPA, revisi refocusing yang menjadi kebijakan pemerintah dikecualikan dalam perhitungan
- ✓ Semakin rendah frekuensi revisi DIPA, maka capaian indikator revisi DIPA semakin baik

$$IKPA Rev = IKPA Rev = \frac{\sum_{i=1}^n RRev n}{n}$$

Deviasi RDP (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 10%

- ✓ Indikator Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RDP) per jenis belanja setiap bulan
- ✓ Nilai RDP dikunci setiap awal triwulan dengan batas pemutakhiran RPD sampai dengan 10 hari kerja pertama setiap triwulan khusus triwulan 1 batas akhir pemutakhiran 10 hari kerja bulan Februari
- ✓ Semakin rendah deviasi antara realisasi dengan RPD, maka nilai capaian indikator deviasi halaman III DIPA Semakin baik

Penyerapan Anggaran– Bobot Penilaian 20%

- ✓ Indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan
- ✓ Nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada setiap triwulan
- ✓ Semakin tinggi penyerapan anggaran dan melampaui target, semakin baik

Target Triwulan dihitung dengan

$$TA_n = TPBPeg + TPBBar + TPBMod$$

Target per Jenis Belanja dihitung dengan

$$TPBPeg_n = Pagu BPeg \times Target BPeg Tw ke - n$$

$$TPBBar_n = Pagu BBar \times Target BBar Tw ke - n$$

$$TPBMod_n = Pagu BMod \times Target BMod Tw ke - n$$

Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Triwulan

$$NKPA_n = \frac{(PAn)}{(TPn)} \times 100$$

Pengelolaan UP - Bobot 10%

$$\frac{\sum SPM GUP yang disampaikan tepat waktu}{\sum SPM GUP} \times 100$$

Dispensasi SPM – Bobot Penilaian 5%

- ✓ Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada triwulan IV,
- ✓ Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori rasio Dispensasi SPM sebagaimana berikut:

Kategori Nilai	Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permil)*
Kategori 1	100	0,00 (tidak ada dispensasi SPM)
Kategori 2	95	0,01 – 0,099
Kategori 3	92	0,1 – 0,99
Kategori 4	85	1 – 4,99
Kategori 5	82	>= 5,00

- ✓ Rasio Dispensasi (permil)

$$RDSPM = \left(\frac{SPM Dispensasi}{SPM Tw UV} \right) \times 1000$$



Capaian Output – Bobot Penilaian 25%

- ✓ Capaian Output (CO) dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen ketepatan waktu (30%), dan (2) komponen Capaian RO (70%)
- ✓ Komponen ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin yang dihitung dari ketepatan waktu pelaporan capaian output paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya

$$NK\ ROKW = \frac{\sum_{i=1}^n ROKW}{n}$$

- ✓ Komponen capaian RO dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO. Target capaian RO triwulan I sampai dengan triwulan III berdasarkan target PCRO sama dengan target penyerapan anggaran, sedangkan target triwulan IV sama dengan target RO pada DIPA
- ✓ RO yang dihitung nilai kinerjanya adalah RO yang Terkonfirmasi

$$NK - CRO = \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Capaian RO}}{\text{Target RO}} \right) \times 100\%$$

- ✓ Nilai Indikator Capaian Output

$$IKPA - CRO = (NK - ROKW \times 30\%) + (NKCRO \times 70\%)$$

Perhitungan Nilai IKPA telah dilakukan secara otomatis pada Aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Capaian indikator ini dihitung semesteran dan ditargetkan nilai 85 pada semester I dan 92 pada semester II.

Capain indikator Nilai IKPA pada semester I tahun 2025 sebesar 98,41 dari target 85 atau dengan persentase 115,78%.

Sedangkan tahun 2024 indikator Nilai IKPA ditargetkan sebesar 83 pada semester I tercapai 89,54 atau mencapai 107,88% dan pada semester II tercapai 94,92 dari target 93,76 atau dengan persentase capaian 101,24%.

Indikator Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 112.284.000 dengan realisasi anggaran Rp. 46.339.600 atau setara dengan 41,27%.

Perbandingan capaian indikator pada triwulan II tahun 2025 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, pada triwulan dan tahunan berjalan serta Renstra 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut.



Tabel 3.8 Target dan Realisasi IKS.6

Realisasi					Tahun 2025							Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi TW Sblmnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian thd Target TW II	Kenaikan thd TW sblmnya	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK 2025	Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
95,98	98,18	96,71	97,84	94,92	-	85	98,41	115,78	98,41	92	106,97	88	90	109,34

Capaian indikator belum dapat dibandingkan dengan target Renstra BPPMHKP 2025-2029 karena dokumen Renstra BPPMHKP belum terbit yang dikarenakan dokumen Renstra KKP 2025-2029 juga belum terbit sampai pada saat laporan kinerja ini disusun.

IKS.7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Balai KIPM Mataram

Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukan setiap Satuan Kerja Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ke dalam Aplikasi SMART Kementerian Keuangan.

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kategori berdasarkan besaran pagu pada DIPA masing-masing K/L, yaitu kategori Pagu Besar (pagu lebih besar atau sama dengan Rp 10 triliun); kategori Pagu Sedang (pagu Rp 2,5 triliun sampai dengan kurang dari Rp 10 triliun); dan kategori Pagu Kecil (pagu kurang dari Rp 2,5 triliun).

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) ini juga menjadi salah satu unsur utama dalam penerapan kebijakan penghargaan dan/atau sanksi kepada K/L sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, perlu dilakukan evaluasi kinerja anggaran di seluruh K/L. Evaluasi kinerja anggaran dilakukan melalui pengukuran dan penilaian atas kinerja anggaran tahun berjalan dan tahun sebelumnya menggunakan Aplikasi SMART Kementerian Keuangan.



Target Akhir Tahun Anggaran 2025 Level 0 (K/L) 82,00 Kategori Nilai Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
2. Baik, apabila NKA >80 – 90;
3. Cukup, apabila NKA >60 – 80;
4. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
5. Sangat Kurang, apabila NKA ≤ 50

Cara Perhitungan:

NKA Unit Eselon I

NKA Unit Eselon I, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian Capaian Indikator Kinerja Program, Nilai Efektivitas Satker dan Nilai Efisiensi Satker dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran Tingkat Unit Eselon I sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas (75)	1. Capaian Indikator Kinerja Program	30
	2. Nilai Efektivitas Satker	45
Efisiensi (25)	1. Nilai Efisiensi Satker	25

a. Efektivitas

1) Capaian Indikator Kinerja Program

$$CIKP = \left(\sum_{i=1}^n \frac{RIKP_i}{TIKP_i} \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan :

CIKSS	: Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga
RIKSS _i	: Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis i
TIKSS _i	: Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis i
n	: Jumlah Indikator Kinerja Sasaran Strategis

2) Nilai Efektivitas Satker

$$NEf\ Satker = \left(\sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan :

NEf Satker	: Nilai Efektivitas Satker
RVRO _i	: Realisasi Volume RO i
TVRO _i	: Target Volume RO i
n	: Jumlah RO seluruh Satker

b. Efisiensi

$$NE\ Satker = (40\% \times \text{Penggunaan SBK}) + (60\% \times \text{Efisiensi SBK})$$

Formula Perhitungan NKA Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

$$NKA\ UEI = (CIKP \times W_{CIKP}) + (NEf_{satker} \times WNEf_{satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{satker})$$

Keterangan:

NKA UEI	: Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon I
CIKP	: Capaian Indikator Kinerja Program
NEf _{satker}	: Nilai Efektivitas Satker
NE _{Satker}	: Nilai Efisiensi Satker
W _{CIKP}	: Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
WNEf _{satker}	: Bobot Nilai Efektivitas Satker

WNE _{satker}	: Bobot Nilai Efisiensi Satker
-----------------------	--------------------------------



Pengukuran indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dilakukan dengan periode tahunan dengan target 71,5.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dihitung dari Efektivitas Capaian RO dan Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan pembobotan sebagai berikut:

NKA Satker		
NKA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator sebagai berikut:		
Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas (75)	1. Capaian RO	75
	1. Penggunaan SBK	10
Efisiensi (25)	2. Efisiensi SBK	15

Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran tahun 2025 mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 112.284.000 dengan realisasi anggaran Rp. 46.339.600 atau setara dengan 41,27%.

Perbandingan capaian indikator pada tahun 2025 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, pada triwulan dan tahunan berjalan serta Renstra 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.9 Target dan Realisasi IKS.7

Realisasi					Tahun 2025							Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi TW Sblumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian thd Target TW II	Kenaikan thd TW sblmnya	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK 2025	Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	-	-	-	96,06	-	-	-	-	-	71,5	-	-	71	-

Ket.: Tahun 2020-2023 tidak terdapat IKU tersebut

Capaian indikator belum dapat dibandingkan dengan target Renstra BPPMHKP 2025-2029 karena dokumen Renstra BPPMHKP belum terbit yang dikarenakan dokumen Renstra KKP 2025-2029 juga belum terbit sampai pada saat laporan kinerja ini disusun.

IKS.8. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Balai KIPM Mataram

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BPPMHKP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan



keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Indikator Persentase Penyelesaian Temuan BPK ditargetkan tahunan dengan target 100% dan diukur dengan rumus perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi BPK lingkup UPT Balai KIPM Mataram yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Total Rekomendasi BPK lingkup UPT Balai KIPM Mataram}} \times 100\%$$

Selama Tahun 2024 tidak ada audit BPK di Balai KIPM Mataram. Jadi, capaian indikator ini pada tahun 2024 sebesar 100%.

Pagu anggaran tahun 2025 untuk mendukung indikator ini sebesar Rp.44.856.000 dan tercapai 100% dari pagu anggaran.

Perbandingan capaian indikator ini pada tahun 2024 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, pada triwulan dan tahunan berjalan serta Renstra 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.10 Target dan Realisasi IKS.8

Realisasi					Tahun 2025							Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi TW Sblmnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian thd Target TW II	Kenaikan thd TW sblmnya	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK 2025	Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	100	-	-	100	-

Ket. : Tahun 2020- 2022 tidak terdapat IKU tersebut

Capaian indikator belum dapat dibandingkan dengan target Renstra BPPMHKP 2025-2029 karena dokumen Renstra BPPMHKP belum terbit yang dikarenakan dokumen Renstra KKP 2025-2029 juga belum terbit sampai pada saat laporan kinerja ini disusun.

IKS.9. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Mataram

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan



kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN KKP merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada:

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara; dan
- c. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 terkait penyesuaian perhitungan dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN.

Untuk menghitung indeks profesionalitas ASN ini digunakan rumus sebagai berikut:

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:
 - a. Kualifikasi
 - b. Kompetensi
 - c. Kinerja
 - d. Disiplin
2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)
 - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua)
 - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)
 - d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/ SM (Sarjana Muda)
 - e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat
 - f. Pendidikan di bawah SLTA

Berdasarkan surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor 4190/BBM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, terdapat beberapa penyesuaian pada pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, yaitu:



1. dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan, sehingga pengukuran bobot dimensi kualifikasi adalah sebagai berikut:
 - a. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal lebih tinggi/di atas persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima);
 - b. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 20 (dua puluh); dan
 - c. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal di bawah persyaratan kualifikasi Pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 10 (sepuluh).

Dimensi	Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Diangkat Kedalam Jabatan	Pendidikan yang Diperoleh Pegawai (Bobot Nilai)					
				S3	S2	SI / DIV	DIII	DII / DI / SLTA / Sederajat	Di Bawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
	Nonmanajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Keterampilan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
			DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
			S2	25	20	10	10	10	10
		Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10

2. indikator dimensi kompetensi yang digunakan terdiri atas bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil penilaian kinerja dan riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal and nonklasikal,
 - a. Bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil predikat kinerja pada tahun sebelumnya; dan
 - b. Riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan nonklasikal yang diperoleh selama tahun berjalan, meliputi:
 - 1) Diklat Kepemimpinan (khusus bagi Jabatan Manajerial);
 - 2) Diklat Fungsional (khusus bagi Jabatan Fungsional);
 - 3) Diklat Teknis bagi (khusus bagi Jabatan Pelaksana); dan
 - 4) Pengembangan Kompetensi 20 (dua puluh) Jam Pelajaran (JP) dalam satu tahun terakhir bagi PNS atau 24 (dua puluh empat) JP dalam satu tahun terakhir bagi PPPK.

Pengukuran dimensi kompetensi sebagai berikut:

No	Instrumen Perhitungan	Jabatan Manajerial			Jabatan Nonmanajerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1.	Hasil Penilaian Kinerja					
	- Sangat Baik	25	25	25	25	25
	- Baik	20	20	20	20	20
	- Butuh Perbaikan	15	15	15	15	15
	- Kurang / <i>Misconduct</i>	10	10	10	10	10
	- Sangat Kurang	5	5	5	5	5
2.	Diklat Kepemimpinan					
	- Sudah	10	10	10	-	-
	- Belum	0	0	0	-	-
3.	Diklat Fungsional					
	- Sudah	-	-	-	10	-
	- Belum	-	-	-	0	-
4.	Diklat Teknis					
	- Sudah	-	-	-	-	10
	- Belum	-	-	-	-	0
5.	Pengembangan Kompetensi 20 JP Setahun					
	PNS					
	>= 20 JP	5	5	5	5	5
	<20 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional
	PPPK					
	>= 24 JP	5	5	5	5	5
	<24 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional

3. Indikator dimensi kinerja yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya, dengan pengukuran sebagai berikut:

Dimensi	Predikat Kinerja	Bobot Nilai	
		Maksimal	Perolehan
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang / <i>Misconduct</i>		15
	Sangat Kurang		10

4. Indikator dimensi disiplin yang digunakan adalah riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir yang mencakup:
- Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
 - Hukuman disiplin ringan;
 - Hukuman disiplin sedang; dan
 - Hukuman disiplin berat,

Pengukuran dimensi disiplin adalah sebagai berikut:

Dimensi	Nama Hukuman Disiplin	Bobot Nilai
Disiplin	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

5. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi, meliputi:
- Dimensi kualifikasi dihitung dari jenjang pendidikan formal terakhir yang diperoleh pegawai ASN dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau



SK Pencantuman Gelar yang sudah diperbaharui dengan pemukhtahiran riwayat kepegawaian pada SIASN BKN yang terintegrasi dengan MyASN BKN dan SIMPEGNAS BKN;

- b. Dimensi kompetensi diolah data hasil predikat kinerja dari e-kinerja BKN dan data riwayat pengembangan kompetensi dari SIASN BKN sesuai pemukhtahiran riwayat pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh pegawai ASN pada MyASN BKN dan oleh operator pada SIASN BKN;
 - c. Dimensi kinerja diolah data predikat kinerja dari e-kinerja BKN atau data riwayat Kinerja pada SIASN BKN; dan
 - d. Dimensi disiplin diolah data riwayat disiplin pegawai ASN dari integrasi IDIS BKN dengan SIASN BKN dan/atau peremajaan data hukuman disiplin pada SIASN BKN.
6. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, terdiri atas:
- a. Kualifikasi memiliki bobot 25% (dua puluh lima persen);
 - b. Kompetensi memiliki bobot 40% (empat puluh persen);
 - c. Kinerja memiliki bobot 30% (tiga puluh persen); dan
 - d. Disiplin memiliki bobot 5% (lima persen).
7. Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$\text{Nilai IP ASN} = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

$$\text{IP ASN Unit Organisasi Level II} = \frac{\text{Total nilai IP ASN seluruh pegawai ASN Unit Organisasi Level II}}{\text{Jumlah pegawai ASN Unit Organisasi Level II}}$$

8. Kategori penilaian tingkat Indeks Profesionalitas ASN, antara lain:

Nilai	Kategori
91-100	Sangat tinggi
81-90	Tinggi
71-80	Sedang
61-70	Rendah
60 ke bawah	Sangat rendah

9. Penilaian Indeks Profesionalitas ASN menghitung pegawai dengan status kepegawaian aktif di SIASN BKN yang berkedudukan hukum sebagai ASN, yang terdiri dari:
- a. PNS; dan
 - b. PPPK yang telah diangkat sebelum tahun penilaian Indeks Profesionalitas ASN.

10. Penilaian Indeks Profesionalitas ASN mengecualikan pegawai PNS dengan status berikut:

- Calon PNS (CPNS);
- Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN);
- Dipekerjakan (DPK); dan
- Tugas Belajar Dibiayai

Indikator Indeks Profesionalitas (IP) ASN lingkup UPT Balai KIPM Mataram dihitung dengan merata-ratakan nilai dari seluruh komponen. Capaian IK ini dihitung semesteran.

Pada awalnya target semester I adalah 81 dan semester II adalah 87. Namun, sesuai dengan Nota Dinas Nomor 504/SJ.3/RC.610/III/2025 tentang Hasil Rapat Pembahasan Perubahan Pengukuran Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN dan Penyesuaian Target Tahun 2025 s.d.2029, maka target indikator IP ASN pada semester 1 berubah menjadi 75.

Unit Organisasi Level I	2025		2026		2027		2028		2029	
	Semester	Semester	Semester	Semester	Semester	Semester	Semester	Semester	Semester	Semester
	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
SETJEN	75	82	75	82,5	76	83	76	83,5	77	84
DJPKRL*	77	84	77	84,5	78	85	78	85,5	79	86
DJPT	77	84	77	84,5	78	85	78	85,5	79	86
DJPB	74	81	74	81,5	75	82	75	82,5	76	83
DJPDSPKP	74	81	74	81,5	75	82	75	82,5	76	83
DJPSPDKP	74	81	74	81,5	75	82	75	82,5	76	83
ITJEN	76	83	76	83,5	77	84	77	84,5	78	85
BPPSDMKP	74	81	74	81,5	75	82	75	82,5	76	83
BPPMHKP	75	82	75	82,5	76	83	76	83,5	77	84

Capaian IKU Nilai IP ASN lingkup Balai KIPM Mataram semester I tahun 2025 adalah 84,92 atau tercapai 113,23% dari target 75.

Sedangkan capaian IKU Nilai IP ASN lingkup Balai KIPM Mataram semester I tahun 2024 adalah 89,34 atau tercapai 110,30% dari target 81 dan semester II tahun 2024 tercapai 93,73 atau dengan persentase 108,99% dari target 86.

Pagu anggaran tahun 2025 untuk mendukung indikator Indeks Profesionalitas ASN sebesar Rp. 4.377.798.000 dan terealisasi sebesar Rp. 2.220.571.112 atau setara dengan 50,72% dari pagu anggaran.

Perbandingan capaian indikator ini pada tahun 2025 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, pada triwulan dan tahunan berjalan serta Renstra 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut.



Tabel 3.11 Target dan Realisasi IKS.9

Realisasi					Tahun 2025							Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi TW Sblmnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian thd Target TW II	Kenaikan thd TW sblmnya	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK 2025	Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
73	82,98	82,8	90,44	93,73	-	75	84,92	113,23	84,92	87	97,61	72	76	111,74

Capaian indikator belum dapat dibandingkan dengan target Renstra BPPMHKP 2025-2029 karena dokumen Renstra BPPMHKP belum terbit yang dikarenakan dokumen Renstra KKP 2025-2029 juga belum terbit sampai pada saat laporan kinerja ini disusun.

IKS.10. Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Mataram

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Kementerian PANRB menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan penyesuaian terhadap kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pesatnya kemajuan teknologi, yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.

Pada Tahun 2025, evaluasi dilaksanakan secara berjenjang, Unit Organisasi Level I lingkup KKP dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal, sedangkan Unit Organisasi Level II dievaluasi oleh Pengelola Kinerja Level I masing-masing.

Evaluasi atas AKIP dilaksanakan dengan penginputan mandiri komponen/subkomponen/kriteria beserta bukti evidence dan link evidence melalui



Aplikasi Website Kinerja KKP dengan parameter dan bobot: Perencanaan Kinerja (30%); Pengukuran Kinerja (30%); Pelaporan Kinerja (15%); dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%).

Indikator Penilaian Mandiri SAKIP Balai KIPM Mataram pada tahun 2025 ditargetkan tahunan dengan nilai 86.

Realisasi indikator ini pada tahun 2024 adalah 83,6 dari target nilai 82 atau tercapai 101,95%.

Pagu anggaran tahun 2025 untuk mendukung kegiatan indikator Nilai Penilaian Mandiri SAKIP sebesar Rp. 41.880.000 dan belum ada realisasi anggaran.

Perbandingan capaian indikator ini pada tahun 2024 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, pada triwulan dan tahunan berjalan serta Renstra 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.12 Target dan Realisasi IKS.10

Realisasi					Tahun 2025							Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi TW Sblmnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian thd Target TW II	Kenaikan thd TW sblmnya	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK 2025	Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
82	83,56	-	82,05	83,6	-	-	-	-	-	-	-	85	85	-

Ket.: Tahun 2022 tidak terdapat IKU tersebut/tidak dilakukan penilaian

Capaian indikator belum dapat dibandingkan dengan target Renstra BPPMHKP 2025-2029 karena dokumen Renstra BPPMHKP belum terbit yang dikarenakan dokumen Renstra KKP 2025-2029 juga belum terbit sampai pada saat laporan kinerja ini disusun.

IKS.11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Balai KIPM Mataram

Definisi IKU ini adalah persentase rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang telah ditindaklanjuti (berstatus tuntas) sampai dengan waktu pengukuran.

Pagu anggaran tahun 2025 untuk mendukung kegiatan indikator ini sebesar Rp. 36.000.000 dan belum ada realisasi anggaran.



Realisasi indikator ini pada triwulan II tahun 2025 adalah 100% dari target 85% atau tercapai 117,65% sebagaimana tampilan pada dashboard Aplikasi Sidak KKP sesuai Gambar 6 berikut. Sedangkan realisasi pada triwulan II tahun 2024 adalah 100% dari target 80% atau tercapai 120%.

Rumus Perhitungan :

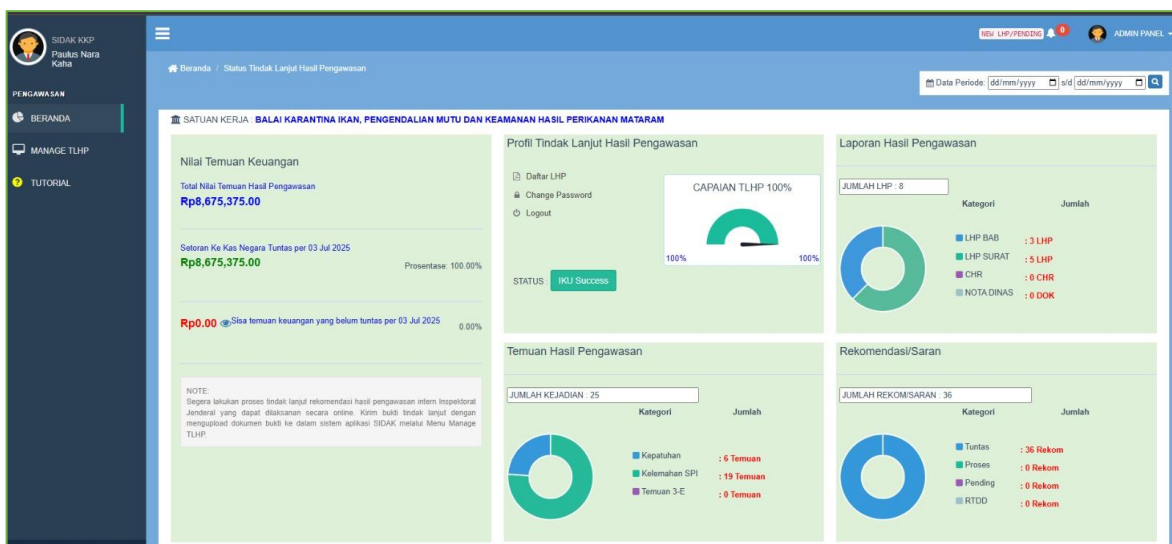
$$= \frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100\%$$

Keterangan:

$\sum N_t$: Jumlah rekomendasi LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti

$\sum N$: Jumlah rekomendasi LHP Inspektorat Jenderal KKP

Gambar 3
Persentase TLHP Balai KIPM Mataram sampai dengan Triwulan II Tahun 2025



Perbandingan capaian indikator sampai dengan triwulan II tahun 2025 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, pada triwulan dan tahunan berjalan serta Renstra 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.13 Target dan Realisasi IKS. I I

Realisasi					Tahun 2025							Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi TW Sblmnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian thd Target TW II	Kenaikan thd TW sblmnya	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK 202	Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
100	100	100	100	100	100	85	100	117,65	100	85	117,65	82	88	113,63



Capaian indikator belum dapat dibandingkan dengan target Renstra BPPMHKP 2025-2029 karena dokumen Renstra BPPMHKP belum terbit yang dikarenakan dokumen Renstra KKP 2025-2029 juga belum terbit sampai pada saat laporan kinerja ini disusun.

IKS.12. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SiRUP Lingkup UPT Balai KIPM Mataram

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Formula Perhitungan:

Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SiRUP =

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Pengukuran indikator dilakukan secara triwulanan dengan target 76% dan tercapai sebesar 100% atau tercapai 120%.



Indikator Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SiRUP merupakan indikator baru di tahun 2025 dan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 3.042.677.000 dengan realisasi sebesar Rp. 730,996,854 atau tercapai 24,02%..

Perbandingan capaian indikator pada Triwulan II tahun 2025 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, pada triwulan dan tahunan berjalan serta Renstra 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.14 Target dan Realisasi IKS.12

Realisasi					Tahun 2025							Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi TW Sblumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian thd Target TW II	Kenaikan thd TW sblmnya	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK	Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target
-	-	-	-	-	99,06	76	100	120	0,94	76	120	-	80	120

Capaian indikator belum dapat dibandingkan dengan target Renstra BPPMHKP 2025-2029 karena dokumen Renstra BPPMHKP belum terbit yang dikarenakan dokumen Renstra KKP 2025-2029 juga belum terbit sampai pada saat laporan kinerja ini disusun.

IKS.13. Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup Balai KIPM Mataram

Penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan Unit Eselon I di KKP dengan focus pada pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mengacu pada Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP.

Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen system antikorupsi, yang meliputi :

1. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
2. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
3. Penanganan pengaduan masyarakat dan WBS (bobot 15%)
4. Penanganan benturan kepentingan (bobot 15%)
5. Pelaporan Harta Kekayaan (LHKAN) (bobot 15%)
6. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%)



Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.

Indikator ini ditargetkan tahunan. Pada tahun 2024 indikator kinerja ini tidak digunakan karena bukan merupakan UPT yang menjadi target.

Realisasi anggaran kegiatan pendukung indikator ini sebesar Rp. 36.000.000 dan belum ada realisasi.

Perbandingan capaian indikator sampai dengan Triwulan II tahun 2025 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, pada triwulan dan tahunan berjalan serta Renstra 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.15 Target dan Realisasi IKS.13

Realisasi					Tahun 2025							Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi TW Sblmnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian thd Target TW II	Kenaikan thd TW sblmnya	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK 2025	Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	1	-	88,90	88,90	-	-	-	-	-	75	-	-	1	-

Ket. : Tahun 2020 dan 2022 tidak terdapat IKU tersebut

IKS.14. Inovasi Pelayanan Publik Lingkup UPT Balai KIPM Mataram

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinil dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

- Kriteria Inovasi: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan
- Kelompok inovasi: umum, khusus
- Aspek penilaian Kelompok Umum: ringkasan (5%), ide inovatif (20%), Signifikansi (25%), Kontribusi terhadap capaian TPB (5%), Adaptabilitas (20%), keberlanjutan (20%), Kolaborasi pemangku kepentingan (5%)



- Aspek penilaian Kelompok Khusus: Pembaruan/Peningkatan inovasi (25%), Adaptabilitas (20%), Penguatan keberlanjutan (25%), Evaluasi (30%)
- Persyaratan inovasi: memenuhi seluruh kriteria inovasi; selaras dengan tema kompetisi; relevan dengan salah satu kategori kompetisi dan kelompok inovasi, diajukan dalam bentuk proposal dan disertai dokumen pendukung; menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepantasan.
- IKU inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Lingkup UPT BPPMHKP, dengan ukuran sebagai berikut:
 - a. Eselon 2 yang ditetapkan oleh Unit Eselon I untuk mengajukan proposal inovasi kepada Tim Penilai Eselon I.
 - b. Target hasil: Jumlah proposal unit kerja level 2 yang ditetapkan dalam BA penilaian oleh Tim Penilai Eselon I

Inovasi dihitung dari:

Jumlah inovasi yang diusulkan untuk tahap seleksi administrasi di Tingkat BPPMHKP dan ditetapkan melalui Berita Acara yang ditetapkan oleh Tim Penilai.

Indikator ini ditargetkan tahunan. Realisasi indikator ini pada tahun 2024 adalah sebesar 100% dari target 1 inovasi.

Pagu anggaran untuk mendukung indikator Inovasi Pelayanan Publik sebesar Rp. 56.000.000 dan belum ada realisasi

Perbandingan capaian indikator ini pada Triwulan II tahun 2025 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, pada triwulan dan tahunan berjalan serta Renstra 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.16 Target dan Realisasi IKS.14

Realisasi					Tahun 2025							Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi TW Sblmnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian thd Target TW II	Kenaikan thd TW sblmnya	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK 2025	Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-

Ket. : Tahun 2021 s.d. 2023 tidak terdapat IKU tersebut

IKS.15. Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan UPT Balai KIPM Mataram

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu disusun



Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala.

Selain itu, data SKM akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. SKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas publik selanjutnya.

Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Kep/14/M.PAN/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Oleh karena itu, Balai KIPM Mataram telah melakukan Pengukuran Survei Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Sertifikasi pada triwulan II tahun 2025.

Pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat pada triwulan II tahun 2025 dilakukan pada awal bulan April s/d akhir bulan Juni 2025 yang diisi oleh responden yang telah menerima pelayanan dari Balai KIPM Mataram minimal 3 bulan terakhir dengan mengisi kuesioner secara online pada link :<https://ptsp.kkp.go.id/skm/>, kemudian dari data aplikasi SUSAN (Survei Kepuasan) tersebut diolah untuk menjadi sebuah bentuk Laporan Survei Kepuasan Masyarakat.

Link dibagikan kepada pengguna jasa baik dengan mengirimkan link melalui WhatsApp dalam bentuk *QRcode* atau link website <https://ptsp.kkp.go.id/skm/> ataupun dengan menunjukkan printout Qrcode yang tersedia di meja pelayanan jika pengguna jasa langsung datang ke kantor pelayanan Balai KIPM Mataram.

Berdasarkan hasil rekapitulasi data yang telah diisi secara online melalui aplikasi Susan (Survei Kepuasan) oleh responden pada triwulan II tahun 2025



didapatkan sebanyak 58 (limapuluh delapan) responden yang telah mengisi data dengan baik dan data ini kemudian diolah serta dianalisis lebih lanjut

Realisasi Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Mataram pada triwulan II tahun 2025 adalah 95,59 dari target 88 atau tercapai 108,63%. Sedangkan pada Triwulan II tahun 2024 tercapai 88,37 dari target 84 atau tercapai 105,20%

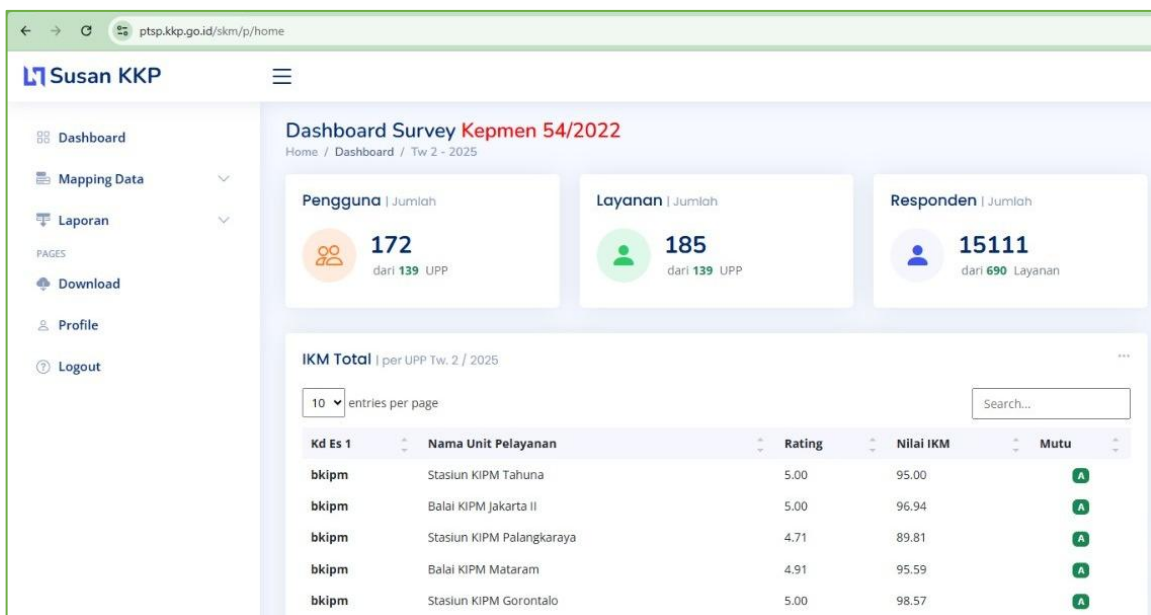
Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan, secara umum kualitas pelayanan pada Unit Pelayanan Teknis Balai KIPM Mataram dipersepsikan Sangat Baik oleh masyarakat penggunaanya. Hal ini terlihat dari nilai persepsi sebesar 95,59 (Gambar 4) berada dalam interval indeks persepsi antara 3,1 – 4,0 dengan nilai konversi interval indeks persepsinya berada antara 88,31 – 100,00 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.8 berikut.

Tabel 3.17 Kategorisasi Kepuasan Pelayanan

Nilai Persepsi	Interval Indeks Persepsi	Konversi Interval Indeks Persepsi	Kinerja Unit Pelayanan
1	3,1 - 4,0	88,31 – 100,00	(A) Sangat baik
2	2,1 - 3,0	76,61 – 88,30	(B) Baik
3	1,1 - 2,0	65,00 – 76,60	(C) Kurang baik
4	0,1 - 1,0	25,00 – 64,99	(D) Tidak baik

Gambar 4

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik Balai KIPM Mataram Triwulan II Tahun 2025





Indikator ini mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 70.520.000 dan belum ada realisasi.

Perbandingan capaian indikator sampai dengan Triwulan II tahun 2025 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, pada triwulan dan tahunan berjalan serta Renstra 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.18 Target dan Realisasi IKS.15

Realisasi					Tahun 2024							Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi TW Sblmnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian thd Target TW II	Kenaikan thd TW sblmnya	Target PK 2025	% Realisasi thd Target PK 2025	Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	-	94,69	92,61	97,71	95,95	88	95,59	109,03	(36)	88	108,63	-	85	112,46

Ket. : Tahun 2020 - 2021 tidak terdapat IKU tersebut

Capaian indikator belum dapat dibandingkan dengan target Renstra BPPMHKP 2025-2029 karena dokumen Renstra BPPMHKP belum terbit yang dikarenakan dokumen Renstra KKP 2025-2029 juga belum terbit sampai pada saat laporan kinerja ini disusun.

3.3. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Belanja Balai KIPM Mataram, berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA-032.13.2.567758/2025 tanggal 2 Desember 2024 dengan Nilai Anggaran sebesar Rp 8.257.015.000 dimana sumber dananya berasal dari Rupiah Murni sebesar Rp 8.002.159.000 dan PNPB sebesar Rp 254.856.000.

Selama triwulan I tahun 2025 telah terjadi 2 kali revisi DIPA. Revisi I : revisi halaman III DIPA (pagu tetap) tanggal 04 Februari 2025, revisi II : revisi blokir anggaran kode "A" sebesar Rp.2.320.191.000 (pagu anggaran tetap) tanggal 21 Februari 2025.

Pada triwulan II tahun 2025 telah terjadi 2 kali revisi DIPA. Revisi I : revisi relaksasi blokir atau pengurangan pagu blokir pada tanggal 16 April 2025 yaitu untuk belanja listrik, internet, honor tenaga PPNN, kegiatan sertifikasi, kegiatan Standarisasi Lembaga, yang semula sebesar Rp.2.320.191.000 menjadi Rp.2.024.885.000. Revisi II : revisi halaman III DIPA (pagu tetap) tanggal 22 April 2025.



Realisasi penyerapan anggaran Balai KIPM Mataram sampai Triwulan II tahun 2025 sebesar Rp 2.827.992.427 atau mencapai 34,25% dari alokasi anggaran sebesar Rp 8.257.015.000 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.19 dan Tabel 3.20 sebagai berikut untuk setiap kegiatan dan jenis belanja.

Dari Laporan Realisasi Penerimaan PNBPN, jumlah total penerimaan PNBPN sampai Triwulan II tahun 2025 sebesar Rp 30.410.000 dari target Rp 18.550.000 atau mencapai 163,93%. Pencapaian PNBPN tersebut dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jasa Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu juga dengan adanya perubahan sistem layanan penerbitan sertifikat yang menggunakan sistem aplikasi baru yaitu Aplikasi SiapMutu serta PMK Nomor 1 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan sehingga mengakibatkan adanya perubahan tarif pengujian laboratorium.

Dengan adanya reorganisasi BKIPM menjadi BPPMHKP sehingga terjadi perubahan tugas dan fungsi BPPMHKP, maka terjadi perubahan beberapa indikator kinerja pada tahun 2024 baik dalam hal uraian ataupun targetnya. Hal ini mempengaruhi realisasi PNBPN tahun 2024 yang tidak dapat mencapai target karena terjadi pengurangan PNBPN dengan adanya pengalihan PNBPN untuk BKHIT yang merupakan PNBPN Karantina.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada tahun 2025 terjadi penurunan target PNBPN pada seluruh unit pelaksana teknis BPPMHKP.

Tabel 3.19 Penyerapan Anggaran per Nama Kegiatan Triwulan II T.A 2025

NO	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Dukungan manajemen internal lingkup BKIPM Mataram	7.782.015.000	2.808.589.527	36,09
2	Pengendalian mutu	280.000.000	3.500.000	1,25
3	Manajemen mutu	195.000.000	15.902.900	8,16
TOTAL		8.257.015.000	2.827.992.427	34,25



Tabel 3.20 Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Triwulan II T.A 2025

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	%
1	Belanja Pegawai	4.309.058.000	2.094.431.728	48,61
2	Belanja Barang	3.947.957.000	733.560.699	18,58
3	Belanja Modal	0	0	0
TOTAL		8.257.015.000	2.827.992.427	34,25



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Balai KIPM Mataram Triwulan II Tahun 2025 menyajikan perkembangan capaian sasaran kegiatan Balai KIPM Mataram selama dan/atau sampai Triwulan II tahun 2025 yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM).

Berdasarkan hasil analisis hasil penilaian kinerja, Balai KIPM Mataram telah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan program untuk mencapai sasaran. Sesuai dengan pengukuran kinerja terlihat bahwa target-target dari sasaran yang ingin dicapai periode Januari sampai dengan Maret Tahun 2025 telah tercapai.

Hal ini dibuktikan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)/Skor Kinerja sebesar 114,41 dengan indikator warna biru yang berarti dalam kategori “ISTIMEWA” pada Aplikasi Kinerjaku KKP.

Dari 15 indikator kinerja di tahun 2025, terdapat 8 indikator kinerja yang memiliki target di Triwulan II dimana semua pencapaiannya memenuhi dan/atau melebihi target.

Demikian Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Balai KIPM Mataram disusun. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja di lingkup Balai KIPM Mataram dan data dukung pengukuran kinerja di BPPMHKP.



LAMPIRAN - LAMPIRAN





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATARAM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **M. Farchan**
Jabatan : Plt. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama

Plt. Kepala Balai Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Mataram



Ditandatangani
Secara Elektronik

M. Farchan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATARAM

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	70
		3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	99
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	75
		5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Nilai)	92
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Nilai)	71,5
		8.	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	100
		9.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Indeks)	87
		10.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Nilai)	86
		11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	85
		12.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	76
		13.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	70
		14.	Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Unit)	1
		15.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Nilai)	88

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram	5.187.015.000
2.	Manajemen Mutu	130.000.000
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	186.000.000
Total Anggaran Balai KIPM Mataram Tahun 2025		5.503.015.000

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama
Plt. Kepala Balai Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Mataram



Ditandatangani
Secara Elektronik

M. Farchan

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI KIPM MATARAM
TAHUN 2025**

Nama Indikator	:	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Mataram
Nama Timja	:	Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Periode Laporan	:	Triwulan II

Nama Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Mataram

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%		70%
Realisasi	100%	100%	100%						
%Capaian	120%	120%	120%						

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4``

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi
- Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BBPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. - Dalam implementasinya, sertifikasi produksi primer memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai Pembina seperti Eselon 1 lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota. - Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas KKP ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan.

- Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di kapal hingga diterima di unit Pengolahan ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan. BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu di sektor produksi primer (hulu).
- Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu (Quality Assurance) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.
- BPPMHKP Mataram saat ini mengemban tanggung jawab baru melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperbaharui. IKU baru ini dirancang untuk mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam pengelolaan mutu dan keamanan hasil perikanan secara terpadu. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas layanan, optimalisasi serta penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan sumber daya perairan.
- Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer terdiri dari :
 - a. Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB)
 - b. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)
 - c. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)
 - d. Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)
 - e. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)
 - f. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan
- Capaian iku ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut :

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$$

%X = Jumlah hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer

A = Jumlah Unit Usaha yang menerapkan CBIB

B = Jumlah Unit menerapkan CPIB

C = Jumlah Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Jumlah Unit Usaha menerapkan CPOIB

E = Jumlah Unit Usaha menerapkan CDOIB

F = Jumlah Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)*)

- Pada Triwulan II tahun 2025 BPPMHKP Mataram hanya melakukan sertifikasi terhadap 1 jenis sertifikasi yaitu : Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan
- Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) adalah sertifikat yang diberikan kepada kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan Dengan memperhatikan tahapan pembongkaran ikan, standar fasilitas penanganan dan penyimpanan ikan di kapal perikanan, standar prosedur penanganan dan penyimpanan ikan di kapal perikanan, dokumen dan hygiene karyawan.
- Kegiatan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan dilaksanakan pada 21 kapal :
 1. Kapal Andika 07
 2. Kapal Borneo Afgan
 3. Kapal Cahaya Indah 07
 4. Kapal Cahaya Indah 08
 5. Kapal Dimas Jaya 01
 6. Kapal Harapan Baru LB 01
 7. Kapal Harapan Baru LB 04
 8. Kapal Harapan Baru LB 05
 9. Kapal Hasil Bersama 06
 10. Kapal Jamila
 11. Kapal Rizky Maulana
 12. Kapal Ulan Sari 01
 13. Kapal Usaha Baru 19
 14. Kapal Aisah 17
 15. Kapal Akarni Jaya 08
 16. Kapal Akarni Jaya 09
 17. Kapal AlKahfi 01
 18. Kapal Arlija SP 01

19. Kapal Armada AGP 02

20. Kapal Arya Husna 01

21. Kapal Lautan Mas 02

Pelaksanaan Inspeksi Sertifikasi Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan ini dilaksanakan oleh inspektur mutu BPPMHKP Mataram.

- Pada triwulan II tahun 2025, sektor produksi primer lingkup Balai KIPM Mataram terdapat realisasi Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) di Kapal Perikanan sebanyak 21 sertifikat atau tercapai 100% dari target 70% atau dengan persentase sebesar 120%. Untuk triwulan yang sama pada tahun sebelumnya tidak ada capaian karena indikator ini mulai digunakan pada triwulan IV tahun 2024.
- Berikut capaian dan perhitungan IK “Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Mataram”:
 - Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) di Kapal Perikanan:
Target Sertifikat CPIB = 21 sertifikat
Capaian Sertifikat CPIB = 21 sertifikat
Persentase Capaian = $21/21 \times 100\% = 100\%$
 - Capaian Indikator IKS.1:
 $\%X = (100\%/1) \times 100\%$
 $= 100\% \times 100\%$
 $= 100\%$
- Output dari kegiatan ini terdiri dari :
21 Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) di Kapal Perikanan dengan masa berlaku 2 tahun yang terbit pada triwulan II tahun 2025.
- Untuk melaksanakan kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp.125.000.000 yang digunakan untuk :
 1. Sertifikasi CBIB pada Pembudidayaan Ikan dan CPPIB Rp. 34,000,000
 2. Sertifikasi CPIB pada Pembenihan Rp. 14,990,000
 3. Bimtek Sertifikasi CBIB, CPIB Pembenihan dan CPIB Kapal Rp. 20,010,000
 4. Sertifikasi CPIB Kapal Perikanan Rp. 30,000,000
 5. Sosialisasi CBIB, CPIB Pembenihan dan CPIB Kapal Rp. 26,000,000

- Realisasi anggaran sampai dengan TW II Tahun 2025 sebesar Rp.0 atau 0% dengan rincian sebagai berikut : Jumlah SDM yang terlibat pada kegiatan Sertifikasi CPIB Kapal pada TW II sebanyak 8 orang yang terdiri dari 8 Inspektur Mutu BPPMHKP Mataram.

No.	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
1	Sertifikasi CBIB pada Pembudidayaan Ikan dan CPPIB	34,000,000	0	34,000,000
2	Sertifikasi CPIB pada Pembenihan	14,990,000	0	14,990,000
3	Bimtek Sertifikasi CBIB, CPIB Pembenihan dan CPIB Kapal	20,010,000	0	20,010,000
4	Sertifikasi CPIB Kapal Perikanan	30,000,000	0	30,000,000
5	Sosialisasi CBIB, CPIB Pembenihan dan CPIB Kapal	26,000,000	0	26,000,000
JUMLAH		125.000.000	0	125.000.000

Akar Masalah

- Permasalahan yang dihadapi pada kegiatan sertifikasi CPIB di Kapal Perikanan antara lain:
1. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman para pemilik kapal baik nahkoda dan ABK Kapal dalam memahami standar sertifikasi CPIB di Kapal.
 2. Adanya temuan dari DG SANTE (Uni Eropa) terkait kapal-kapal yang belum tersertifikasi CPIB Kapal yang salah satunya berasal dari wilayah kerja BPPMHKP Mataram.
 3. Keterbatasan anggaran karena adanya efisiensi anggaran dari pemerintah sehingga kegiatan validasi produk pada sektor produksi primer (inspeksi/verifikasi/surveilans) tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator

1. Bekerjasama dengan Dirjen Tangkap wilayah NTB sebagai pembina untuk melaksanakan pelatihan dasar kepada nahkoda maupun ABK kapal Cara Penanganan Ikan Yang Baik di atas Kapal
2. Remote Inspection Sertifikasi CPIB di Kapal Perikanan sebanyak 21 Kapal.

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
• Melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan Dirjen Tangkap sebagai Pembina untuk terus melakukan pelatihan Cara Penanganan Ikan Yang Baik di atas Kapal yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh sertifikat CPIB di Kapal (khusus bagi yang belum memiliki sertifikat pelatihan)	Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu dan Kemanan Hasil Perikanan

Mengoptimalkan pelaksanaan inspeksi melalui remote inspeksi.	
--	--

Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
- Telah dilaksanakan Bimtek Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) kepada Pemilik Tambak Udang di wilayah NTB yang difasilitasi oleh PTSP Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tanggal 21 Mei 2025. - Telah dilaksanakannya pelatihan Cara Penanganan Ikan Yang Baik di Kapal kepada nahkoda maupun ABK Kapal bekerjasama dengan Dirjen Tangkap perwakilan UPT NTB dimana sertifikat pelatihan yang diperoleh sebagai salah satu syarat dalam penerbitan sertifikat CPIB di Kapal secara daring oleh PPN Pengambengan pada tanggal 3 Juni 2025. - Remote Inspection Sertifikasi CPIB di Kapal Perikanan pada tanggal 7 dan 8 Mei 2025.	Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu dan Kemanana Hasil Perikanan

Daftar Sertifikasi CPIB Kapal di Triwulan II Tahun 2025

No.	Nama Kapal	Grade	Nomor Sertifikat
1.	Kapal Andika 07	-	Menunggu penerbitan sertifikat dari Pusat Mutu Primer
2.	Kapal Borneo Afgan	-	
3.	Kapal Cahaya Indah 07	-	
4.	Kapal Cahaya Indah 08	-	
5.	Kapal Dimas Jaya 01	-	
6.	Kapal Harapan Baru LB 01	-	
7.	Kapal Harapan Baru LB 04	-	
8.	Kapal Harapan Baru LB 05	-	
9.	Kapal Hasil Bersama 06	-	
10.	Kapal Jamila	-	
11.	Kapal Rizky Maulana	-	
12.	Kapal Ulan Sari 01	-	
13.	Kapal Usaha Baru 19	-	
14.	Kapal Aisah 17	-	
15.	Kapal Akarni Jaya 08	-	
16.	Kapal Akarni Jaya 09	-	
17.	Kapal AlKahfi 01	-	
18.	Kapal Arlija SP 01	-	
19.	Kapal Armada AGP 02	-	
20.	Kapal Arya Husna 01	-	
21.	Kapal Lautan Mas 02	-	

Plt. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram



M. Farchan

Mataram, 7 Juli 2025
Penanggungjawab Indikator Kinerja

Ni Luh Anggra Lasmika

BIMTEK IMPLEMENTASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO – (NARASUMBER BIMTEK CBIB)



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

KKP
2025

pancasila biru 08

Bimbingan Teknis/Sosialisasi
Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku Usaha
Rabu, 21 Mei 2025



MHKP



BPPMHKP Mataram

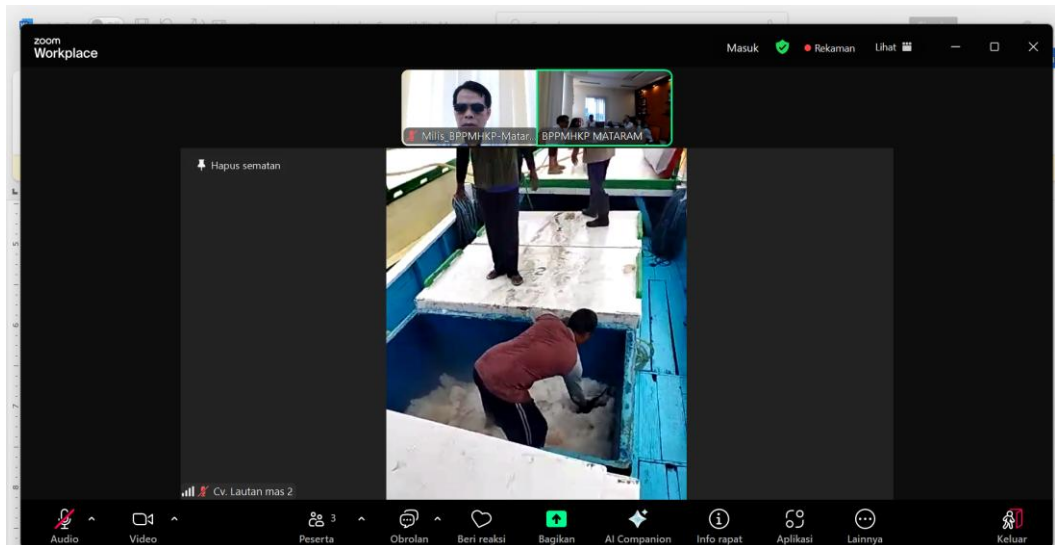
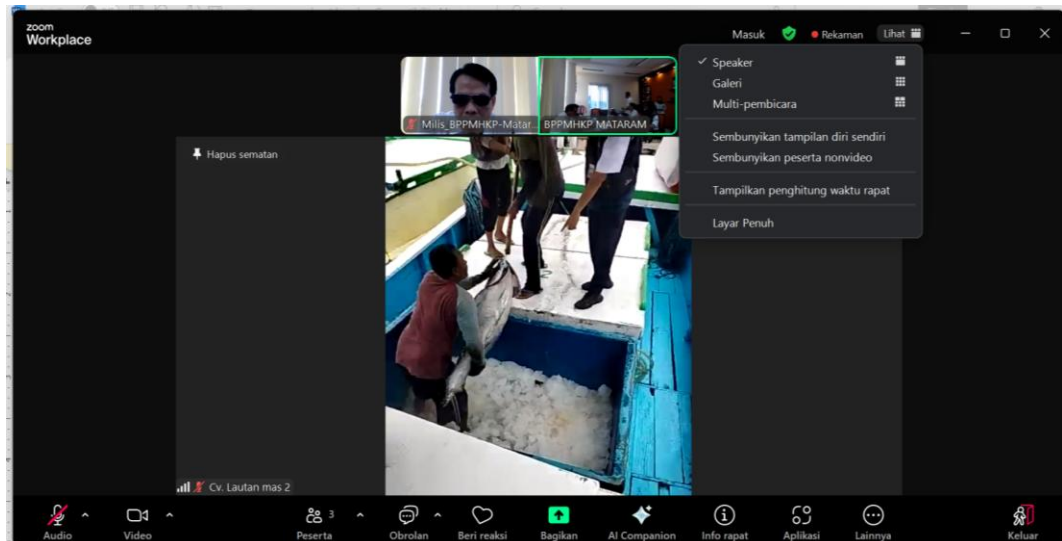
KOMPAS

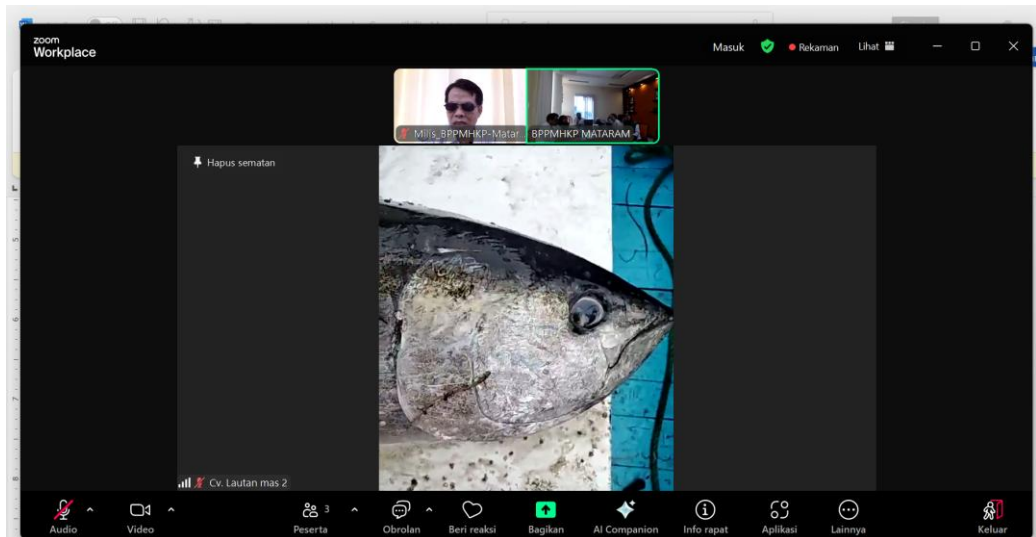
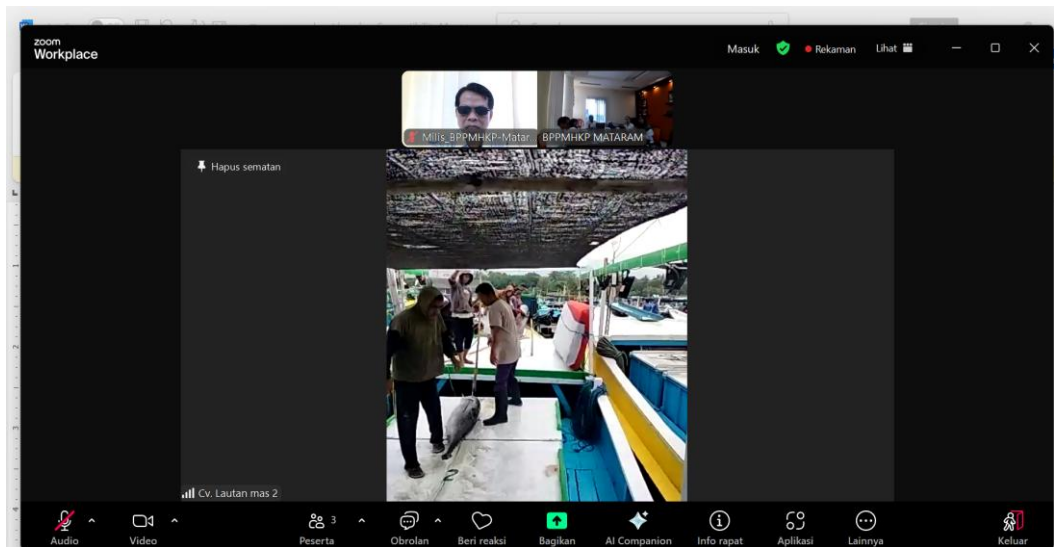


BerAKHLAK

bangga mataram bangsa

REMOTE INSPEKSI SERTIFIKASI CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK (CPIB) DI KAPAL PERIKANAN







KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

EKONOMI BIRU UNTUK INDONESIA EMAS

KKP
2025

panganbiru

08
PUSAT

**Remote Inspection Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas Kapal di
Pelabuhan Pendaratan Ikan Labuhan Lombok, Kabupaten Lombok Timur
Rabu, 7 Mei 2025**



BPP
MHKP



BPPMHKP Mataram

KOMPAK



BerAKHLAK

bangga
melayani
bangsa



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

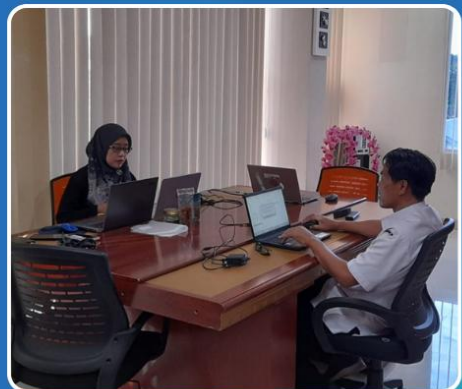
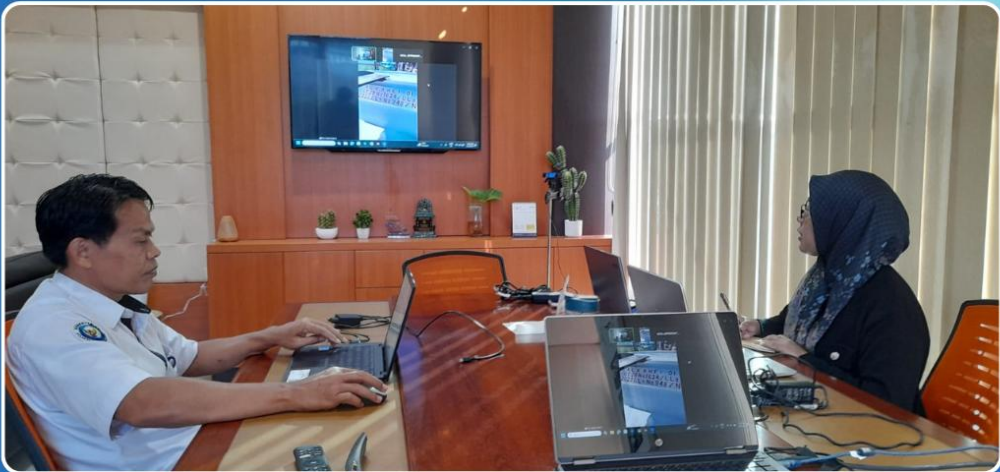
EKONOMI BIRU UNTUK INDONESIA EMAS

KKP
2025

panganbiru

08
PUSAT

**Remote Inspection Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas Kapal di
Pelabuhan Pendaratan Ikan Labuhan Lombok, Kabupaten Lombok Timur
Kamis, 8 Mei 2025**



BPP
MHKP



BPPMHKP Mataram

KOMPAK



BerAKHLAK

bangga
melayani
bangsa

BIMTEK CPIB KAPAL KEPADA NAKHODA DAN ABK KAPAL KERJASAMA DENGAN
PPN PENGAMBENGAN DITJEN TANGKAP KKP



KKP
2025

panganbiru 08
POVERTY HUNTERS

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

BIMBINGAN TEKNIS CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK (CPIB)



Pengambengan, 3 Juni 2025



ppnpengambengan



PPN Pengambengan



@ppnpengambengan

BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK

IKS.1 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB

B = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPIB

C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPOIB

E = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CDOIB

F = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPIB kapal

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)

Capaian Triwulan II 2025

- Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) di Kapal Perikanan:

Target Sertifikat CPIB = 21 sertifikat

Capaian Sertifikat CPIB = 21 sertifikat

Persentase Capaian = $21/21 \times 100\% = 100\%$

- Capaian Indikator IKS.1:

$\%X = (100\%)/1 \times 100\%$

$= 100\% \times 100\%$

$= 100\%$

Mataram, 7 Juli 2025

Plt. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram,



M. Farchan

Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan,

Ni Luh Anggra Lasmika

REKAPITULASI SERTIFIKASI CPIB KAPAL BALAI KIPM MATARAM 2025

TRIWULAN II

NO.	TANGGAL PERMOHONAN	NAMA KAPAL	NIB	TANGGAL DAN NOMOR SERTIFIKAT
1	28 April 2025	ANDIKA 07	0220003401218	On proses
2	28 April 2025	BORNEO AFGAN	2909210044991	On proses
3	28 April 2025	CAHAYA INDAH 07	0220003181857	On proses
4	28 April 2025	CAHAYA INDAH 08	1101230008358	On proses
5	28 April 2025	DIMAS JAYA 01	0220005101985	On proses
6	28 April 2025	HARAPAN BARU LB 01	0220002551892	On proses
7	28 April 2025	HARAPAN BARU LB 05	0220002551892	On proses
8	28 April 2025	HASIL BERSAMA 06	0220000570968	On proses
9	28 April 2025	JAMILA	2412240004104	On proses
10	28 April 2025	HARAPAN BARU LB 04	0220002551892	On proses
11	28 April 2025	RIZKY MAULANA	0220005261316	On proses
12	28 April 2025	ULAN SARI 01	0220006440226	On proses
13	28 April 2025	USAHA BARU 19	0220108121348	On proses
14	28 April 2025	AISAH 17	1803220039635	On proses
15	28 April 2025	AKARNI JAYA 08	1803220039635	On proses
16	28 April 2025	AKARNI JAYA 09	1803220039635	On proses
17	28 April 2025	AL KAHFI 01	108220034026	On proses
18	28 April 2025	ARLIZA SJ 01	0603220008064	On proses
19	28 April 2025	ARMADA AGP 02	1204220004526	On proses
20	28 April 2025	ARYA HUSNA 01	0805230076787	On proses
21	28 April 2025	LAUTAN MAS 02	1803220039635	On proses

Mataram, 7 Juli 2025



Plt. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram,

M. Farchan

M. Farchan

Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan,

Ni Luh Anggra Lasmika

Ni Luh Anggra Lasmika

REKAPITULASI SERTIFIKASI CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK (CPIB) BALAI KIPM MATARAM 2025
TRIWULAN II

NO.	TANGGAL PERMOHONAN	NAMA PERUSAHAAN	NIB	KOMODITAS	TANGGAL DAN NOMOR SERTIFIKAT
		NIHIL			

Mataram, 7 Juli 2025



Plt. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram,

M. Farchan

Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan,

Ni Luh Anggra Lasmika

REKAPITULASI SERTIFIKASI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK (CBIB) BALAI KIPM MATARAM 2025

TRIWULAN II

NO.	TANGGAL	NOMOR PERMOHONAN	NAMA PERUSAHAAN	NIB	KOMODITAS	TANGGAL DAN NOMOR SERTIFIKAT
		NIHIL				



Plt. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram,

M. Farchan

Mataram, 7 Juli 2025

Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan,

Ni Luh Anggra Lasmika

REKAPITULASI SERTIFIKASI CARA PEMBUATAN OBAT IKAN YANG BAIK (CPOIB) BALAI KIPM MATARAM 2025

TRIWULAN II

NO.	TANGGAL PERMOHONAN	NAMA PERUSAHAAN	NIB	KOMODITAS	TANGGAL DAN NOMOR SERTIFIKAT
		NIHIL			

Mataram, 7 Juli 2025



Plt. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram,

M. Farchan

Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan,

Ni Luh Anggra Lasmika

REKAPITULASI SERTIFIKASI CARA DISTRIBUSI OBAT IKAN YANG BAIK (CDOIB) BALAI KIPM MATARAM 2025

TRIWULAN II

NO.	NAMA PERUSAHAAN	Grade	KOMODITAS	NOMOR SERTIFIKAT
	N I H I L			

Mataram, 7 Juli 2025



Plt. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram,

M. Farchan

Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan,

Ni Luh Anggra Lasmika

REKAPITULASI SERTIFIKASI CARA PEMBUATAN PAKAN IKAN YANG BAIK (CPPIB) BALAI KIPM MATARAM 2025

TRIWULAN II

NO.	TANGGAL PERMOHONAN	NAMA PERUSAHAAN	NIB	KOMODITAS	TANGGAL DAN NOMOR SERTIFIKAT
1					
2					
3					
4		NIHIL			
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

Mataram, 7 Juli 2025



Plt. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram,

M. Farchan

Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan,

Ni Luh Anggra Lasmika

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI KIPM MATARAM
TAHUN 2025**

Nama Indikator	:	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Mataram
Nama Timja	:	Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Periode Laporan	:	Triwulan II

Nama Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Mataram

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%		70%
Realisasi	100%	100%	100%						
%Capaian	120%	120%	120%						

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4``

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi

• **Sertifikasi Sertifikasi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)**

- Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point yang selanjutnya disebut Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap Unit Pengolahan Ikan.
- Sertifikasi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) untuk produk perikanan adalah suatu sistem jaminan keamanan pangan yang dirancang untuk mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya yang dapat terjadi dalam proses produksi dan distribusi produk perikanan.
- Tujuan HACCP adalah untuk memastikan keamanan pangan produk perikanan dengan mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya yang dapat terjadi dalam proses produksi dan

distribusi.

Isu Utama

1. Sertifikasi HACCP bertujuan untuk memastikan keamanan pangan produk perikanan dengan mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya yang dapat terjadi dalam proses produksi dan distribusi.
2. Produk perikanan rentan terhadap kontaminasi bakteri seperti Salmonella, E. coli, dan Vibrio, yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia.
3. Penggunaan bahan tambahan yang tidak aman atau tidak tepat dapat membahayakan kesehatan konsumen.

Implikasi

1. Sertifikasi HACCP dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk perikanan yang dihasilkan oleh perusahaan.
 2. Sertifikasi HACCP dapat meningkatkan daya saing perusahaan perikanan di pasar domestik dan internasional.
 3. Sertifikasi HACCP dapat mengurangi risiko keamanan pangan dan kerugian ekonomi yang terkait dengan produk perikanan yang tidak aman.
 4. Sertifikasi HACCP dapat meningkatkan kesadaran akan keamanan pangan di kalangan perusahaan perikanan dan konsumen.
- Presentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.
 - Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
 - Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan,

Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

- Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:
 1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
 2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
 3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.
- Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.
- HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik pada hasil perikanan untuk konsumsi manusia. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu bahaya yang mungkin akan muncul di dalam proses pengolahan (in process inspection) dapat dilakukan sehingga tindakan pengendalian dan pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan.
- Sertifikat penerapan HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya. Sertifikasi penerapan HACCP mengacu kepada persyaratan dan tata cara penerbitan sertifikat penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ HACCP sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/PERMEN-KP/2018, Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011, dan Keputusan Kepala BKIPM Nomor 32 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis And Critical Control Point.
- Sertifikat HACCP yang diterbitkan berdasarkan jenis produk dan jenis proses serta potensi bahaya (hazard).

Permohonan sertifikat penerapan HACCP:

- 1) UPI mengajukan permohonan
- 2) Dilakukan audit kecukupan oleh Pusat SM
- 3) Inspeksi oleh inspektur mutu
- 4) UPI melakukan tindakan perbaikan
- 5) Evaluasi dan verifikasi tindakan perbaikan

6) Penerbitan sertifikat HACCP

Perpanjangan sertifikat penerapan HACCP:

- 1) Verifikasi dan survailen konsistensi penerapan HACCP di UPI
 - 2) Penerbitan sertifikat HACCP
- Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) adalah sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha terhadap setiap unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang telah menerapkan cara penanganan dan/atau pengolahan ikan yang baik dan memenuhi persyaratan prosedur operasi standar sanitasi. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan penanganan dan/atau pengolahan ikan di Unit Pengolahan Ikan (UPI). UPI yang dimaksud antara lain :
 1. Unit penanganan dan pengolahan ikan;
 2. Unit penanganan ikan hidup;
 3. Unit penanganan rumput laut kering;
 4. Gudang beku;
 5. Gudang dingin;
 6. Gudang kering, dan/atau
 7. Miniplant
 - Pelaku usaha baik perorangan ataupun non perorangan yang mengajukan sertifikasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission)/Sistem OSS dengan memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
 1. Sertifikat Pengolah Ikan (SPI) atau sertifikat keterampilan di bidang keamanan pangan yang setara untuk penanggung jawab mutu diterbitkan paling lama 5 tahun sebelum pengajuan permohonan SKP (dikecualikan bagi UPI skala mikro kecil).
 2. Panduan Mutu penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan Pemenuhan Persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi untuk setiap jenis ikan dan/atau jenis produk yang diolah (Bentuk & format sesuai Peraturan Menteri KP Nomor 17 Tahun 2019).
 3. Rekomendasi kelayakan pengolahan dari Pembina Mutu di daerah.

Isu Utama

1. Pada rancangan revisi Peraturan Pemerintah 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko lampiran I, KBLI perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan yang mengatur kewajiban SKP hanya terdapat 14 KBLI yang awalnya berjumlah 27 KBLI. Hal ini terjadi karena terdapat 13 KBLI berpindah perizinan berusaha sektor lainnya dibawah tanggung jawab Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dengan Kementerian tersebut perihal kewajiban Unit Pengolahan Ikan yang melakukan penanganan dan/atau pengolahan ikan.
2. Dalam rangka pelaksanaan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dilakukan melalui pembinaan dan pengendalian, pembinaan dan pengendalian tersebut dilakukan kepada pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Kondisi saat ini, DJPDSPKP tidak memberikan anggaran ke pemerintah daerah dalam rangka pembinaan, hal ini dapat berimplikasi terhadap capaian IKU sertifikasi SKP.
3. Pelaku usaha kesulitan melakukan permohonan sertifikasi melalui sistem OSS.
4. Verifikator SKP belum mempunyai pemahaman yang sama dalam melakukan verifikasi permohonan pelaku usaha di sistem OSS.
5. Petugas pemeriksa permohonan belum seluruhnya tepat waktu melakukan pemeriksaan setelah rekomendasi diupload pada SKP online

Implikasi

1. Peningkatan kepercayaan konsumen: SKP dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk pangan yang dihasilkan oleh fasilitas pengolahan.
2. Peningkatan daya saing: SKP dapat meningkatkan daya saing fasilitas pengolahan pangan di pasar domestik dan internasional.
3. Pengurangan risiko: SKP dapat mengurangi risiko keamanan pangan dan kerugian ekonomi yang terkait dengan produk pangan yang tidak aman.
4. Peningkatan kesadaran akan keamanan pangan: SKP dapat meningkatkan kesadaran akan keamanan pangan di kalangan fasilitas pengolahan pangan dan konsumen.

- Formula untuk menghitung capaian IK:

$$\%X = \frac{A+B}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.

A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk

B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (2)*)

- Pada triwulan II tahun 2025, realisasi Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT BPPMHKP terdapat 2 sertifikat HACCP ruang lingkup Dried Seaweed dan Seaweed Powder di PT Razindo Global Nusantara Kabupaten Lombok Barat NTB.
- Sedangkan realisasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) pada triwulan II tahun 2025 belum ada.
- Berikut penghitungan capaian indikator ini:

HACCP

Target Sertifikat HACCP = 2 sertifikat

Capaian Sertifikat HACCP = 2 sertifikat

Persentase Capaian (B) = $2/2 \times 100\% = 100\%$

Capaian Indikator:

$\%X = 100\%/1 \times 100\%$

= 100%

- Jadi, capaian indikator "Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan" triwulan II tahun 2025 sebesar

100% dari target 70% atau dengan capaian persentase kinerja sebesar 120%.

- Indikator ini merupakan indikator baru dari hasil revisi indikator kinerja di triwulan IV tahun 2024 sehingga capaian indikator ini pada triwulan II tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian triwulan II tahun sebelumnya.
- Untuk melaksanakan kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp.141,000,000 yang digunakan untuk :
 1. Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) Rp. 30,000,000
 2. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) Rp. 25,000,000
 3. Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) Rp. 25,000,000
 4. HACCP Dasar dan Sertifikasi Noreg Rp. 30,000,000
 5. Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik/Inpres 01 Rp. 25,000,000
 6. Rapat Koordinasi Quality Assurance Rp. 6.000.000
- Realisasi anggaran sampai dengan TW IV Tahun 2024 sebesar Rp.3.500.000 atau 2,48% dengan rincian sebagai berikut : Jumlah SDM yang terlibat pada kegiatan Inspeksi SKP TW II sebanyak 8 orang yang terdiri dari 8 Inspektur Mutu BPPMHKP Mataram.

No.	Uraian	Pagu(Rp)	Realisasi(Rp)	Sisa(Rp)
1	Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan (SPDI)	30,000,000	0	30,000,000
2	Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	25,000,000	0	25,000,000
3	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)	25,000,000	3,500,000	25,000,000
4	HACCP Dasar dan Sertifikasi Noreg	30,000,000	0	30,000,000
5	Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik/Inpres 01	25,000,000	0	25,000,000
6	Rapat Koordinasi Quality Assurance	6.000.000	0	6.000.000
JUMLAH		141,000,000	3,500,000	137.500.000

Akar Masalah

1. Belum adanya pelatihan HACCP kepada personil baru yang dimiliki BPPMHKP Mataram.
2. Keterbatasan anggaran karena adanya efisiensi anggaran dari pemerintah sehingga kegiatan validasi produk pada sektor produksi pasca panen (inspeksi/verifikasi/surveilans) tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator

- Pelaksanaan Inspeksi Sertifikasi HACCP di PT Razindo Global Nusantara Kabupaten Lombok Barat NTB dengan 2 ruang lingkup sertifikasi yaitu ruang lingkup Dried Seaweed dan Seaweed Powder

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
- Peningkatan kompetensi Inspektur Mutu dengan Pelatihan HACCP personil. - Inspeksi/surveillance HACCP secara daring.	Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
Telah dilakukan Koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi NTB terkait pelaksanaan sertifikasi Pasca Panen (SKP, HACCP dan SPDI) pada tanggal 19 Juni 2025.	Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Daftar Sertifikat HACCP di Triwulan II Tahun 2025

No	Nama	NPWP	NIB	Alamat	Provinsi	UPT	Tgl Tahap Inspeksi	Tgl Tahap Perbaikan	Produk	Tahapan Proses	Status Produk	Grade	No.Sertifikat	Tgl.Terbit	BerlakuSampai	Lama Terbit	Status Sertifikat
1	RAZINDO GLOBAL NUSANTARA, PT	65.638.660.4-914.000	0206220065426	Jl. Raya Paninjauan, Kel. Peresak, Kec. Narmada, Kabupaten Lombok Barat, West Nusa Tenggara - Indonesia	Nusa Tenggara Barat	Balai KIPM Mataram	Inspeksi: 16 MEI 2025; Laporan IM: 16 MEI 2025; Penugasan Timtek: 16 MEI 2025; Rekomendasi Timtek: 20 MEI 2025;	Bis Perbaikan: 16 JUN 2025; Perbaikan: 23 MEI 2025;	Dried Seaweed	Receiving, Handling, Packing/Lab eling, Storing, Stuffing	Baru	B	153/PM/HACCP /PK/05/25	20 MEI 2025	20 MEI 2027	3 hari	BERLAKU
									Seaweed Powder	Receiving, Processing, Packing/Lab eling, Storing, Stuffing	Baru	B	154/PM/HACCP /PK/05/25	20 MEI 2025	20 MEI 2027	3 hari	BERLAKU



Plt. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram

M. Farchan

Mataram, 7 Juli 2025
Penanggungjawab Indikator Kinerja

Ni Luh Anggra Lasmika

KEGIATAN KOORDINASI KE DINAS KP PROPINSI NTB



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

KKP
2025

panganbiru 08

**Koordinasi Badan Mutu KKP Mataram dengan
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kamis, 19 Juni 2025**



**Koordinasi Badan Mutu KKP Mataram dengan Kepala Bidang
Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB terkait
sertifikasi CBIB, CPIB dan SKP.**



BPPMHKP Mataram



INSPEKSI SERTIFIKAT HACCP



IKS.2 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)

$$\%X = \frac{A+B}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan (%)

A = Persentase Penerbitan Sertifikat HACCP ruang lingkup produk

B = Persentase SKP yang diterbitkan di UPI skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (2)

Capaian Triwulan II 2025

SKP

Selama triwulan II 2025 tidak ada capaian SKP

HACCP

Target Sertifikat HACCP = 2 sertifikat

Capaian Sertifikat HACCP = 2 sertifikat

Persentase Capaian (**B**) = $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$

$$\begin{aligned}\%X &= \frac{A+B}{xn} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{1} \times 100\% \\ &= 100\% \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Mataram, 7 Juli 2025

Plt. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram,

M. Farchan

Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan,

Ni Luh Anggra Lasmika



REKAPITULASI SERTIFIKASI HACCP BALAI KIPM MATARAM 2025

TRIWULAN II

No	Nama	NPWP	NIB	Alamat	Provinsi	UPT	Tgl Tahap Inspeksi	Tgl Tahap Perbaikan	Produk	Tahapan Proses	Status Produk	Grade	No.Sertifikat	Tgl.Terbit	BerlakuSampai	Lama Terbit	Status Sertifikat
1	RAZINDO GLOBAL NUSANTARA, PT	65.638.660.4-914.000	0206220065426	Jl. Raya Paninjauan, Kel. Peresak, Kec. Narmada, Kabupaten Lombok Barat, West Nusa Tenggara - Indonesia	Nusa Tenggara Barat	Balai KIPM Mataram	Inspeksi: 16 MEI 2025; Laporan IM: 16 MEI 2025; Penugasan Timtek: 16 MEI 2025; Rekomendasi Timtek: 20 MEI 2025;	Bts Perbaikan: 16 JUN 2025; Perbaikan: 23 MEI 2025;	Dried Seaweed	Receiving, Handling, Packing/Lab eling, Storing, Stuffing	Baru	B	153/PM/HACCP /PK/05/25	20 MEI 2025	20 MEI 2027	3 hari	BERLAKU
									Seaweed Powder	Receiving, Processing, Packing/Lab eling, Storing, Stuffing	Baru	B	154/PM/HACCP /PK/05/25	20 MEI 2025	20 MEI 2027	3 hari	BERLAKU



Plt. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram,

M. Farchan

Mataram, 7 Juli 2025

Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan,

Ni Luh Anggra Lasmika

REKAPITULASI SERTIFIKASI KELAYAKAN PENGOLAHAN (SKP) BALAI KIPM MATARAM 2025
TRIWULAN II

NO.	TANGGAL PERMOHONAN	NAMA PERUSAHAAN	NIB	KOMODITAS	TANGGAL DAN NOMOR SERTIFIKAT
		N I H I L			

Mataram, 7 Juli 2025



Plt. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram,

M. Farchan

Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan,

Ni Luh Anggra Lasmika

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI KIPM MATARAM
TAHUN 2025**

Nama Indikator	:	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Mataram
Nama Timja	:	Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Periode Laporan	:	Triwulan II

Nama Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Mataram

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%		99%
Realisasi	100%	100%	100%						
%Capaian	101,01%	101,01%	101,01%						

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4``

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi
• Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor). • Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional. • Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Kemanan Hasil Kelautan dan Perikanan. • Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara Investigasi Kasus Penahanan/Penolakan Produk Perikanan; a. Evaluasi UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan b. Registrasi UPI Ke Negara Mitra dan atau Negara Tujuan Ekspor

c. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001

- Pada Triwulan II tahun 2025 BPPMHKP Mataram hanya melakukan Evaluasi UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan terhadap 3 Unit Pengolahan Ikan (UPI)
- Evaluasi UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dilakukan pada Unit Pengolahan Ikan, UD. Dahlia, PT. Blue Ocean Lobster dan PT. Live Shell Indonesia, yang menghasilkan 3 Surat Keterangan Hasil Surveilans (SKHS).

- Formulasi Perhitungan:

$$x \frac{A - B}{A} \times 100\%$$

x = Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)

A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP

B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan

(Notifikasi Penolakan kasus/penolakan HC mutu dilampirkan)

- Hasil Output:

A = Jumlah HC yang diterbitkan selama periode Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 56 HC

B = 0 (Tidak ada HC yang ditolak)

$$X = \frac{A-B}{A} \times 100\%$$

$$= \frac{56-0}{56} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

- Dari perhitungan capaian indikator ini pada triwulan II tahun 2025 sebesar 100% dari target 99% atau setara dengan 101,01%.
- Indikator ini mulai ada di triwulan IV tahun 2024 yang merupakan hasil revisi dokumen kinerja pada triwulan IV tahun 2024 sehingga capaian indikator pada triwulan II tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun sebelumnya.
- Untuk melaksanakan kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp.53.000.000 yang digunakan untuk :
 - 1) Investigasi Kasus Penahanan/Penolakan Produk Perikanan Rp.5.000.000
 - 2) Evaluasi UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Rp.15.000.000
 - 3) Registrasi UPI Ke Negara Mitra dan atau Negara Tujuan Ekspor Rp.8.000.000
 - 4) Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 Rp.25.000.000
- Realisasi anggaran sampai dengan TW II Tahun 2025 sebesar Rp.0 atau 0% dengan rincian sebagai berikut: Jumlah SDM yang terlibat pada TW II sebanyak 8 orang yang terdiri dari 8 Inspektur Mutu BPPMHKP Mataram.

No.	Uraian	Pagu(Rp)	Realisasi(Rp)	Sisa(Rp)
1	Investigasi Kasus Penahanan/Penolakan Produk Perikanan	5.000.000	0	5.000.000
2	Evaluasi UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	15.000.000	0	15.000.000
3	Registrasi UPI Ke Negara Mitra dan atau Negara Tujuan Ekspor	8,000,000	0	8,000,000
4	Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001	25,000,000	0	25,000,000
JUMLAH		53.000.000	0	53.000.000

Akar Masalah

Adanya pengguna layanan yang melakukan permohonan sertifikasi dengan jumlah volume pengiriman yang belum sesuai karena menunggu ikan terkumpul sebelum di ekspor sehingga waktu pelayanan menjadi lama dan sering mengalami perubahan volume

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator

Pelayanan sertifikasi dan konsultasi pengguna jasa.



Forum Konsultasi Publik Pelayanan Sertifikasi bagi Pengguna Jasa BPPMHKP Mataram



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

KKP
2025

pangan biru
08

Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik 2025 BPPMHKP Mataram NTB dan Sosialisasi Si Chupang New Jumat, 16 Mei 2025



MHKP     **BPPMHKP Mataram**

KMPAK
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



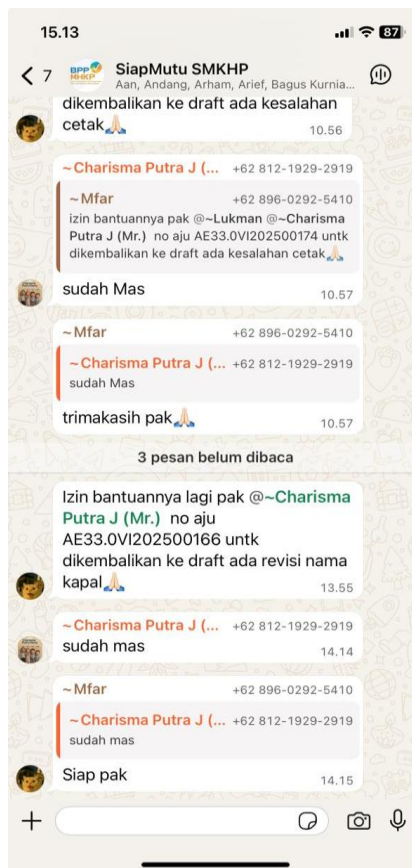
BerAKHLAK
BERAKHLAK MELAYANI MELAYANI MELAYANI

bangga
melayani
bangsa

Personil Pelayanan mengikuti Peningkatan Kompetensi Personil melalui Sosialisasi Penerapan HACCP di Supplier



konfirmasi permasalahan melalui WA group Aplikasi SiapMutu



Evaluasi UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan





Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
Memberikan pelayanan sertifikasi SiapMutu menggunakan Aplikasi Si Chupang New secara maksimal	Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
- Dilakukan Forum Konsultasi Publik lingkup BPPMHKP Mataram kepada pengguna jasa terkait pelayanan sertifikasi pada tanggal 16 Mei 2025. - Mengikuti Sosialisasi Penerapan HACCP di Supplier yang diselenggarakan oleh Pusat Mutu Pascapanen secara daring. - Secara bertahap telah dilakukan penyempurnaan aplikasi SiapMutu dan penyelesaian permasalahan melalui WA group Aplikasi SiapMutu oleh tim pengembang pusat.	Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan



Pt. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram

M. Farchan

Mataram, 7 Juli 2025
Penanggungjawab Indikator Kinerja

Ni Luh Anggra Lasmika

IKS.3 Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor (%)

$$\%X = \frac{A-B}{A} \times 100\%$$

%X = Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor (%)

A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP Mataram pada triwulan II 2025 = 56 HC Mutu

B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan = 0 (tidak ada yang ditolak)

$$\%X = \frac{A-B}{A} \times 100\%$$

$$= \frac{56-0}{56} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Plt. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram,



M. Farchan

Mataram, 7 Juli 2025

Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Ikan,



Ni Luh Anggra Lasmika

REKAPITULASI SERTIFIKAT EKSPOR BALAI KIPM MATARAM 2025
TRIWULAN II TAHUN 2025

NO.	NO. AJU	TANGGAL AJU	TANGGAL EKSPOR	PENGIRIM	PENERIMA	NEGARA TUJUAN	NOMOR SERTIFIKAT
1	AE07.0IV202500036	7-Apr-25	9-Apr-25	PT. Live Shell Indonesia	Delisari Food	Singapore	H 002261
2	AE07.0IV202500040	12-Apr-25	14-Apr-25	PT. Blue Ocean Lobster	TONGXIANG	Taiwan	G 250000185
3	AE07.0IV202500039	12-Apr-25	14-Apr-25	PT. Blue Ocean Lobster	Shanghai Haoji	China	B 250000562
4	AE07.0IV202500038	12-Apr-25	17-Apr-25	PT. High Point Fisheries	Los Angeles International Seafood	United States of America	F 250000567
5	AE07.0IV202500042	14-Apr-25	15-Apr-25	PT. Blue Ocean Lobster	Shanghai Haoji	China	B 250000563
6	AE07.0IV202500041	14-Apr-25	15-Apr-25	PT. High Point Fisheries	International Seafood Broker	United States of America	F 250000568
7	AE07.0IV202500043	16-Apr-25	16-Apr-25	PT. Live Shell Indonesia	Delisari Food	Singapore	H 002262
8	AE07.0IV202500045	22-Apr-25	22-Apr-25	PT. High Point Fisheries	International Seafood Broker	United States of America	F 250000570
9	AE07.0IV202500046	22-Apr-25	23-Apr-25	PT. Live Shell Indonesia	Delisari Food	Singapore	H 002263
10	AE07.0IV202500047	25-Apr-25	26-Apr-25	PT. High Point Fisheries	International Seafood Broker	United States of America	F 250000571
11	AE07.0IV202500048	26-Apr-25	26-Apr-25	PT. High Point Fisheries	International Seafood Broker	United States of America	F 250000572
12	AE07.0V202500050	2-May-25	5-May-25	PT. Blue Ocean Lobster	TONGXIANG	Taiwan	G 250000184
13	AE07.0IV202500049	29-Apr-25	6-May-25	PT. Live Shell Indonesia	Delisari Food	Singapore	H 002264
14	AE07.0V202500051	6-May-25	21-May-25	PT. High Point Fisheries	High Point Fisheries	United States of America	F 250000573
15	AE07.0V202500053	12-May-25	13-May-25	PT. Live Shell Indonesia	Delisari Food	Singapore	H 002265
16	AE07.0V202500054	18-May-25	21-May-25	PT. Blue Ocean Lobster	Kenneth Ciu	Australia	H 002266
17	AE07.0V202500055	19-May-25	21-May-25	PT. Blue Ocean Lobster	Kenneth Ciu	Australia	H 002267
18	AE07.0V202500057	19-May-25	24-May-25	PT. High Point Fisheries	Mark Food	United States of America	F 250000574
19	AE07.0V202500056	19-May-25	20-May-25	PT. Live Shell Indonesia	Delisari Food	Singapore	H 002268
20	AE07.0V202500059	20-May-25	24-May-25	PT. High Point Fisheries	High Point Fisheries	United States of America	F 250000575
21	AE07.0V202500060	21-May-25	24-May-25	PT. High Point Fisheries	Wilshire	United States of America	F 250000576
22	AE07.0V202500061	24-May-25	29-May-25	PT. High Point Fisheries	Hilo Fish Company	United States of America	F 250000577
23	AE07.0V202500062	25-May-25	29-May-25	PT. High Point Fisheries	Great Bomi	Philippines	H 002270
24	AE07.0V202500063	25-May-25	27-May-25	PT. Blue Ocean Lobster	TONGXIANG	Taiwan	G 250000186
25	AE07.0V202500064	26-May-25	27-May-25	PT. Live Shell Indonesia	Delisari Food	Singapore	H 002271
26	AE07.0V202500066	27-May-25	1-Jun-25	PT. Blue Ocean Lobster	TONGXIANG	Taiwan	G 250000187
27	AE07.0V202500065	27-May-25	28-May-25	UD. Dahlia Group	Great Ocean	Malaysia	H 002272
28	AE07.0V202500071	27-May-25	28-May-25	UD. Dahlia Group	Yan Chia	Taiwan	G 250000188
29	AE07.0V202500072	31-May-25	3-Jun-25	PT. Blue Ocean Lobster	TONGXIANG	Taiwan	G 250000189
30	AE07.0V202500073	31-May-25	3-Jun-25	PT. Blue Ocean Lobster	Shanghai Haoji	China	B 250000564
31	AE07.0VI202500074	01-Jun-25	1-Jun-25	UD. Dahlia Group	Yan Chia	Taiwan	G 250000713
32	AE07.0VI202500075	01-Jun-25	1-Jun-25	UD. Dahlia Group	Yan Chia	Taiwan	G 250000190
33	AE07.0VI202500077	02-Jun-25	3-Jun-25	UD. Dahlia Group	Yan Chia	Taiwan	G 250000712
34	AE07.0VI202500076	02-Jun-25	3-Jun-25	PT. Live Shell Indonesia	Delisari Food	Singapore	H 002273
35	AE07.0VI202500080	05-Jun-25	5-Jun-25	UD. Dahlia Group	Yan Chia	Taiwan	G 250000714
36	AE07.0VI202500082	10-Jun-25	10-Jun-25	UD. Dahlia Group	Yan Chia	Taiwan	G 250000715
37	AE07.0VI202500081	09-Jun-25	10-Jun-25	PT. Live Shell Indonesia	Delisari Food	Singapore	H 002274
38	AE07.0VI202500083	10-Jun-25	15-Jun-25	PT. High Point Fisheries	High Point Fisheries	United States of America	F 250000578
39	AE07.0VI202500085	13-Jun-25	13-Jun-25	UD. Dahlia Group	Yan Chia	Taiwan	G 250000716
40	AE07.0VI202500087	16-Jun-25	16-Jun-25	UD. Dahlia Group	Sea Jade Trade	Taiwan	G 250000717
41	AE07.0VI202500086	15-Jun-25	19-Jun-25	PT. High Point Fisheries	High Point Fisheries	United States of America	F 250000579
42	AE07.0VI202500088	16-Jun-25	17-Jun-25	PT. Live Shell Indonesia	Delisari Food	Singapore	H 002275
43	AE07.0VI202500089	18-Jun-25	18-Jun-25	UD. Dahlia Group	Sea Jade Trade	Taiwan	G 250000718
44	AE07.0VI202500091	20-Jun-25	20-Jun-25	UD. Dahlia Group	Sea Jade Trade	Taiwan	G 250000719
45	AE07.0VI202500093	21-Jun-25	24-Jun-25	PT. Blue Ocean Lobster	Cheung Kong	Hong Kong	H 002276

46	AE07.0VI202500094	22-Jun-25	22-Jun-25	UD. Dahlia Group	Sea Jade Trade	Taiwan	G 250000720
47	AE07.0VI202500096	23-Jun-25	23-Jun-25	UD. Dahlia Group	Sea Jade Trade	Taiwan	G 250000721
48	AE07.0VI202500084	11-Jun-25	25-Jun-25	CV. Anugerah Sakhied	Hong Wun	Singapore	H 002277
49	AE07.0VI202500095	23-Jun-25	25-Jun-25	PT. Live Shell Indonesia	Delisari Food	Singapore	H 002278
50	AE07.0VI202500099	25-Jun-25	25-Jun-25	UD. Dahlia Group	Great Ocean	Malaysia	H 002279
51	AE07.0VI202500097	24-Jun-25	28-Jun-25	PT. High Point Fisheries	High Point Fisheries	United States of America	F 250000580
52	AE07.0VI202500100	25-Jun-25	27-Jun-25	PT. Live Shell Indonesia	Delifresh	Singapore	H 002280
53	AE07.0VI202500101	26-Jun-25	2-Jul-25	PT. High Point Fisheries	High Point Fisheries	United States of America	F 250000581
54	AE07.0VI202500102	27-Jun-25	27-Jun-25	UD. Dahlia Group	Sea Jade Trade	Taiwan	G 250000722
55	AE07.0VI202500103	28-Jun-25	30-Jun-25	CV. Anugerah Sakhied	Hong Wun	Singapore	H 002281
56	AE07.0VI202500105	30-Jun-25	30-Jun-25	UD. Dahlia Group	Sea Jade Trade	Taiwan	G 250000723



Mt. Kepala Balai Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil

M. Farchan

Mataram, 7 Juli 2025

Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu,
dan Keamanan Hasil Perikanan,

Ni Luh Anggra Lasmika



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JUNI

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	038	032	567758	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATARAM	Nilai	100.00	92.47	99.29	0.00	0.00	100.00	100.00	78.73	80%	0.00	98.41
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.87	19.86	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.24		99.65				100.00				

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 1725/SJ.2/RC.610/VII/2025

Yth. : 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal
3. Para Sekretaris Badan
4. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa
5. Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Biro Keuangan dan BMN

Hal : Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester I Tahun 2025

Tanggal : 09 Juli 2025

Menindaklanjuti Memorandum Kepala Biro Perencanaan Nomor 2150/SJ.1/RC.610/VII/2025 tanggal 8 Juli 2025 hal Capaian Indikator Kinerja Mandatory Triwulan II Tahun 2025, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penarikan data capaian IKU IKPA KKP Semester I tahun 2025 berdasarkan aplikasi OMSPAN yang dilakukan pada tanggal 9 Juli 2025 pukul 10.00 WIB (sesuai Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Nomor 1444/SJ.2/TU.210/VI/2025 Tanggal 2 Juni 2025 hal Penetapan Target Indikator Kinerja Indikator Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025).
2. Capaian IKU IKPA KKP Semester I tahun 2025 sebesar 95,16 dari target nilai 84,00
3. Terlampir kami sampaikan data capaian IKU IKPA level 0 (KKP), level 1 (Unit Eselon I) dan level 2 (Satker). Data tersebut dapat digunakan sebagai penetapan capaian nilai IKU IKPA Semester I tahun 2025 pada Unit Eselon I dan Satker lingkup KKP.

Mengingat pentingnya Nota Dinas ini, kami mohon bantuan Saudara untuk dapat menyampaikan Nota Dinas capaian IKPA ini kepada seluruh Satker lingkup unit kerja masing-masing.

Dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Biro Keuangan dan BMN berkomitmen menjaga profesionalitas dan memberi pelayanan secara **Smart, Akuntabel, Integritas, Loyalitas, dan Sinergi (SAILS)**.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sutrisno Subagyo

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal
2. Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Tugas Pengawasan Pengendalian Kebijakan Program Prioritas KKP
3. Para Inspektur lingkup Inspektorat Jenderal



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JUNI

No	Kode KL	Nama KL	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	85.04	87.71	100.00	100.00	98.62	100.00	95.16	100%	0.00	95.16
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	12.76	17.54	10.00	10.00	9.86	25.00				
			Nilai Aspek	92.52		96.58				100.00				



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JUNI

No	Kode ES1	Nama ES1	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	03202	INSPEKTORAT JENDERAL	Nilai	100.00	93.73	98.04	100.00	100.00	100.00	100.00	98.67	100%	0.00	98.67
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	14.06	19.61	10.00	10.00	10.00	25.00				
			Nilai Aspek	96.87		99.51				100.00				
2	03212	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	92.28	98.44	100.00	100.00	98.08	100.00	98.34	100%	0.00	98.34
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	13.84	19.69	10.00	10.00	9.81	25.00				
			Nilai Aspek	96.14		99.13				100.00				
3	03206	DITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	91.87	95.93	100.00	100.00	100.00	100.00	97.97	100%	0.00	97.97
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	13.78	19.19	10.00	10.00	10.00	25.00				
			Nilai Aspek	95.94		98.98				100.00				
4	03205	DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	89.52	97.06	100.00	100.00	97.48	100.00	97.59	100%	0.00	97.59
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	13.43	19.41	10.00	10.00	9.75	25.00				
			Nilai Aspek	94.76		98.64				100.00				
5	03213	BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	83.58	99.76	100.00	100.00	97.71	100.00	97.26	100%	0.00	97.26
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	12.54	19.95	10.00	10.00	9.77	25.00				
			Nilai Aspek	91.79		99.37				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

6	03201	SEKRETARIAT JENDERAL	Nilai	100.00	81.30	100.00	100.00	100.00	100.00	97.20	100%	0.00	97.20	
			Bobot	10	15	20	10	10	10					25
			Nilai Akhir	10.00	12.20	20.00	10.00	10.00	10.00					25.00
			Nilai Aspek	90.65			100.00							100.00
7	03204	DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai	100.00	83.71	97.99	100.00	100.00	99.52	100.00	97.11	100%	0.00	97.11
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	12.56	19.60	10.00	10.00	9.95	25.00				
			Nilai Aspek	91.86			99.38			100.00				
8	03203	DITJEN PERIKANAN TANGKAP	Nilai	100.00	80.29	70.13	100.00	100.00	98.09	100.00	90.88	100%	0.00	90.88
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	12.04	14.03	10.00	10.00	9.81	25.00				
			Nilai Aspek	90.15			92.06			100.00				
9	03207	DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	Nilai	100.00	77.24	70.73	100.00	100.00	99.88	100.00	90.72	100%	0.00	90.72
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	11.59	14.15	10.00	10.00	9.99	25.00				
			Nilai Aspek	88.62			92.65			100.00				



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JUNI

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	008	032	099325	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	70.00	70%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
2	024	032	649732	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN CIREBON	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	80%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
3	123	032	238741	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
4	072	032	239171	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

5	129	032	239192	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	50.00	50%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	0	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
6	094	032	239235	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
7	093	032	239991	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
8	039	032	249169	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	80%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
9	014	032	403823	BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
10	023	032	403830	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	80%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

11	021	032	403832	BALAI RISET PEMULIAAN IKAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	80%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
12	034	032	427670	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
13	154	032	445394	BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
14	008	032	477456	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
15	106	032	560401	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
16	035	032	567350	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	98.29	100.00	50.00	50%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	0	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

17	042	032	567538	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PONTIANAK	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	80%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
18	020	032	567800	BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
19	012	032	109131	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	70.00	70%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
20	030	032	403834	LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	99.93	100.00	79.99	80%	0.00	99.99
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	9.99	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.97				100.00				
21	132	032	403827	BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	99.68	100.00	79.97	80%	0.00	99.96
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	9.97	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.84				100.00				
22	017	032	652009	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG LAMPUNG	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.47	100.00	99.95	100%	0.00	99.95
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.95	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.87				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

23	123	032	427655	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.14	100.00	99.91	100%	0.00	99.91
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.91	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.78				100.00				
24	175	032	403835	BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.03	100.00	99.90	100%	0.00	99.90
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.90	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.76				100.00				
25	012	032	649636	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAMBI	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.80	100.00	99.88	100%	0.00	99.88
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.88	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.70				100.00				
26	136	032	403828	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.53	100.00	99.85	100%	0.00	99.85
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.85	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.63				100.00				
27	165	032	427542	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA I	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	98.77	100.00	79.88	80%	0.00	99.85
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	9.88	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.39				100.00				
28	061	032	238755	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.39	100.00	99.84	100%	0.00	99.84
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.84	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.60				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

29	061	032	622461	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.31	100.00	99.83	100%	0.00	99.83
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.83	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.58				100.00				
30	039	032	649551	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KUPANG	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	98.26	100.00	79.83	80%	0.00	99.78
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	9.83	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.13				100.00				
31	100	032	238762	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	97.81	100.00	89.78	90%	0.00	99.76
					Bobot	10	15	20	10	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	0.00	9.78	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.27				100.00				
32	050	032	649678	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN GORONTALO	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	97.65	100.00	79.77	80%	0.00	99.71
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	9.77	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.83				100.00				
33	062	032	649767	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TERNATE	Nilai	100.00	100.00	99.49	0.00	0.00	98.59	100.00	79.76	80%	0.00	99.70
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.90	0.00	0.00	9.86	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.04				100.00				
34	134	032	239150	BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN	Nilai	100.00	100.00	98.53	100.00	0.00	100.00	100.00	89.71	90%	0.00	99.67
					Bobot	10	15	20	10	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.71	10.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.51				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

35	134	032	649661	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEMARANG	Nilai	100.00	100.00	99.39	100.00	100.00	96.85	100.00	99.56	100%	0.00	99.56
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.88	10.00	10.00	9.68	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.06				100.00				
36	050	032	310719	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	94.78	100.00	99.48	100%	0.00	99.48
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.48	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.70				100.00				
37	175	032	403822	BALAI RISET PERIKANAN LAUT	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	94.10	100.00	99.41	100%	0.00	99.41
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.41	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.52				100.00				
38	175	032	427686	BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BBP3KP)	Nilai	100.00	100.00	97.31	0.00	0.00	100.00	100.00	79.46	80%	0.00	99.33
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.46	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.66				100.00				
39	015	032	239214	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	92.33	100.00	99.23	100%	0.00	99.23
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.23	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.08				100.00				
40	175	032	622098	INSPEKTORAT JENDERAL	Nilai	100.00	93.73	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.06	100%	0.00	99.06
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.06	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.87		100.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

41	137	032	567474	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM	Nilai	100.00	93.23	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.98	100%	0.00	98.98
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.98	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.62		100.00				100.00				
42	175	032	403836	BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	89.78	100.00	98.98	100%	0.00	98.98
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	8.98	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		97.44				100.00				
43	136	032	567680	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR	Nilai	100.00	94.80	100.00	0.00	0.00	99.48	100.00	79.17	80%	0.00	98.96
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.22	20.00	0.00	0.00	9.95	25.00				
					Nilai Aspek	97.40		99.74				100.00				
44	020	032	290145	LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG	Nilai	100.00	92.60	100.00	100.00	100.00	99.85	100.00	98.88	100%	0.00	98.88
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.89	20.00	10.00	10.00	9.99	25.00				
					Nilai Aspek	96.30		99.96				100.00				
45	037	032	427624	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN DENPASAR	Nilai	100.00	92.81	100.00	100.00	100.00	99.47	100.00	98.87	100%	0.00	98.87
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.92	20.00	10.00	10.00	9.95	25.00				
					Nilai Aspek	96.41		99.87				100.00				
46	180	032	403833	LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	90.62	100.00	79.06	80%	0.00	98.83
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	9.06	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		95.31				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

47	020	032	649688	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAK	Nilai	100.00	94.07	100.00	0.00	0.00	99.31	100.00	79.04	80%	0.00	98.80
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.11	20.00	0.00	0.00	9.93	25.00				
					Nilai Aspek	97.04		99.66				100.00				
48	017	032	649615	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG	Nilai	100.00	93.38	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	79.01	80%	0.00	98.76
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.01	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.69		100.00				100.00				
49	025	032	403879	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN (POLTEK KP PANGANDARAN)	Nilai	100.00	91.10	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.67	100%	0.00	98.67
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.67	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	95.55		100.00				100.00				
50	001	032	649589	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ACEH	Nilai	100.00	92.80	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	78.92	80%	0.00	98.65
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.92	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.40		100.00				100.00				
51	021	032	653526	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDI	Nilai	100.00	90.91	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.64	100%	0.00	98.64
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.64	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	95.46		100.00				100.00				
52	062	032	427661	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	Nilai	100.00	90.38	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.56	100%	0.00	98.56
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.56	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	95.19		100.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

53	179	032	440822	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG	Nilai	100.00	90.74	99.74	100.00	100.00	99.60	100.00	98.52	100%	0.00	98.52
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.61	19.95	10.00	10.00	9.96	25.00				
					Nilai Aspek	95.37		99.84				100.00				
54	130	032	031665	STASIUN PSDKP CILACAP	Nilai	100.00	94.60	98.59	100.00	100.00	95.99	100.00	98.51	100%	0.00	98.51
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.19	19.72	10.00	10.00	9.60	25.00				
					Nilai Aspek	97.30		98.64				100.00				
55	048	032	649572	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN	Nilai	100.00	90.96	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	88.64	90%	0.00	98.49
					Bobot	10	15	20	0	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.64	20.00	0.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	95.48		100.00				100.00				
56	086	032	445393	BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPB) KARAWANG	Nilai	100.00	92.85	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	68.93	70%	0.00	98.47
					Bobot	10	15	0	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.93	0.00	10.00	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.43		100.00				100.00				
57	045	032	649593	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIN	Nilai	100.00	89.76	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.46	100%	0.00	98.46
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.46	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.88		100.00				100.00				
58	165	032	622035	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	Nilai	100.00	92.70	97.84	100.00	100.00	0.00	100.00	68.91	70%	0.00	98.44
					Bobot	10	15	0	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.91	0.00	10.00	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.35		100.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

59	038	032	567758	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATARAM	Nilai	100.00	92.47	99.29	0.00	0.00	100.00	100.00	78.73	80%	0.00	98.41
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.87	19.86	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.24		99.65				100.00				
60	120	032	403875	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI (POLTEK KP DUMAI)	Nilai	100.00	92.20	99.37	0.00	0.00	99.51	100.00	78.65	80%	0.00	98.32
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.83	19.87	0.00	0.00	9.95	25.00				
					Nilai Aspek	96.10		99.44				100.00				
61	179	032	238010	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	Nilai	100.00	92.55	98.54	100.00	100.00	97.21	100.00	98.31	100%	0.00	98.31
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.88	19.71	10.00	10.00	9.72	25.00				
					Nilai Aspek	96.28		98.94				100.00				
62	103	032	403820	LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN	Nilai	100.00	91.39	98.97	100.00	0.00	99.66	100.00	88.47	90%	0.00	98.30
					Bobot	10	15	20	10	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.71	19.79	10.00	0.00	9.97	25.00				
					Nilai Aspek	95.70		99.54				100.00				
63	021	032	403824	BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN	Nilai	100.00	88.96	100.00	100.00	100.00	99.44	100.00	98.29	100%	0.00	98.29
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.34	20.00	10.00	10.00	9.94	25.00				
					Nilai Aspek	94.48		99.86				100.00				
64	037	032	225135	PANGKALAN PSDKP BENOA	Nilai	100.00	88.53	99.81	100.00	100.00	100.00	100.00	98.24	100%	0.00	98.24
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.28	19.96	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.27		99.95				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

65	048	032	355105	STASIUN PSDKP TARAKAN	Nilai	100.00	88.38	99.90	100.00	100.00	100.00	100.00	98.24	100%	0.00	98.24
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.26	19.98	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.19		99.98				100.00				
66	175	032	440816	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP JAKARTA	Nilai	100.00	87.45	99.90	100.00	100.00	99.97	100.00	98.09	100%	0.00	98.09
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.12	19.98	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	93.73		99.97				100.00				
67	010	032	499346	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	Nilai	100.00	89.10	100.00	100.00	100.00	97.18	100.00	98.08	100%	0.00	98.08
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.37	20.00	10.00	10.00	9.72	25.00				
					Nilai Aspek	94.55		99.30				100.00				
68	010	032	531488	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	Nilai	100.00	94.01	100.00	100.00	100.00	89.41	100.00	98.04	100%	0.00	98.04
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.10	20.00	10.00	10.00	8.94	25.00				
					Nilai Aspek	97.01		97.35				100.00				
69	137	032	427649	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BATAM	Nilai	100.00	89.84	99.52	0.00	0.00	100.00	100.00	78.38	80%	0.00	97.98
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.48	19.90	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.92		99.76				100.00				
70	128	032	560393	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN RATU	Nilai	100.00	86.53	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.98	100%	0.00	97.98
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.98	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	93.27		100.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

71	010	032	403817	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR	Nilai	100.00	88.60	98.13	100.00	100.00	100.00	100.00	97.92	100%	0.00	97.92
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.29	19.63	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.30		99.53				100.00				
72	175	032	622131	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	89.55	97.31	100.00	100.00	100.00	100.00	97.89	100%	0.00	97.89
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.43	19.46	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.78		99.33				100.00				
73	084	032	440853	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL	Nilai	100.00	93.30	100.00	100.00	100.00	88.81	100.00	97.88	100%	0.00	97.88
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.00	20.00	10.00	10.00	8.88	25.00				
					Nilai Aspek	96.65		97.20				100.00				
74	001	032	567385	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE	Nilai	100.00	88.71	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	78.31	80%	0.00	97.88
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.31	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.36		100.00				100.00				
75	055	032	403839	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE	Nilai	100.00	88.75	100.00	0.00	0.00	99.81	100.00	78.29	80%	0.00	97.87
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.31	20.00	0.00	0.00	9.98	25.00				
					Nilai Aspek	94.38		99.91				100.00				
76	118	032	237373	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL	Nilai	100.00	85.61	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.84	100%	0.00	97.84
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.84	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	92.81		100.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

77	042	032	477425	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	Nilai	100.00	85.33	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.80	100%	0.00	97.80
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.80	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	92.67		100.00				100.00				
78	023	032	403829	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	Nilai	100.00	85.29	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.79	100%	0.00	97.79
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.79	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	92.65		100.00				100.00				
79	179	032	538911	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	Nilai	100.00	89.56	98.85	100.00	100.00	95.88	100.00	97.79	100%	0.00	97.79
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.43	19.77	10.00	10.00	9.59	25.00				
					Nilai Aspek	94.78		98.68				100.00				
80	175	032	662897	BALAI UJI STANDAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN	Nilai	100.00	87.90	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	78.19	80%	0.00	97.73
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.19	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	93.95		100.00				100.00				
81	061	032	215141	STASIUN PSDKP AMBON	Nilai	100.00	86.99	98.20	100.00	100.00	100.00	100.00	97.69	100%	0.00	97.69
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.05	19.64	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	93.50		99.55				100.00				
82	030	032	649725	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YOGYAKARTA	Nilai	100.00	93.11	100.00	0.00	0.00	91.05	100.00	78.07	80%	0.00	97.59
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.97	20.00	0.00	0.00	9.10	25.00				
					Nilai Aspek	96.56		95.52				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

83	037	032	403826	LOKA RISET PERIKANAN TUNA	Nilai	100.00	100.00	90.86	0.00	0.00	98.68	100.00	78.04	80%	0.00	97.55
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	18.17	0.00	0.00	9.87	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		94.77				100.00				
84	039	032	245160	STASIUN PSDKP KUPANG	Nilai	100.00	85.15	98.42	100.00	100.00	100.00	100.00	97.46	100%	0.00	97.46
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.77	19.68	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	92.58		99.61				100.00				
85	132	032	632004	BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	93.45	94.59	0.00	0.00	99.73	100.00	77.91	80%	0.00	97.39
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.02	18.92	0.00	0.00	9.97	25.00				
					Nilai Aspek	96.73		97.16				100.00				
86	042	032	440847	STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK	Nilai	100.00	86.48	97.09	100.00	100.00	100.00	100.00	97.39	100%	0.00	97.39
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.97	19.42	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	93.24		99.27				100.00				
87	175	032	626402	SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	82.58	100.00	100.00	100.00	99.89	100.00	97.38	100%	0.00	97.38
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.39	20.00	10.00	10.00	9.99	25.00				
					Nilai Aspek	91.29		99.97				100.00				
88	175	032	403821	PUSAT PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	100.00	86.72	100.00	100.00	99.60	100.00	97.30	100%	0.00	97.30
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	17.34	10.00	10.00	9.96	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		96.58				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

89	136	032	427598	BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR	Nilai	100.00	86.88	98.97	0.00	0.00	100.00	100.00	77.83	80%	0.00	97.28
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.03	19.79	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	93.44		99.49				100.00				
90	175	032	622081	BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA	Nilai	100.00	81.26	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.19	100%	0.00	97.19
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.19	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	90.63		100.00				100.00				
91	179	032	239260	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG	Nilai	100.00	84.43	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	77.66	80%	0.00	97.08
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.66	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	92.22		100.00				100.00				
92	175	032	537611	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	Nilai	100.00	86.91	100.00	100.00	100.00	90.34	100.00	97.07	100%	0.00	97.07
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.04	20.00	10.00	10.00	9.03	25.00				
					Nilai Aspek	93.46		97.59				100.00				
93	132	032	440013	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA (POLTEK KP JEMBRANA)	Nilai	100.00	86.91	96.60	100.00	0.00	100.00	100.00	87.36	90%	0.00	97.06
					Bobot	10	15	20	10	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.04	19.32	10.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	93.46		98.87				100.00				
94	039	032	403838	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	Nilai	100.00	85.49	100.00	100.00	100.00	92.09	100.00	97.03	100%	0.00	97.03
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.82	20.00	10.00	10.00	9.21	25.00				
					Nilai Aspek	92.75		98.02				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

95	016	032	649622	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BENGKULU	Nilai	100.00	82.46	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	77.37	80%	0.00	96.71
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.37	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	91.23		100.00				100.00				
96	073	032	427692	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	Nilai	100.00	77.98	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	96.70	100%	0.00	96.70
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.70	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	88.99		100.00				100.00				
97	015	032	649699	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PANGKAL PINANG	Nilai	100.00	78.27	100.00	100.00	100.00	98.53	100.00	96.59	100%	0.00	96.59
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.74	20.00	10.00	10.00	9.85	25.00				
					Nilai Aspek	89.14		99.63				100.00				
98	175	032	449520	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	87.16	95.51	100.00	100.00	94.03	100.00	96.58	100%	0.00	96.58
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.07	19.10	10.00	10.00	9.40	25.00				
					Nilai Aspek	93.58		97.38				100.00				
99	068	032	649704	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAUKE	Nilai	100.00	83.01	100.00	0.00	0.00	97.73	100.00	77.22	80%	0.00	96.53
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.45	20.00	0.00	0.00	9.77	25.00				
					Nilai Aspek	91.51		98.87				100.00				
100	175	032	427511	POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN (POLTEK AUP) JAKARTA	Nilai	100.00	78.47	100.00	100.00	100.00	97.17	100.00	96.49	100%	0.00	96.49
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.77	20.00	10.00	10.00	9.72	25.00				
					Nilai Aspek	89.24		99.29				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

101	045	032	567584	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN	Nilai	100.00	100.00	99.85	100.00	100.00	100.00	86.01	96.47	100%	0.00	96.47
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.97	10.00	10.00	10.00	21.50				
					Nilai Aspek	100.00		99.96				86.01				
102	123	032	427567	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN I	Nilai	100.00	81.08	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	77.16	80%	0.00	96.45
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.16	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	90.54		100.00				100.00				
103	178	032	340150	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT	Nilai	100.00	83.33	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	67.50	70%	0.00	96.43
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.50	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	91.67		100.00				100.00				
104	051	032	649601	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALU	Nilai	100.00	86.12	97.55	0.00	0.00	97.05	100.00	77.13	80%	0.00	96.42
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.92	19.51	0.00	0.00	9.71	25.00				
					Nilai Aspek	93.06		97.30				100.00				
105	137	032	325156	PANGKALAN PSDKP BATAM	Nilai	100.00	85.44	95.62	100.00	100.00	94.75	100.00	96.41	100%	0.00	96.41
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.82	19.12	10.00	10.00	9.47	25.00				
					Nilai Aspek	92.72		97.59				100.00				
106	118	032	239188	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	Nilai	100.00	82.83	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	67.42	70%	0.00	96.32
					Bobot	10	15	0	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.42	0.00	10.00	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	91.42		100.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

107	043	032	649657	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALANGKARAYA	Nilai	100.00	81.97	98.76	0.00	0.00	100.00	100.00	77.05	80%	0.00	96.31
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.30	19.75	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	90.99		99.38				100.00				
108	001	032	427551	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG	Nilai	100.00	89.90	100.00	0.00	0.00	85.57	100.00	77.04	80%	0.00	96.30
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.49	20.00	0.00	0.00	8.56	25.00				
					Nilai Aspek	94.95		92.79				100.00				
109	047	032	567610	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN	Nilai	100.00	86.47	100.00	0.00	0.00	90.18	100.00	76.99	80%	0.00	96.24
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.97	20.00	0.00	0.00	9.02	25.00				
					Nilai Aspek	93.24		95.09				100.00				
110	103	032	352595	AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)	Nilai	100.00	86.48	96.92	0.00	0.00	94.70	100.00	76.83	80%	0.00	96.03
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.97	19.38	0.00	0.00	9.47	25.00				
					Nilai Aspek	93.24		95.81				100.00				
111	107	032	239221	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	Nilai	100.00	84.28	100.00	0.00	100.00	87.56	100.00	86.40	90%	0.00	96.00
					Bobot	10	15	20	0	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.64	20.00	0.00	10.00	8.76	25.00				
					Nilai Aspek	92.14		95.85				100.00				
112	010	032	427573	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN	Nilai	100.00	85.41	100.00	0.00	0.00	89.87	100.00	76.80	80%	0.00	96.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.81	20.00	0.00	0.00	8.99	25.00				
					Nilai Aspek	92.71		94.93				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

113	061	032	649750	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON	Nilai	100.00	84.22	100.00	0.00	0.00	90.82	100.00	76.71	80%	0.00	95.89
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.63	20.00	0.00	0.00	9.08	25.00				
					Nilai Aspek	92.11		95.41				100.00				
114	037	032	477419	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	Nilai	100.00	90.94	85.77	100.00	100.00	100.00	100.00	95.80	100%	0.00	95.80
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.64	17.15	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	95.47		96.44				100.00				
115	008	032	567453	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PEKANBARU	Nilai	100.00	78.39	100.00	0.00	0.00	98.39	100.00	76.60	80%	0.00	95.75
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.76	20.00	0.00	0.00	9.84	25.00				
					Nilai Aspek	89.20		99.20				100.00				
116	123	032	440831	STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN	Nilai	100.00	79.11	96.97	100.00	100.00	94.55	100.00	95.72	100%	0.00	95.72
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.87	19.39	10.00	10.00	9.46	25.00				
					Nilai Aspek	89.56		97.88				100.00				
117	175	032	649682	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II	Nilai	100.00	82.68	100.00	0.00	0.00	90.36	100.00	76.44	80%	0.00	95.55
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.40	20.00	0.00	0.00	9.04	25.00				
					Nilai Aspek	91.34		95.18				100.00				
118	012	032	237657	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM	Nilai	100.00	81.43	100.00	100.00	100.00	91.47	96.07	95.38	100%	0.00	95.38
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.21	20.00	10.00	10.00	9.15	24.02				
					Nilai Aspek	90.72		97.87				96.07				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

119	010	032	567432	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PADANG	Nilai	100.00	75.93	99.26	0.00	0.00	100.00	100.00	76.24	80%	0.00	95.30
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.39	19.85	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	87.97		99.63				100.00				
120	178	032	645691	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAMUJU	Nilai	100.00	76.48	100.00	0.00	0.00	96.90	100.00	76.16	80%	0.00	95.20
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.47	20.00	0.00	0.00	9.69	25.00				
					Nilai Aspek	88.24		98.45				100.00				
121	064	032	250263	STASIUN PSDKP BIAK	Nilai	100.00	73.48	95.86	100.00	100.00	99.75	100.00	95.17	100%	0.00	95.17
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.02	19.17	10.00	10.00	9.97	25.00				
					Nilai Aspek	86.74		98.90				100.00				
122	128	032	238734	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	Nilai	100.00	68.31	100.00	100.00	100.00	99.06	100.00	95.15	100%	0.00	95.15
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.25	20.00	10.00	10.00	9.91	25.00				
					Nilai Aspek	84.16		99.76				100.00				
123	175	032	632462	SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai	100.00	85.06	91.74	100.00	100.00	89.75	100.00	95.08	100%	0.00	95.08
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.76	18.35	10.00	10.00	8.98	25.00				
					Nilai Aspek	92.53		95.37				100.00				
124	014	032	567481	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALEMBANG	Nilai	100.00	84.96	100.00	0.00	0.00	100.00	91.25	75.56	80%	0.00	94.45
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.74	20.00	0.00	0.00	10.00	22.81				
					Nilai Aspek	92.48		100.00				91.25				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

125	061	032	567720	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	Nilai	100.00	90.98	100.00	100.00	100.00	93.54	84.93	94.23	100%	0.00	94.23
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.65	20.00	10.00	10.00	9.35	21.23				
					Nilai Aspek	95.49		98.39				84.93				
126	063	032	567812	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAYAPURA	Nilai	100.00	78.23	98.87	0.00	0.00	88.52	100.00	75.36	80%	0.00	94.20
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.73	19.77	0.00	0.00	8.85	25.00				
					Nilai Aspek	89.12		93.69				100.00				
127	020	032	239146	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	Nilai	100.00	80.61	100.00	100.00	100.00	67.63	100.00	93.85	100%	0.00	93.85
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.09	20.00	10.00	10.00	6.76	25.00				
					Nilai Aspek	90.31		91.91				100.00				
128	066	032	649711	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SORONG	Nilai	100.00	79.93	100.00	0.00	0.00	80.69	100.00	75.06	80%	0.00	93.82
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.99	20.00	0.00	0.00	8.07	25.00				
					Nilai Aspek	89.97		90.34				100.00				
129	083	032	170445	STASIUN PSDKP TAHUNA	Nilai	100.00	82.99	95.37	100.00	100.00	100.00	87.67	93.44	100%	0.00	93.44
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.45	19.07	10.00	10.00	10.00	21.92				
					Nilai Aspek	91.50		98.84				87.67				
130	039	032	499352	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (BKKPN) KUPANG	Nilai	100.00	100.00	66.00	100.00	100.00	100.00	100.00	93.20	100%	0.00	93.20
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	13.20	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		91.50				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

131	136	032	477431	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR	Nilai	100.00	88.29	71.46	100.00	100.00	99.75	100.00	92.51	100%	0.00	92.51
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.24	14.29	10.00	10.00	9.97	25.00				
					Nilai Aspek	94.15		92.80				100.00				
132	024	032	622482	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	Nilai	100.00	100.00	60.09	100.00	100.00	100.00	100.00	92.02	100%	0.00	92.02
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	12.02	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		90.02				100.00				
133	049	032	567631	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MANADO	Nilai	100.00	94.20	100.00	0.00	0.00	100.00	77.31	73.46	80%	0.00	91.82
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.13	20.00	0.00	0.00	10.00	19.33				
					Nilai Aspek	97.10		100.00				77.31				
134	179	032	633707	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	Nilai	100.00	100.00	58.59	100.00	100.00	97.36	100.00	91.45	100%	0.00	91.45
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	11.72	10.00	10.00	9.74	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		88.99				100.00				
135	130	032	518117	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	Nilai	100.00	100.00	55.86	100.00	100.00	99.41	100.00	91.11	100%	0.00	91.11
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	11.17	10.00	10.00	9.94	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		88.82				100.00				
136	038	032	567762	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	Nilai	100.00	85.46	97.56	100.00	100.00	100.00	74.91	91.06	100%	0.00	91.06
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.82	19.51	10.00	10.00	10.00	18.73				
					Nilai Aspek	92.73		99.39				74.91				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

137	084	032	622475	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	Nilai	100.00	73.34	100.00	100.00	100.00	89.26	83.20	90.73	100%	0.00	90.73
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.00	20.00	10.00	10.00	8.93	20.80				
					Nilai Aspek	86.67		97.32				83.20				
138	086	032	403837	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	Nilai	100.00	84.45	69.62	100.00	0.00	100.00	100.00	81.59	90%	0.00	90.66
					Bobot	10	15	20	10	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.67	13.92	10.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	92.23		89.87				100.00				
139	134	032	039163	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai	100.00	55.90	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	63.39	70%	0.00	90.55
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.39	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	77.95		100.00				100.00				
140	175	032	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	Nilai	100.00	74.12	72.15	100.00	100.00	100.00	100.00	90.55	100%	0.00	90.55
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.12	14.43	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	87.06		93.04				100.00				
141	037	032	229110	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	Nilai	100.00	55.48	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	63.32	70%	0.00	90.46
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.32	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	77.74		100.00				100.00				
142	132	032	633693	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	Nilai	100.00	100.00	51.95	100.00	100.00	100.00	100.00	90.39	100%	0.00	90.39
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.39	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		87.99				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

143	175	032	440807	SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	70.18	87.71	100.00	100.00	87.11	94.17	90.32	100%	0.00	90.32
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.53	17.54	10.00	10.00	8.71	23.54				
					Nilai Aspek	85.09		93.70				94.17				
144	030	032	049097	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA	Nilai	100.00	53.34	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	63.00	70%	0.00	90.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.00	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	76.67		100.00				100.00				
145	009	032	329087	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Nilai	100.00	52.88	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	62.93	70%	0.00	89.90
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.93	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	76.44		100.00				100.00				
146	020	032	299391	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	Nilai	100.00	51.12	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	62.67	70%	0.00	89.53
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.67	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.56		100.00				100.00				
147	175	032	238720	SEKRETARIAT DIREKTORAT PERIKANAN TANGKAP	Nilai	100.00	67.22	71.44	100.00	100.00	100.00	100.00	89.37	100%	0.00	89.37
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.08	14.29	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	83.61		92.86				100.00				
148	061	032	427618	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAEHERU	Nilai	100.00	89.03	100.00	0.00	0.00	99.40	72.73	71.48	80%	0.00	89.35
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.35	20.00	0.00	0.00	9.94	18.18				
					Nilai Aspek	94.52		99.70				72.73				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

149	135	032	059190	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	Nilai	100.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	62.50	70%	0.00	89.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		100.00				100.00				
150	038	032	239138	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	Nilai	100.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	62.50	70%	0.00	89.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		100.00				100.00				
151	015	032	309170	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Nilai	100.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	62.50	70%	0.00	89.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		100.00				100.00				
152	061	032	219098	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU	Nilai	100.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	62.50	70%	0.00	89.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		100.00				100.00				
153	017	032	427706	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	Nilai	100.00	83.39	100.00	100.00	100.00	100.00	63.21	88.31	100%	0.00	88.31
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.51	20.00	10.00	10.00	10.00	15.80				
					Nilai Aspek	91.70		100.00				63.21				
154	060	032	537695	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	Nilai	100.00	100.00	68.97	100.00	100.00	83.78	82.20	87.72	100%	0.00	87.72
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	13.79	10.00	10.00	8.38	20.55				
					Nilai Aspek	100.00		88.19				82.20				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

155	042	032	427582	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAK	Nilai	100.00	69.09	64.61	100.00	0.00	100.00	100.00	78.29	90%	0.00	86.98
					Bobot	10	15	20	10	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.36	12.92	10.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	84.55		88.20				100.00				
156	039	032	690993	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
157	016	032	690995	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
158	015	032	690998	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
159	009	032	691000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
160	065	032	691001	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

161	095	032	029090	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
162	134	032	039017	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
163	134	032	039164	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
164	030	032	049033	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
165	014	032	119038	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
166	045	032	159037	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

167	046	032	169034	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
168	051	032	189036	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
169	136	032	199035	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
170	037	032	229111	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
171	038	032	239067	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
172	039	032	249086	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

173	062	032	289028	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
174	020	032	299396	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
175	015	032	309039	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
176	009	032	329011	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
177	009	032	329088	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
178	065	032	330094	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

179	178	032	340151	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
180	178	032	691002	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
181	134	032	691010	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
182	008	032	691016	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
183	012	032	691017	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
184	042	032	691020	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

185	061	032	691028	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
186	037	032	691029	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
187	009	032	691038	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
188	175	032	691046	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
189	095	032	691047	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
190	030	032	691049	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

191	135	032	691050	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
192	001	032	691051	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
193	123	032	691052	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
194	010	032	691053	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
195	008	032	691054	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
196	012	032	691055	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

197	014	032	691056	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
198	017	032	691057	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
199	042	032	691058	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
200	043	032	691059	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
201	045	032	691060	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
202	046	032	691061	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

203	049	032	691062	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
204	051	032	691063	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
205	136	032	691064	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
206	060	032	691065	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGGAH	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
207	061	032	691066	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
208	037	032	691067	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

209	038	032	691068	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
210	039	032	691069	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
211	063	032	691070	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
212	016	032	691071	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
213	062	032	691072	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
214	020	032	691073	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

215	015	032	691074	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
				Bobot	10	15	20	0	0	0	25					
				Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00					
				Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00					
216	050	032	691075	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
				Bobot	10	15	20	0	0	0	25					
				Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00					
				Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00					
217	009	032	691076	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
				Bobot	10	15	20	0	0	0	25					
				Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00					
				Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00					
218	065	032	691077	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
				Bobot	10	15	20	0	0	0	25					
				Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00					
				Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00					
219	178	032	691078	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
				Bobot	10	15	20	0	0	0	25					
				Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00					
				Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00					
220	185	032	691079	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
				Bobot	10	15	20	0	0	0	25					
				Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00					
				Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00					

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

221	134	032	690927	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
222	012	032	690934	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
223	020	032	690952	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
224	175	032	690970	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
225	095	032	690971	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
226	134	032	690972	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

227	030	032	690973	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
228	135	032	690974	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
229	001	032	690975	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
230	123	032	690976	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
231	008	032	690978	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
232	012	032	690979	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

233	014	032	690980	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
234	043	032	690983	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
235	045	032	690984	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
236	046	032	690985	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
237	049	032	690986	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
238	051	032	690987	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

239	136	032	690988	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
240	060	032	690989	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
241	037	032	690991	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
242	038	032	690992	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
243	001	032	065135	PANGKALAN PSDKP LAMPULO	Nilai	100.00	82.87	96.65	100.00	100.00	84.74	61.35	85.57	100%	0.00	85.57
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.43	19.33	10.00	10.00	8.47	15.34				
					Nilai Aspek	91.44		95.35				61.35				
244	066	032	634146	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	Nilai	100.00	74.99	95.41	0.00	0.00	100.00	72.00	68.33	80%	0.00	85.41
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.25	19.08	0.00	0.00	10.00	18.00				
					Nilai Aspek	87.50		97.71				72.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

245	175	032	660056	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	81.96	99.39	0.00	0.00	0.00	80.09	42.32	50%	0.00	84.63
					Bobot	10	15	0	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	20.02				
					Nilai Aspek	90.98		99.39				80.09				
246	066	032	477440	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	Nilai	100.00	67.73	63.17	0.00	0.00	93.18	100.00	67.11	80%	0.00	83.89
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.16	12.63	0.00	0.00	9.32	25.00				
					Nilai Aspek	83.87		78.17				100.00				
247	060	032	567694	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KENDARI	Nilai	100.00	78.41	100.00	100.00	100.00	78.55	49.15	81.90	100%	0.00	81.90
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.76	20.00	10.00	10.00	7.86	12.29				
					Nilai Aspek	89.21		94.64				49.15				
248	063	032	690949	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	Nilai	100.00	66.67	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	55.00	70%	0.00	78.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	83.34		50.00				100.00				
249	008	032	099326	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	Nilai	100.00	66.67	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	55.00	70%	0.00	78.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	83.34		50.00				100.00				
250	061	032	219099	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU	Nilai	100.00	66.67	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	55.00	70%	0.00	78.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	83.34		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

251	060	032	209118	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Nilai	100.00	66.67	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	55.00	70%	0.00	78.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	83.34		50.00				100.00				
252	066	032	427630	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH SORONG	Nilai	100.00	54.82	57.45	0.00	0.00	0.00	100.00	54.71	70%	0.00	78.16
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.22	11.49	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	77.41		57.45				100.00				
253	175	032	019063	DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
254	095	032	029173	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
255	030	032	049098	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
256	135	032	059191	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

257	001	032	069145	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
258	001	032	069146	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
259	123	032	079137	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
260	010	032	089144	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
261	012	032	109132	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
262	014	032	119142	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

263	017	032	129124	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
264	042	032	139138	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
265	042	032	139139	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
266	043	032	149124	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
267	043	032	149125	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
268	045	032	159118	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

269	045	032	159119	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
270	046	032	169124	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
271	046	032	169125	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
272	049	032	179114	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI SULAWESI UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
273	051	032	189143	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
274	051	032	189144	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

275	136	032	199138	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
276	038	032	239139	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
277	039	032	249170	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
278	016	032	269120	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
279	016	032	269121	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
280	015	032	309171	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

281	050	032	319098	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
282	065	032	339096	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
283	065	032	339097	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
284	185	032	632335	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
285	175	032	690925	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
286	095	032	690926	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

287	030	032	690928	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
288	135	032	690929	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
289	001	032	690930	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
290	123	032	690931	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
291	008	032	690933	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
292	014	032	690935	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

293	017	032	690936	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
294	042	032	690937	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
295	043	032	690938	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
296	045	032	690939	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
297	046	032	690940	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
298	051	032	690942	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

299	061	032	690945	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
300	037	032	690946	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
301	038	032	690947	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
302	039	032	690948	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
303	016	032	690950	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
304	062	032	690951	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

305	015	032	690953	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
306	050	032	690954	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
307	009	032	690955	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
308	065	032	690956	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
309	178	032	690957	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
310	185	032	690958	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

311	068	032	690962	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA SELATAN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
312	068	032	690969	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA SELATAN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
313	062	032	690996	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
314	020	032	690997	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
315	175	032	691008	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
316	095	032	691009	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

317	030	032	691011	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
318	135	032	691012	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
319	001	032	691013	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
320	123	032	691014	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
321	010	032	691015	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
322	014	032	691018	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

323	017	032	691019	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
324	043	032	691021	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
325	045	032	691022	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
326	046	032	691023	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
327	049	032	691024	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
328	051	032	691025	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

329	136	032	691026	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
330	060	032	691027	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
331	038	032	691030	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
332	039	032	691031	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
333	063	032	691032	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
334	016	032	691033	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

335	062	032	691034	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
336	020	032	691035	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
337	015	032	691036	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
338	050	032	691037	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
339	065	032	691039	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
340	178	032	691040	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

341	185	032	691041	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
342	134	032	691048	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
343	185	032	691247	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
344	136	032	199137	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	Nilai	100.00	52.00	100.00	0.00	0.00	0.00	47.68	49.72	70%	0.00	71.03
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.80	20.00	0.00	0.00	0.00	11.92				
					Nilai Aspek	76.00		100.00				47.68				
345	060	032	209117	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGAH	Nilai	100.00	53.02	100.00	0.00	0.00	0.00	37.61	47.36	70%	0.00	67.65
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.95	20.00	0.00	0.00	0.00	9.40				
					Nilai Aspek	76.51		100.00				37.61				
346	049	032	179113	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI SULAWESI UTARA	Nilai	100.00	56.57	100.00	0.00	0.00	0.00	30.00	45.99	70%	0.00	65.69
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.49	20.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	78.29		100.00				30.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

347	010	032	089143	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Nilai	100.00	53.12	100.00	0.00	0.00	0.00	30.00	45.47	70%	0.00	64.95
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.97	20.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	76.56		100.00				30.00				
348	017	032	129123	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	Nilai	100.00	51.94	100.00	0.00	0.00	0.00	30.00	45.29	70%	0.00	64.70
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.79	20.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	75.97		100.00				30.00				
349	175	032	019062	DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	Nilai	100.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	30.00	45.00	70%	0.00	64.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	20.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	75.00		100.00				30.00				
350	060	032	209033	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGERA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	70%	0.00	50.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				0.00				
351	017	032	129034	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	70%	0.00	50.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				0.00				
352	014	032	119114	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	30.00	35.00	70%	0.00	50.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				30.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

353	010	032	089004	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	70%	0.00	50.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				0.00				
354	123	032	079136	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	30.00	35.00	70%	0.00	50.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				30.00				
355	095	032	029172	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	30.00	35.00	70%	0.00	50.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				30.00				
356	050	032	690999	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	70%	0.00	50.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				0.00				
357	063	032	690994	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	70%	0.00	50.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				0.00				
358	061	032	690990	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	70%	0.00	50.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				0.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

359	010	032	690977	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	70%	0.00	50.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				0.00				
360	050	032	319033	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	70%	0.00	50.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				0.00				
361	063	032	259038	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	70%	0.00	50.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				0.00				
362	061	032	219030	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	70%	0.00	50.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				0.00				
363	050	032	319099	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				
364	185	032	691003	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

365	049	032	690941	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				
366	136	032	690943	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				
367	060	032	690944	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				
368	066	032	690959	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PAPUA BARAT DAYA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				
369	113	032	690960	DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN PAPUA PEGUNUNGAN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				
370	085	032	690961	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA TENGAH	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

371	066	032	690966	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PAPUA BARAT DAYA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				
372	113	032	690967	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN PAPUA PEGUNUNGAN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				
373	017	032	690981	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				
374	062	032	289113	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				
375	062	032	289112	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				
376	063	032	259108	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

377	063	032	259107	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				
378	042	032	690982	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				
379	085	032	690968	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA TENGAH	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				
380	010	032	690932	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				

BALAI KIPM MATARAM

Cari

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	BALAI KIPM MATARAM	19	23.95	95.8 %	30.97	77.42 %	25	83.33 %	5	100 %	84.92	TINGGI

<

>

SIDAK KKP
Paulus Nara
Kahia

PENGAWASAN
BERANDA
MANAGE TLHP
TUTORIAL

NEW LHP/PENDING 0ADMIN PANEL

Beranda / Status Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Data Periode: dd/mm/yyyy s/d dd/mm/yyyy

SATUAN KERJA : BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATARAM

Nilai Temuan Keuangan

Total Nilai Temuan Hasil Pengawasan
Rp8,675,375.00

Setoran Ke Kas Negara Tuntas per 03 Jul 2025
Rp0.00 Prosentase: 100.00%

Rp0.00 Sisa temuan keuangan yang belum tuntas per 03 Jul 2025 0.00%

NOTE:
Segera lakukan proses tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern Inspektorat Jenderal yang dapat dilaksanakan secara online. Kirim bukti tindak lanjut dengan mengupload dokumen bukti ke dalam sistem aplikasi SIDAK melalui Menu Manage TLHP.

Profil Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Daftar LHP
Change Password
Logout

CAPAIAN TLHP 100%

STATUS: **IKU Success**

Temuan Hasil Pengawasan

JUMLAH KEJADIAN : 25

Kategori	Jumlah
Kepatuhan	: 6 Temuan
Kelengahan SPI	: 19 Temuan
Temuan 3-E	: 0 Temuan

Laporan Hasil Pengawasan

JUMLAH LHP : 8

Kategori	Jumlah
LHP BAB	: 3 LHP
LHP SURAT	: 5 LHP
CHR	: 0 CHR
NOTA DINAS	: 0 DOK

Rekomendasi/Saran

JUMLAH REKOMISARAN : 36

Kategori	Jumlah
Tuntas	: 36 Rekom
Proses	: 0 Rekom
Pending	: 0 Rekom
RTDD	: 0 Rekom

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 86/SJ.7/PL.410/VII/2025

Yth. : 1. Para Kepala Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
7. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
9. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
10. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
11. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

Dari : Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa

Hal : Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 2 Tahun Anggaran 2025

Lampiran : Satu berkas

Tanggal : 9 Juli 2025

Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini memiliki 148 Satuan kerja (satker) yang tersebar di 10 unit kerja eselon I. Seluruh satuan kerja tersebut telah melakukan identifikasi belanja pengadaan yang dituangkan ke dalam penyusunan kertas kerja sebagai data dukung pembentuk nilai pagu pengadaan yang selanjutnya dilakukan proses revisi RUP pada aplikasi SIRUP berdasarkan dokumen kertas kerja dimaksud. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya persentase pengumuman RUP pada aplikasi SIRUP melebihi 100%. Data yang terbentuk pada dokumen kertas kerja untuk nilai pagu Terumumkan merupakan nilai yang sama dengan nilai yang tercantum dalam rekap RUP Terumumkan pada aplikasi SIRUP.

Berdasarkan manual indikator perhitungan capaian IKU untuk persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada aplikasi SIRUP Triwulan 2 tahun anggaran 2025, formula dan ketentuan perhitungannya adalah sebagai berikut:

Formulasi pengukuran/penilaian :

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada aplikasi SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%. Maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Saat ini telah dilakukan kompilasi dan rekapitulasi data hasil perhitungan capaian Indikator Kinerja untuk persentase Rencana Umum Pengadaan pada setiap Unit Kerja Eselon I di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 2 tahun anggaran 2025. Sebagai informasi, sampai dengan waktu *cut off* data untuk perhitungan persentase RUP Terumumkan pada tanggal 9 Juli 2025 pukul 09.30 WIB, masih terdapat 2 (dua) satuan kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memperoleh capaian persentase RUP Terumumkan tidak 100% (seratus persen), yang disebabkan oleh adanya LEBIH TERUMUMKAN dan BELUM MENGUMUMKAN di dalam aplikasi SIRUP (sebagaimana terlampir), antara lain;

❖ **Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap**

- 1) Pelabuhan Perikanan Nusantara Bungus persentase 0,00%

❖ **Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya**

- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya persentase 100,81%

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Saudara dapat segera melakukan koreksi perbaikan terhadap persentase tersebut agar menjadi persentase wajar.

Demikian kami sampaikan, atas atensi dan kerja sama dari seluruh pihak terkait dalam upaya peningkatan kinerja perencanaan PBJ yang telah dilaksanakan, kami ucapkan terima kasih.



Sofiyanto

Ditandatangani
Secara Elektronik

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

Lampiran Nota Dinas
 Nomor : 86/SJ.7/PL.410/VII/2025
 Tanggal : 9 Juli 2025

**REKAPITULASI DATA HASIL PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UNTUK PERSENTASE RENCANA UMUM
 PENGADAAN TRIWULAN 2 TAHUN ANGGARAN 2025 LINGKUP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Kode Eselon 1	Nama Unit Eselon 1	Σ SATKER	Persentase RUP Terumumkan				% Target IKU TW 2	% Capaian Target IKU TW 2	Keterangan
			Pagu Pengadaan	Pagu Terumumkan	Selisih	Keterangan			
13	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	37	42,481,346,722	42,481,346,722	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
02	Inspektorat Jenderal	1	5,933,654,000	5,933,654,000	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
06	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	2	31,003,797,075	31,003,797,075	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
07	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	9	233,805,135,000	233,805,135,000	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
05	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	15	312,817,524,500	312,817,524,500	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
01	Sekretariat Jenderal	3	334,777,219,000	334,777,219,000	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
12	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	41	162,785,749,168	162,785,749,168	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
03	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	24	1,978,583,640,800	1,975,572,149,800	(3,011,491,000)	Kurang Terumumkan	76.00%	99.85%	Melebihi Target
04	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	16	1,022,674,212,069	1,029,924,292,069	7,250,080,000	Lebih Terumumkan	76.00%	99.29%	Melebihi Target

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

C	DITJEN PERIKANAN TANGKAP		1,978,583,640,800	1,975,572,169,800	1,975,572,149,800	3,011,491,000	99.85%
1	537611	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	15,972,735,000	15,972,735,000	15,972,735,000	-	100.00%
2	238720	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	219,592,991,000	219,592,991,000	219,592,991,000	-	100.00%
3	560393	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN RATU	3,685,697,000	3,685,697,000	3,685,697,000	-	100.00%
4	622482	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	435,112,613,000	435,112,613,000	435,112,613,000	-	100.00%
5	518117	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	3,940,604,800	3,940,604,800	3,940,604,800	-	100.00%
6	239150	BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN SEMARANG	4,949,994,000	4,949,994,000	4,949,994,000	-	100.00%
7	239171	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	1,922,347,000	1,922,347,000	1,922,347,000	-	100.00%
8	427670	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	2,003,286,000	2,003,286,000	2,003,286,000	-	100.00%
9	427692	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	3,196,346,000	3,196,346,000	3,196,346,000	-	100.00%
10	427655	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	6,498,030,000	6,498,030,000	6,498,030,000	-	100.00%
11	560401	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	2,877,458,000	2,877,458,000	2,877,458,000	-	100.00%
12	531488	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	3,011,491,000	3,011,491,000	-	3,011,491,000	0.00%
13	239991	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	2,200,792,000	2,200,792,000	2,200,792,000	-	100.00%
14	239235	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	2,089,461,000	2,089,461,000	2,089,461,000	-	100.00%
15	633707	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	59,313,949,000	59,313,949,000	59,313,949,000	-	100.00%
16	537695	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	36,040,719,000	36,040,719,000	36,040,719,000	-	100.00%
17	622475	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	1,959,181,000	1,959,181,000	1,959,181,000	-	100.00%
18	622461	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	3,708,065,000	3,708,065,000	3,708,065,000	-	100.00%
19	633693	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	1,158,531,231,000	1,158,531,231,000	1,158,531,231,000	-	100.00%
20	427661	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	2,806,316,000	2,806,316,000	2,806,316,000	-	100.00%
21	239146	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	3,195,671,000	3,195,671,000	3,195,671,000	-	100.00%
22	239221	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	1,874,832,000	1,874,832,000	1,874,832,000	-	100.00%
23	239214	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT	1,215,163,000	1,215,163,000	1,215,163,000	-	100.00%
24	310719	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	2,884,668,000	2,884,688,000	2,884,668,000	-	100.00%

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

D	DITJEN PERIKANAN BUDI DAYA		1,022,674,212,069	1,029,878,925,069	1,029,924,292,069	(7,250,080,000)	100.71%
1	632462	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA	893,006,650,069	900,256,730,069	900,256,730,069	(7,250,080,000)	100.81%
2	445393	BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA KARAWANG	41,051,068,000	41,005,701,000	41,051,068,000	-	100.00%
3	238734	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	11,611,482,000	11,611,482,000	11,611,482,000	-	100.00%
4	239192	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	6,382,408,000	6,382,408,000	6,382,408,000	-	100.00%
5	567350	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	7,843,216,000	7,843,216,000	7,843,216,000	-	100.00%
6	567385	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE	4,855,811,000	4,855,811,000	4,855,811,000	-	100.00%
7	237657	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM	8,938,057,000	8,938,057,000	8,938,057,000	-	100.00%
8	427706	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	8,049,166,000	8,049,166,000	8,049,166,000	-	100.00%
9	567584	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN	5,836,021,000	5,836,021,000	5,836,021,000	-	100.00%
10	538911	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	3,033,050,000	3,033,050,000	3,033,050,000	-	100.00%
11	567680	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR	7,414,717,000	7,414,717,000	7,414,717,000	-	100.00%
12	567720	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	6,743,509,000	6,743,509,000	6,743,509,000	-	100.00%
13	445394	BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	7,324,563,000	7,324,563,000	7,324,563,000	-	100.00%
14	567762	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	1,253,261,000	1,253,261,000	1,253,261,000	-	100.00%
15	567800	BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	3,982,403,000	3,982,403,000	3,982,403,000	-	100.00%
16	567474	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM	5,348,830,000	5,348,830,000	5,348,830,000	-	100.00%



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Sofiyanto

IKS.12 Persentase RUP yang diumumkan pada SIRUP (Mataram) Triwulan II Tahun 2025

NO	Nama_Satker	PAGU PENGADAAN (sumber data : Menu RUP - SIRUP)			PAGU TERUMUMKAN (sumber data : Rekap RUP Terumumkan - SIRUP)			% RUP TERUMUMKAN	
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Selisih Pagu Terumumkan - Pagu Pengadaan	%
1	BALAI KIPMHKP SURABAYA I	4,601,969,000	-	4,601,969,000	4,601,969,000	-	4,601,969,000	0	100.00%
2	BALAI KIPMHKP MEDAN I	2,227,785,000	-	2,227,785,000	2,227,785,000	-	2,227,785,000	0	100.00%
3	BALAI BESAR KIPMHKP MAKASSAR	2,892,982,000	-	2,892,982,000	2,114,307,000	-	2,114,307,000	0	100.00%
4	BALAI KIPMHKP DENPASAR	1,784,010,000	-	1,784,010,000	1,784,010,000	-	1,784,010,000	0	100.00%
5	STASIUN KIPMHKP BATAM	1,351,261,698	-	1,351,261,698	1,351,261,698	-	1,351,261,698	0	100.00%
6	SEKRETARIAT BADAN KIPMHKP	5,563,552,000	-	5,563,552,000	5,563,552,000	-	5,563,552,000	0	100.00%
7	STASIUN KIPMHKP PADANG	744,295,000	-	744,295,000	744,295,000	-	744,295,000	0	100.00%
8	STASIUN KIPMHKP PEKANBARU	392,002,000	-	392,002,000	392,002,000	-	392,002,000	0	100.00%
9	STASIUN KIPMHKP PALEMBANG	687,840,000	-	687,840,000	687,840,000	-	687,840,000	0	100.00%
10	STASIUN KIPMHKP PONTIANAK	1,490,057,000	-	1,490,057,000	1,490,057,000	-	1,490,057,000	0	100.00%
11	BALAI KIPMHKP BALIKPAPAN	440,437,000	-	440,437,000	440,437,000	-	440,437,000	0	100.00%
12	BALAI KIPMHKP MANADO	1,711,693,000	-	1,711,693,000	1,711,693,000	-	1,711,693,000	0	100.00%
13	STASIUN KIPMHKP KENDARI	351,241,000	-	351,241,000	351,241,000	-	351,241,000	0	100.00%
14	BALAI KIPMHKP MATARAM	1,082,514,000	-	1,082,514,000	1,082,514,000	-	1,082,514,000	0	100.00%
15	BALAI KIPMHKP JAYAPURA	399,150,000	-	399,150,000	399,150,000	-	399,150,000	0	100.00%
16	STASIUN KIPMHKP MAMUJU	35,000,000	-	35,000,000	35,000,000	-	35,000,000	0	100.00%
17	STASIUN KIPMHKP KUPANG	-	58,810,000	58,810,000	-	58,810,000	58,810,000	0	100.00%
18	BALAI KIPMHKP TARAkan	154,755,800	-	154,755,800	154,755,800	-	154,755,800	0	100.00%
19	STASIUN KIPMHKP ACEH	1,035,194,000	-	1,035,194,000	1,035,194,000	-	1,035,194,000	0	100.00%
20	BALAI KIPMHKP BANJARMASIN	565,163,000	-	565,163,000	565,163,000	-	565,163,000	0	100.00%
21	STASIUN KIPMHKP PALU	50,961,000	-	50,961,000	50,961,000	-	50,961,000	0	100.00%
22	BALAI KIPMHKP LAMPUNG	945,341,324	-	945,341,324	945,341,324	-	945,341,324	0	100.00%
23	STASIUN KIPMHKP BENGKULU	436,771,000	-	436,771,000	436,771,000	-	436,771,000	0	100.00%
24	STASIUN KIPMHKP JAMBI	173,413,900	-	173,413,900	173,413,900	-	173,413,900	0	100.00%
25	STASIUN KIPMHKP PALANGKARAYA	664,903,000	-	664,903,000	664,903,000	-	664,903,000	0	100.00%

REKAP RENCANA UMUM PENGADAAN**TAHUN ANGGARAN : 2025**

K/L/PD:	Kementerian Kelautan Dan Perikanan
Satuan Kerja:	Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram
PA/KPA	M. Farchan, S.Pi, MP 197002051991031003

**Data yang terdapat pada berkas ini dipopulasi secara otomatis oleh SiRUP pada tanggal 02-05-2025 11:08:21. Berkas ini berisi data paket-paket Rencana Umum Pengadaan yang telah diisi melalui sirup, baik yang sudah diumumkan atau pun yang masih berupa draf. Untuk melihat paket yang telah terumumkan dan lebih terbaru silakan kunjungi link ini <http://sirup.lkpp.go.id/sirup/home/swakelola/satker/14623> dan <http://sirup.lkpp.go.id/sirup/home/penyediaatker/satker/14623>*

1. Paket Penyedia

1.1. Paket Penyedia Terumumkan

No	Kegiatan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Lokasi	Keterangan	Pemilihan Penyedia	Pagu
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan,	58488051	ATK dan Komputer Supplies Balai	APBN	Mataram (Kota)	Volume:(12, BLN, @ 1583333) TKDN: Ya 1. ATK dan Komputer Supplies Balai (12, BLN, @ 1583333);	Pengadaan Langsung	19.000.000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan,	58488063	Biaya Keperluan Sehari - hari Perkantoran (26 Pegawai)	APBN	Mataram (Kota)	Volume:(1, THN, @ 20030000) TKDN: Ya 1. Biaya Keperluan Sehari - hari Perkantoran (26 Pegawai) (1, THN, @ 20030000);	Pengadaan Langsung	20.030.000
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan,	58488049	Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2	APBN	Mataram (Kota)	Volume:(12, UNIT, @ 3600000) TKDN: Ya 1. Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 (12, UNIT, @ 3600000);	Pengadaan Langsung	43.200.000
4	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan,	58488058	Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4	APBN	Mataram (Kota)	Volume:(4, UNIT, @ 37400000) TKDN: Ya 1. Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (4, UNIT, @ 37400000);	Pengadaan Langsung	149.600.000
5	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan,	58488067	BPJS Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti (1 Orang x 13 Bln)	APBN	Mataram (Kota)	Volume:(13, OB, @ 52000) TKDN: Ya 1. BPJS Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti (1 Orang x 13 Bln) (13, OB, @ 52000);	Pengadaan Langsung	676.000

6	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan,	58488074	BPJS Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti (6 Orang x 13 Bln)	APBN	Mataram (Kota)	Volume:(78, OB, @ 52000) TKDN: Ya 1. BPJS Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti (6 Orang x 13 Bln) (78, OB, @ 52000);	Pengadaan Langsung	4.056.000
7	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan,	58488073	BPJS Honorarium Satpam dan Pengemudi (4 Orang x 13 BLN)	APBN	Mataram (Kota)	Volume:(1, OB, @ 8407000) TKDN: Ya 1. BPJS Honorarium Satpam dan Pengemudi (4 Orang x 13 BLN) (1, OB, @ 8407000);	Pengadaan Langsung	8.407.000
8	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan,	58488066	BPJS Honorarium Satpam dan Pengemudi (4 Orang x 13 BLN)	APBN	Mataram (Kota)	Volume:(52, OB, @ 57000) TKDN: Ya 1. BPJS Honorarium Satpam dan Pengemudi (4 Orang x 13 BLN) (52, OB, @ 57000);	Pengadaan Langsung	2.964.000
9	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan,	58488076	Cleaning Service (Jasa Kebersihan Pihak Ketiga 2 Org)	APBN	Mataram (Kota)	Volume:(1, PKT, @ 106005000) TKDN: Ya 1. Cleaning Service (Jasa Kebersihan Pihak Ketiga 2 Org) (1, PKT, @ 106005000);	Pengadaan Langsung	106.005.000
10	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan,	58488075	Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti (1 Orang x 13 Bln)	APBN	Mataram (Kota)	Volume:(13, OB, @ 194538) TKDN: Ya 1. Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti (1 Orang x 13 Bln) (13, OB, @ 194538);	Pengadaan Langsung	2.529.000
11	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan,	58488072	Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti (6 Orang x 13 Bln)	APBN	Mataram (Kota)	Volume:(1, OB, @ 199463000) TKDN: Ya 1. Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti (6 Orang x 13 Bln) (1, OB, @ 199463000);	Pengadaan Langsung	199.463.000
12	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan,	58488055	Honorarium Satpam dan Pengemudi (4 Orang x 13 BLN)	APBN	Mataram (Kota)	Volume:(52, OB, @ 2890000) TKDN: Ya 1. Honorarium Satpam dan Pengemudi (4 Orang x 13 BLN) (52, OB, @ 2890000);	Pengadaan Langsung	150.280.000

13	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan,	58488071	Internet Kantor	APBN	Mataram (Kota)	Volume:(12, BLN, @ 6000000) TKDN: Ya 1. Internet Kantor (12, BLN, @ 6000000);	Pengadaan Langsung	72.000.000
14	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan,	58488054	Jasa Kebersihan Lingkungan Kantor	APBN	Mataram (Kota)	Volume:(12, BLN, @ 300000) TKDN: Ya 1. Jasa Kebersihan Lingkungan Kantor (12, BLN, @ 300000);	Pengadaan Langsung	3.600.000
15	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan,	58488064	Konsumsi Tamu	APBN	Mataram (Kota)	Volume:(12, BLN, @ 2041666) TKDN: Ya 1. Konsumsi Tamu (12, BLN, @ 2041666);	Pengadaan Langsung	24.500.000
16	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan,	58488070	Langganan Koran/Majalah/TV	APBN	Mataram (Kota)	Volume:(12, BLN, @ 650000) TKDN: Ya 1. Langganan Koran/Majalah/TV (12, BLN, @ 650000);	Pengadaan Langsung	2.560.000
17	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan,	58488060	Langganan Zoom Meeting	APBN	Mataram (Kota)	Volume:(1, THN, @ 3600000) TKDN: Ya 1. Langganan Zoom Meeting (1, THN, @ 3600000);	Pengadaan Langsung	3.600.000
18	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan,	58488052	Meterai	APBN	Mataram (Kota)	Volume:(1, THN, @ 6000000) TKDN: Ya 1. Meterai (1, THN, @ 6000000);	Pengadaan Langsung	6.000.000
19	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan,	58488059	Operasional Genset	APBN	Mataram (Kota)	Volume:(2, THN, @ 6475000) TKDN: Ya 1. Operasional Genset (2, THN, @ 6475000);	Pengadaan Langsung	12.950.000
20	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan,	58488050	Pakaian Kerja Satpam	APBN	Mataram (Kota)	Volume:(3, STEL, @ 2500000) TKDN: Ya 1. Pakaian Kerja Satpam (3, STEL, @ 2500000);	Pengadaan Langsung	7.500.000

21	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan,	58488069	Pemeliharaan AC Split	APBN	Mataram (Kota)	Volume:(2, UNIT, @ 500000) TKDN: Ya 1. Pemeliharaan AC Split (2, UNIT, @ 500000);	Pengadaan Langsung	1.000.000
22	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan,	58488056	Pemeliharaan Gedung Kantor Balai	APBN	Mataram (Kota)	Volume:(367,713, M2, @ 223000) TKDN: Ya 1. Gedung Kantor Balai (367,713, M2, @ 223000);	Pengadaan Langsung	82.000.000
23	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan,	58488057	Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kantor (Nusa Tenggara Barat)	APBN	Mataram (Kota)	Volume:(2000, M2, @ 10000) TKDN: Ya 1. Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kantor (Nusa Tenggara Barat) (2000, M2, @ 10000);	Pengadaan Langsung	20.000.000
24	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan,	58488068	Pemeliharaan Personal Computer/Notebook	APBN	Mataram (Kota)	Volume:(1, UNIT, @ 1050000) TKDN: Ya 1. Pemeliharaan Personal Computer/Notebook (1, UNIT, @ 1050000);	Pengadaan Langsung	1.050.000
25	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan,	58488062	Penggandaan, Penjilidan, Spanduk, Banner, Air Minum dll	APBN	Mataram (Kota)	Volume:(12, BLN, @ 1250000) TKDN: Ya 1. Penggandaan, Penjilidan, Spanduk, Banner, Air Minum dll (12, BLN, @ 1250000);	Pengadaan Langsung	15.000.000
26	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan,	58488061	Pengiriman Surat Dinas Via Pos dan Jasa Pengiriman Lainnya	APBN	Mataram (Kota)	Volume:(12, BLN, @ 583333) TKDN: Ya 1. Pengiriman Surat Dinas Via Pos dan Jasa Pengiriman Lainnya (12, BLN, @ 583333);	Pengadaan Langsung	7.000.000
27	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan,	58488053	Sewa Gedung Arsip	APBN	Mataram (Kota)	Volume:(1, THN, @ 18500000) TKDN: Ya 1. Sewa Gedung Arsip (1, THN, @ 18500000);	Pengadaan Langsung	18.500.000
28	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan,	58488065	Sewa Kendaraan Insidentil	APBN	Mataram (Kota)	Volume:(20, PKT, @ 1100000) TKDN: Ya 1. Sewa Kendaraan Insidentil (20, PKT, @ 1100000);	Pengadaan Langsung	3.000.000

29	Manajemen Mutu,	58486714	Biaya Iuran Tahunan	APBN	Mataram (Kota)	Volume:(1, PKT, @ 1500000) TKDN: Ya 1. Biaya Iuran Tahunan (1, PKT, @ 1500000);	Pengadaan Langsung	1.500.000
30	Manajemen Mutu,	58486321	Biaya Iuran Tahunan	APBN	Mataram (Kota)	Volume:(1, PKT, @ 1500000) TKDN: Ya 1. Biaya Iuran Tahunan (1, PKT, @ 1500000);	Pengadaan Langsung	1.500.000
31	Manajemen Mutu,	58486324	Biaya Paket Data Dan Komunikasi Pejabat Setingkat Eselon I dan II/ yang setara	APBN	Mataram (Kota)	Volume:(3, OB, @ 300000) TKDN: Ya 1. Biaya Paket Data Dan Komunikasi Pejabat Setingkat Eselon I dan II/ yang setara (3, OB, @ 300000);	Pengadaan Langsung	900.000
32	Manajemen Mutu,	58486716	Biaya Paket Data Dan Komunikasi Pejabat Setingkat Eselon I dan II/ yang setara	APBN	Mataram (Kota)	Volume:(3, OB, @ 300000) TKDN: Ya 1. Biaya Paket Data Dan Komunikasi Pejabat Setingkat Eselon I dan II/ yang setara (3, OB, @ 300000);	Pengadaan Langsung	900.000
33	Manajemen Mutu,	58486320	Kalibrasi	APBN	Mataram (Kota)	Volume:(1, PKT, @ 61744000) TKDN: Ya 1. Kalibrasi (1, PKT, @ 61744000);	Pengadaan Langsung	61.744.000
34	Manajemen Mutu,	58486715	Pendaftaran	APBN	Mataram (Kota)	Volume:(1, PKT, @ 5000000) TKDN: Ya 1. Pendaftaran (1, PKT, @ 5000000);	Pengadaan Langsung	5.000.000
35	Manajemen Mutu,	58486713	Surveillance 17020	APBN	Mataram (Kota)	Volume:(4, PKT, @ 3500000) TKDN: Ya 1. Surveillance 17020 (4, PKT, @ 3500000);	Pengadaan Langsung	14.000.000
36	Manajemen Mutu,	58486322	Surveillance 17025	APBN	Mataram (Kota)	Volume:(3, PKT, @ 3500000) TKDN: Ya 1. Surveillance 17025 (3, PKT, @ 3500000);	Pengadaan Langsung	10.500.000
Total							1.082.514.000	

1.2. Draf Paket Penyedia

No	Kegiatan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Lokasi	Keterangan	Pemilihan Penyedia	Pagu
Total							0	



2. Paket Swakelola

2.1. Paket Swakelola Terumumkan

No	Kegiatan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Lokasi	Keterangan	Pagu
Total						0	

2.2. Draf Paket Swakelola

No	Kegiatan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Lokasi	Keterangan	Pagu
Total						0	



3. Paket Penyedia Dalam Swakelola

3.1. Paket Penyedia Dalam Swakelola Terumumkan

No	Kegiatan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Lokasi	Keterangan	Pemilihan Penyedia	Pagu
Total							0	

3.2. Draf Paket Penvedia Dalam Swakelola

No	Kegiatan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana	Lokasi	Keterangan	Pemilihan Penyedia	Pagu
Total							0	



Susan KKP

ptsp.kkp.go.id/skm/p/home

Dashboard

Mapping Data

Laporan

PAGES

Download

Profile

Logout

Dashboard Survey Kepmen 54/2022

Home / Dashboard / Tw 2 - 2025

Pengguna | Jumlah

172

dari 139 UPP

Layanan | Jumlah

185

dari 139 UPP

Responden | Jumlah

15111

dari 690 Layanan

IKM Total | per UPP Tw. 2 / 2025

10 entries per page

Search...

Kd Es 1	Nama Unit Pelayanan	Rating	Nilai IKM	Mutu
bkipm	Stasiun KIPM Tahuna	5.00	95.00	A
bkipm	Balai KIPM Jakarta II	5.00	96.94	A
bkipm	Stasiun KIPM Palangkaraya	4.71	89.81	A
bkipm	Balai KIPM Mataram	4.91	95.59	A
bkipm	Stasiun KIPM Gorontalo	5.00	98.57	A
bkipm	Balai KIPM Surabaya II	4.99	95.85	A
bkipm	Stasiun KIPM Merauke	4.94	96.90	A
bkipm	Balai Besar KIPM Makassar	4.92	92.84	A
bkipm	Stasiun KIPM Kupang	4.93	94.54	A
bkipm	Stasiun KIPM Sorong	4.94	98.12	A

Showing 31 to 40 of 135 entries

1 2 3 4 5 6 7 ... 14



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAR www.kkp.go.id SUREL bppmhkp@kkp.go.id

Nomor : B. 3095/BPPMHKP.1/HM.450/VII/2025 10 Juli 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 berkas
Hal : Penyampaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
(SKM) BPPMHKP Triwulan II Tahun 2025

Yth. (Daftar Terlampir)
Di tempat

Sehubungan dengan berakhirnya periode Triwulan II tahun 2025 telah dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna jasa layanan UPP BPPMHKP dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP).

Target yang ditetapkan pada Triwulan II tahun 2025 adalah 88, sebagaimana telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 masing-masing UPT lingkup BPPMHKP. Sebagai pedoman perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan pada periode berikutnya, berikut adalah beberapa catatan dari hasil validasi nilai SKM:

1. Nilai rata-rata SKM yang didapatkan dari seluruh UPP BPPMHKP pada Triwulan II Tahun 2025 adalah **94,42** dengan rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat **3,78** dan mutu pelayanan diperoleh **"A"** kategori **"Sangat Baik"**. Berikut merupakan tabel perolehan tiap unsur pelayanan.
2. Jumlah UPP BPPMHKP yang mendapatkan nilai SKM kategori sangat baik tercatat sebanyak 46 (empat puluh enam) UPP, dan 1 (satu) UPP mendapatkan kategori baik. UPT SKIPM Padang, SKIPM Merak, dan SKIPM Pekanbaru memperoleh nilai SKM tertinggi. Adapun tiga UPT dengan nilai SKM terendah dari total 47 UPT adalah SKIPM Tanjung Balai Asahan, SKIPM Aceh, dan SKIPM Mamuju.

3. Hasil SKM berdasarkan jenis layanan berdasarkan rekap per unsur layanan dari 14 layanan terdapat 13 layanan mendapatkan kategori “Sangat Baik” dan 1 layanan mendapatkan kategori “Baik” yaitu Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (87,50).
4. Rekapitulasi per unsur pada setiap jenis layanan didapatkan rincian nilai sebagai berikut:

Unsur	Nilai
Unsur 1 : Persyaratan Pelayanan	94,92
Unsur 2 : Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	94,88
Unsur 3 : Waktu Penyelesaian Pelayanan	94,02
Unsur 4 : Biaya/Tarif Pelayanan	94,87
Unsur 5 : Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	94,77
Unsur 6 : Kompetensi Pelaksana	93,37
Unsur 7 : Perilaku Pelaksana	93,72
Unsur 8 : Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	95,51
Unsur 9 : Sarana dan Prasarana	93,68

Nilai terendah ada pada 3 (tiga) unsur yakni U6 (Kompetensi Pelaksana), U9 (Sarana dan Prasarana) dan U7 (Perilaku Pelaksana).

5. Berdasarkan hasil validasi tersebut mohon kepada kepala UPT untuk dapat memberikan perhatian lebih pada jenis layanan yang mempunyai nilai rendah dan unsur dengan nilai terendah dalam melakukan tindak lanjut perbaikan pada aspek-aspek yang dapat meningkatkan kinerja setiap unsur pelayanan pada seluruh jenis layanan yang diampu oleh UPP masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Hari Maryadi

Tembusan:

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Lampiran Surat Dinas

Nomor : 3095/BPPMHKP.1/HM.450/VII/2025

Tanggal : 10 Juli 2025

Kepala Unit Kerja lingkup Badan PPMHKP

1. Kepala Pusat Manajemen Mutu
2. Kepala Pusat Mutu Produksi Primer
3. Kepala Pusat Mutu Pascapanen
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup BPPMHKP
5. Plt. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup BPPMHKP

Sekretaris Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Hari Maryadi

Rekapitulasi Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) lingkup BPPMHKP Triwulan II Tahun 2025

NO	UNIT PELAYANAN PUBLIK	NILAI PER-UNSUR									IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN	JUMLAH RESPONDEN
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9				
1	Stasiun KIPM Padang	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	A	Sangat Baik	10
2	Stasiun KIPM Merak	99.73	99.73	100.00	99.73	99.19	100.00	99.73	99.73	100.00	99.76	A	Sangat Baik	93
3	Stasiun KIPM Pekanbaru	99.51	99.51	99.51	98.04	99.51	98.04	99.02	99.02	98.04	98.91	A	Sangat Baik	51
4	Stasiun KIPM Gorontalo	98.31	98.99	98.65	98.65	98.31	98.31	98.65	98.65	98.65	98.57	A	Sangat Baik	74
5	Balai KIPM Banjarmasin	98.89	98.58	98.26	98.10	98.42	98.42	98.58	98.58	98.58	98.49	A	Sangat Baik	158
6	Balai KIPM Ambon	99.00	99.33	97.67	97.33	98.67	98.33	98.33	99.00	98.33	98.44	A	Sangat Baik	75
7	Stasiun KIPM Sorong	99.60	99.19	98.79	89.52	100.00	98.79	99.19	100.00	97.98	98.12	A	Sangat Baik	62
8	Balai KIPM Jayapura	97.22	97.22	97.22	97.22	97.22	97.22	97.22	97.22	97.22	97.22	A	Sangat Baik	9
9	Stasiun KIPM Pontianak	99.12	97.37	98.68	97.81	99.12	95.18	94.74	95.61	96.05	97.08	A	Sangat Baik	57
10	Balai KIPM Medan I	97.06	97.06	97.06	96.32	97.06	96.32	97.06	97.79	97.06	96.98	A	Sangat Baik	34
11	Balai KIPM Jakarta II	97.45	97.96	96.43	96.94	95.92	97.45	97.45	97.45	95.41	96.94	A	Sangat Baik	49
12	Stasiun KIPM Merauke	95.59	97.06	94.12	94.12	97.06	98.53	97.06	100.00	98.53	96.90	A	Sangat Baik	17
13	Balai KIPM Tanjung Pinang	96.96	95.75	96.56	97.27	96.26	95.55	95.14	97.87	96.46	96.42	A	Sangat Baik	247
14	Stasiun KIPM Ternate	96.30	96.30	96.30	96.30	96.30	95.37	95.37	96.30	96.30	96.09	A	Sangat Baik	27

NO	UNIT PELAYANAN PUBLIK	NILAI PER-UNSUR									IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN	JUMLAH RESPONDEN
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9				
15	Stasiun KIPM Pangkal Pinang	96.32	96.32	96.32	95.59	95.59	95.59	95.59	97.06	96.32	96.08	A	Sangat Baik	34
16	Balai KIPM Balikpapan	96.25	96.25	96.25	95.63	95.63	95.00	95.94	96.25	95.63	95.87	A	Sangat Baik	80
17	Balai KIPM Surabaya II	98.42	97.97	97.97	98.42	97.52	95.72	95.50	98.65	82.43	95.85	A	Sangat Baik	111
18	Stasiun KIPM Jambi	97.56	94.51	96.95	96.95	96.34	90.85	93.90	97.56	96.34	95.66	A	Sangat Baik	41
19	Balai KIPM Mataram	96.55	96.55	95.69	96.98	94.83	94.40	94.40	96.12	94.83	95.59	A	Sangat Baik	58
20	Balai KIPM Entikong	95.63	96.88	96.25	95.00	95.63	93.13	94.38	96.25	95.00	95.35	A	Sangat Baik	40
21	Stasiun KIPM Palu	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	78.41	100.00	78.41	95.20	A	Sangat Baik	22
22	Stasiun KIPM Tahuna	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	A	Sangat Baik	5
23	Stasiun KIPM Luwuk Banggai	95.54	95.54	95.54	93.75	93.75	94.64	93.75	96.43	95.54	94.94	A	Sangat Baik	28
24	Stasiun KIPM Bengkulu	95.24	92.86	96.43	95.24	96.43	95.24	94.05	94.05	94.05	94.84	A	Sangat Baik	21
25	Stasiun KIPM Medan II	95.33	95.00	94.00	96.00	94.33	94.67	94.33	94.67	94.33	94.74	A	Sangat Baik	75
26	Stasiun KIPM Bau-Bau	95.45	93.18	95.45	95.45	95.45	93.18	95.45	95.45	93.18	94.70	A	Sangat Baik	22
27	Stasiun KIPM Kupang	95.04	94.86	94.68	93.44	94.68	94.68	94.33	95.04	94.15	94.54	A	Sangat Baik	141
28	Balai KIPM Manado	94.55	94.09	95.00	96.36	95.45	92.27	94.09	94.09	92.73	94.29	A	Sangat Baik	55
29	Balai KIPM Tarakan	94.50	96.00	95.00	94.50	94.50	93.50	93.00	91.50	93.50	94.00	A	Sangat Baik	50

NO	UNIT PELAYANAN PUBLIK	NILAI PER-UNSUR									IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN	JUMLAH RESPONDEN
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9				
30	Stasiun KIPM Cirebon	93.75	93.36	94.14	94.92	94.14	92.97	93.75	94.14	93.75	93.88	A	Sangat Baik	64
31	Stasiun KIPM Kendari	95.54	95.54	93.75	94.64	92.86	91.96	95.54	91.96	92.86	93.85	A	Sangat Baik	28
32	Balai Uji Standar KIPM	95.19	94.23	94.23	94.23	94.23	92.31	92.31	92.31	95.19	93.80	A	Sangat Baik	26
33	Balai KIPM Denpasar	92.76	93.28	93.45	93.10	93.10	93.79	93.62	94.14	94.14	93.49	A	Sangat Baik	145
34	Stasiun KIPM Palembang	89.22	96.57	85.29	98.53	96.81	84.56	93.87	98.53	97.30	93.41	A	Sangat Baik	102
35	Balai Besar KIPM Makassar	93.25	93.10	91.84	93.92	93.43	91.62	92.32	93.51	92.54	92.84	A	Sangat Baik	674
36	Stasiun KIPM Batam	95.12	96.95	95.12	96.34	95.73	90.24	82.93	96.34	85.37	92.68	A	Sangat Baik	41
37	Stasiun KIPM Bandung	94.57	91.30	91.30	94.57	94.57	92.39	88.04	91.30	92.39	92.27	A	Sangat Baik	23
38	Stasiun KIPM Yogyakarta	92.11	93.42	86.84	92.11	93.42	89.47	94.74	94.08	93.42	92.18	A	Sangat Baik	38
39	Stasiun KIPM Bima	94.74	96.05	90.79	88.16	89.47	90.79	93.42	93.42	90.79	91.96	A	Sangat Baik	19
40	Balai KIPM Semarang	91.38	91.38	91.09	91.95	91.09	88.79	89.37	92.24	90.23	90.84	A	Sangat Baik	87
41	Balai Besar KIPM Jakarta I	94.70	89.77	88.26	90.15	88.64	90.15	88.64	90.91	91.67	90.32	A	Sangat Baik	66
42	Balai KIPM Lampung	89.38	93.75	86.88	90.00	88.13	88.75	91.25	91.25	89.38	89.86	A	Sangat Baik	40
43	Stasiun KIPM Palangkaraya	92.86	92.86	88.10	86.90	91.67	88.10	89.29	90.48	88.10	89.81	A	Sangat Baik	21
44	Balai KIPM Surabaya I	91.10	89.41	89.83	91.31	90.47	88.14	88.35	89.41	88.98	89.67	A	Sangat Baik	118

NO	UNIT PELAYANAN PUBLIK	NILAI PER-UNSUR									IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN	JUMLAH RESPONDEN
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9				
45	Stasiun KIPM Mamuju	88.89	91.67	88.89	86.11	86.11	91.67	88.89	88.89	91.67	89.20	A	Sangat Baik	9
46	Stasiun KIPM Aceh	88.75	91.25	90.00	90.00	91.25	86.25	86.25	87.50	87.50	88.75	A	Sangat Baik	20
47	Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan	87.11	86.84	86.84	86.84	86.84	86.84	86.58	100.00	86.58	88.27	B	Baik	95

Hasil Pelaksanaan SKM Berdasarkan Produk Layanan BPPMHKP

NO	PRODUK LAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	NILAI RATA-RATA UNSUR LAYANAN									NILAI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9			
1	Jasa Pengujian Hama Penyakit Ikan Karantina, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, serta Kualitas Air	271	3,72	3,87	3,68	3,83	3,83	3,65	3,79	3,87	3,78	94,51	A	Sangat Baik
2	Uji Profisiensi bagi Laboratorium Pengujian Penyakit Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	1	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	A	Sangat Baik
3	Penyediaan Koleksi Standar/Bahan Acuan/Kontrol Positif	8	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,75	3,75	3,75	4,00	97,92	A	Sangat Baik
4	Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan yang Baik	39	3,85	3,85	3,79	3,79	3,79	3,79	3,74	3,82	3,64	94,66	A	Sangat Baik
5	Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik	5	3,40	3,80	4,00	3,60	3,80	3,40	3,80	4,00	3,20	91,67	A	Sangat Baik
6	Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik	29	3,86	3,79	3,79	3,72	3,72	3,62	3,59	3,79	3,83	93,68	A	Sangat Baik
7	Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik	4	3,75	3,75	3,75	4,00	4,00	3,75	3,75	3,75	3,75	95,14	A	Sangat Baik
8	Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik	8	3,63	3,50	3,63	3,38	3,50	3,38	3,38	3,63	3,50	87,50	B	Baik
9	Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik	107	3,80	3,75	3,77	3,79	3,78	3,74	3,82	3,80	3,67	94,21	A	Sangat Baik

NO	PRODUK LAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	NILAI RATA-RATA UNSUR LAYANAN									NILAI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9			
10	Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	225	3,67	3,64	3,56	3,68	3,67	3,61	3,60	3,66	3,62	90,90	A	Sangat Baik
11	Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan	9	3,67	3,67	3,56	3,33	3,56	3,33	3,56	3,67	3,67	88,89	A	Sangat Baik
12	Penjaminan Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (Health Certificate for Fish and Fishery Products) untuk Pengeluaran dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	2092	3,83	3,82	3,81	3,83	3,82	3,79	3,78	3,84	3,78	95,30	A	Sangat Baik
13	Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/ HACCP)	539	3,75	3,72	3,68	3,71	3,71	3,62	3,67	3,79	3,67	92,54	A	Sangat Baik
14	Penerbitan Nomor Registrasi Unit Pengolahan Ikan ke Negara Mitra (Approval Number)	25	3,88	3,80	3,80	3,88	3,84	3,84	3,84	3,88	3,84	96,11	A	Sangat Baik
SELURUH LAYANAN BPPMHKP		3362	3.80	3.80	3.76	3.79	3.79	3.73	3.75	3.82	3.75	94.42	A	Sangat Baik

LAPORAN

PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN MATARAM
TRIWULAN II TAHUN 2025



BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN PERIKANAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

TAHUN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
BAB II	4
PENGUMPULAN DATA SKM	4
2.1 Pelaksana SKM	4
2.2 Metode Pengumpulan Data	4
2.3 Lokasi Pengumpulan Data	5
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM	5
2.5 Penentuan Jumlah Responden	6
BAB III	7
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM	7
3.1 Jumlah Responden SKM	7
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)	9
BAB IV	10
ANALISIS HASIL SKM	10
4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan	10
4.2 Rencana Tindak Lanjut	11
4.3 Tren Nilai SKM	12
BAB V	13
KESIMPULAN	13
LAMPIRAN	14
1. 14	
2. Hasil Pengolahan Data SKM	15
3. 15	
4. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Periode Sebelumnya	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamankan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram sebagai salah satu Unit Pelayanan Publik (UPP) di Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; dan
3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan administrasi yang telah diberikan oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik; dan
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;

4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan; dan
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada UPP BPPMHKP dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram adalah tim yang sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 (sebagaimana terlampir).

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner *online* melalui link <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/24> yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan melalui link kuesioner yang telah disediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik per-triwulan dengan jangka waktu (periode) yaitu 1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 4 (empat) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	April 2025	8
2.	Pengumpulan Data	April - Mei 2025	60
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	Juni 2025	7
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	Juni 2025	7

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Mataram periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan triwulan I tahun 2025, maka populasi penerima layanan pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Mataram dalam kurun waktu triwulan I tahun 2025 adalah sebanyak 58 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 48 orang.

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

3.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 58 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	23	40%
		Perempuan	35	60%
2	Usia	<25	13	22%
		25-45	42	72%
		46-60	3	5%
		>60	0	0%
3	Pendidikan	SD	0	0%
		SMP	0	0%
		SMA	12	21%
		D3	3	5%
		S1	40	69%
		S2	3	5%
		S3	0	0%
4	Pekerjaan	ASN	3	5%
		TNI/POLRI	0	0%
		Pelaku Usaha KKP	22	38%
		Pegawai Swasta	32	55%
		Wirausaha Non KKP	1	2%
		Pelajar/Mahasiswa	0	0%
5	Jenis Layanan	Uji Profisiensi bagi laboratorium pengujian penyakit ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan	0	0%
		Penyediaan koleksi standar/bahan acuan/kontrol positif	0	0%

		Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air	11	19%
		Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/ HACCP)	1	2%
		Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate for Fish and Fishery Products) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	41	71%
		Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	1	2%
		Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan	1	2%
		Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik	3	5%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik	0	0%

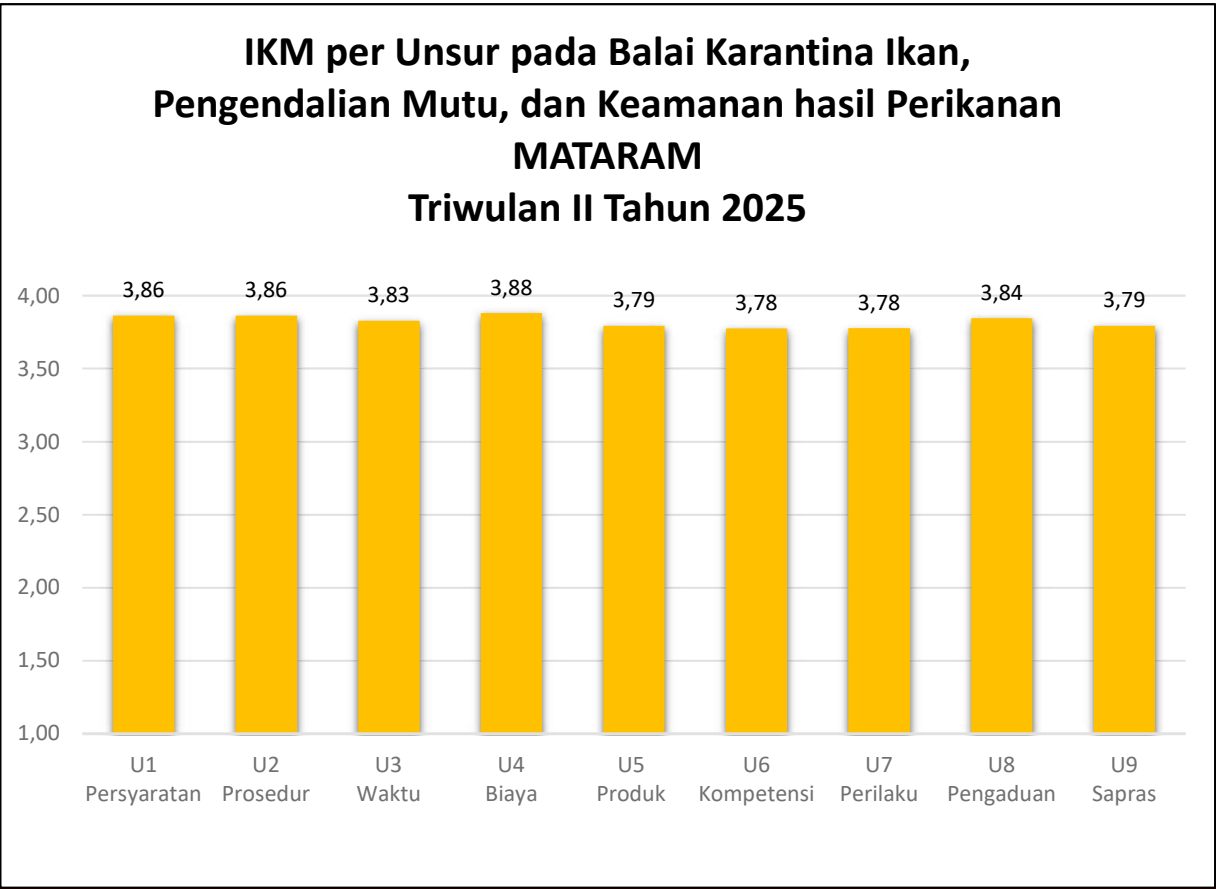
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur

Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,86	3,86	3,83	3,88	3,79	3,78	3,78	3,84	3,79
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	95,59 (A atau Sangat Baik)								

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur



BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Unsur layanan terendah yang didapatkan ialah **Kompetensi Pelayanan dan Perilaku Pelaksana** mendapatkan nilai terendah yaitu **3,78**.
2. Sedangkan Unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu **Biaya/Tarif** mendapatkan nilai tertinggi yaitu **3,88**.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui link kuesioner pengisian SKM Online yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

1. “Pelayan tolong dipercepat dan ditingkat”.
2. “Perlu ditingkatkan lagi kinerjanya. Mohon jangan selalu terpaku pada sop. Diberilah kelonggaran bagi pengguna yang rutin ekspor barangnya. Semangat”.
3. “Perlu perbaikan dalam pelayanan dari aplikasi kadang kurang cepat”.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

Kompetensi pelayanan perlu ditingkatkan lagi dengan berpartisipasi aktif dalam pelatihan kegiatan peningkatan pelayanan publik

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

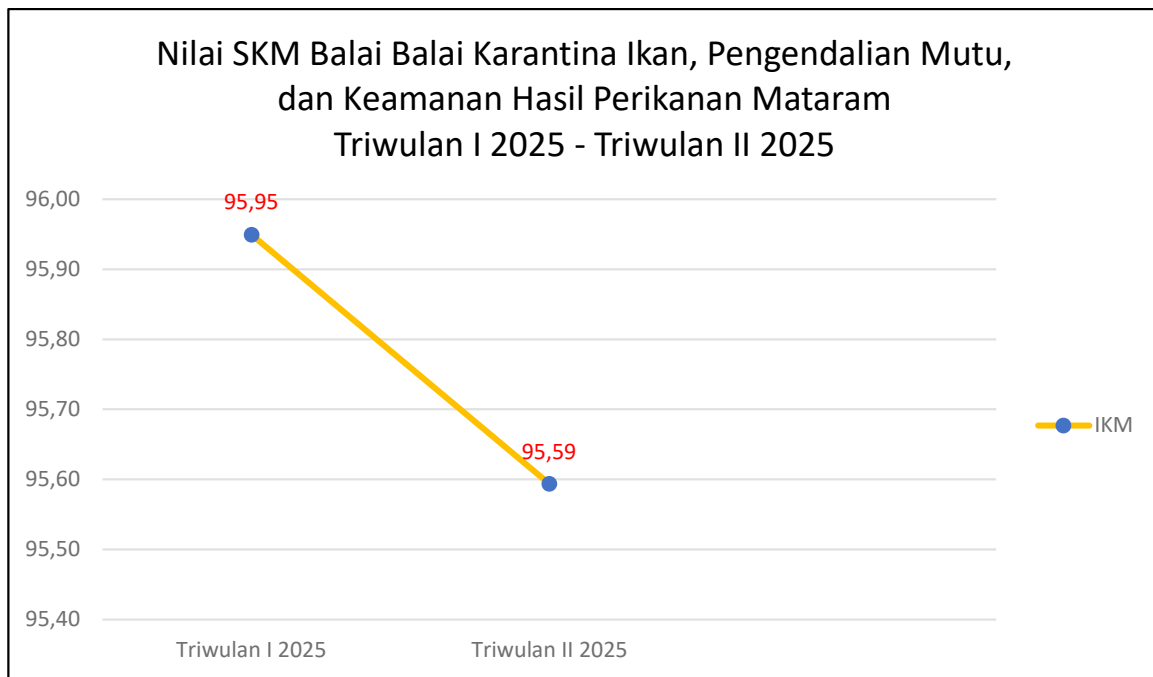
Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) bersama perwakilan pengguna layanan pada tanggal Juli/Agustus 2025 (Berita Acara terlampir). Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan

jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

No	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu (Triwulan III 2025)			Penanggung Jawab
			Juli	Agustus	September	
1	Kompetensi Pelayanan	Melakukan refreshment pelatihan pelayanan publik bagi petugas pelayanan	√			Tim Pelayanan Publik
2	Perilaku Pelaksana	Sosialisasi secara daring maupun luring kepada pengguna jasa terkait penggunaan aplikasi SIAPMUTU dan OSS		√		Tim Pelayanan Publik
3	Produk Sertifikasi Jenis Pelayanan	Sosialisasi secara daring maupun luring kepada pengguna jasa terkait produk spesifikasi jenis pelayanan	√			Tim Pelayanan Publik

4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Mataram dapat dilihat melalui grafik berikut :



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi Penurunan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari periode triwulan I 2025 hingga triwulan II 2025 pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Mataram. Dikarenakan adanya penyesuaian sistem dan aplikasi baru dalam pelaksanaan kegiatan pengajuan ekspor maupun sertifikasi lainnya.

BAB V

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode Triwulan II mulai April hingga Juni 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan publik di Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Mataram, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang **Sangat Baik** dengan nilai SKM 95,59. Kemudian nilai SKM Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Mataram menunjukkan Konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari triwulan I 2025 hingga triwulan II 2025.
2. Unsur pelayanan yang termasuk unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan **Kompetensi Pelayanan dan Perilaku Pelaksana**
3. Sedangkan unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu **Biaya/Tarif**

Kota Mataram, 2 Juli 2025

**Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu,
dan Keamanan hasil Perikanan Mataram**




M Farchan, S.Pi., M.P

NIP 197002051991031003

LAMPIRAN

1. Kuesioner Online

Survey Kepuasan Masyarakat

Unit : Balai KIPM Mataram

Dato Layanan

Pilih Layanan

☐ Laporan hasil uji mutu produk pertanian

☐ Seritibus Cara Buati Daya Ruan Yang Baik (CDBB)

☐ Seritibus Cara Distribusi Obat Ruan Yang Baik (CDOB)

☐ Seritibus Cara Pembuatan Ruan Yang Baik (CPRB)

☐ Seritibus Cara Pembuatan Obat Ruan Yang Baik (CPOB)

☐ Seritibus Cara Pembuatan Pakan Ruan Yang Baik (CPRB)

☐ Seritibus Cara Pengamanan Ruan Yang Baik (CPRB)

☐ Seritibus Kegiatan Pengalihan (GAP)

☐ Seritibus Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMRIP)

☐ Seritibus Penangan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMP)(Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)

Dato Responden

Waktu Survey

02 Juli 2025 12:29

Nama

Jenis Usaha

☐ Perorangan

☐ Korporasi

Jenis Kelamin/Gender

☐ Pria/Laki-laki

☐ Wanita/Perempuan

Usia

☐ < 25 Tahun

☐ 25 s.d 45 Tahun

☐ 46 s.d 60 Tahun

☐ > 60 Tahun

Pendidikan

☐ SD

☐ SMP

☐ SMA

☐ S3

☐ S1

☐ S2

☐ S3

Pekerjaan

☐ ASN

☐ TNI/Polri

☐ Petaku Usaha RUP

☐ Pegawai Swasta

☐ Wiraswasta Non RUP

☐ Petager / Mahasiswa

Pertanyaan

1. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu tentang **kesesuaian persyaratan** pelayanan yang harus dipenuhi dengan persyaratan pelayanan yang diinformasikan?

☐ Sangat sesuai

☐ Sesuai

☐ Kurang sesuai

☐ Tidak sesuai

2. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **kemudahan prosedur** yang dilakoni untuk mendapatkan layanan?

☐ Sangat Mudah

☐ Mudah

☐ Kurang mudah

☐ Tidak mudah

3. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **kesesuaian jangka waktu penyelesaian** pelayanan dengan yang diinformasikan?

☐ Sangat sesuai

☐ Sesuai

☐ Kurang sesuai

☐ Tidak sesuai

4. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **kesesuaian biaya** pelayanan yang dibayarkan dengan yang diinformasikan?

☐ Sangat sesuai

☐ Sesuai

☐ Kurang sesuai

☐ Tidak sesuai

5. Bagaimana pendapat Saudara tentang **kesesuaian produk** pelayanan antara yang ada pada publikasi dengan pelayanan yang diberikan?

☐ Sangat sesuai

☐ Sesuai

☐ Kurang sesuai

☐ Tidak sesuai

6. Bagaimana **kecepatan respon** (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh/lunggah) dari aplikasi sistem pelayanan yang diberikan?

☐ Sangat Cepat

☐ Cepat

☐ Kurang cepat

☐ Lambat

7. Bagaimana **kemudahan dalam penggunaan fitur** pada aplikasi sistem layanan?

☐ Sangat Mudah

☐ Mudah

☐ Kurang mudah

☐ Tidak mudah

7. Bagaimana **kemudahan dalam penggunaan fitur** pada aplikasi sistem layanan?

☐ Sangat Mudah

☐ Mudah

☐ Kurang mudah

☐ Tidak mudah

8. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **layanan konsultasi dan pengaduan** yang tersedia (sarana pengaduan/kemudahan mengaduh/indak lanjut)?

☐ Sangat baik

☐ Baik

☐ Kurang baik

☐ Tidak baik

9. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu tentang **kepatuhan isi/konten** dari aplikasi sistem layanan?

☐ Sangat baik

☐ Baik

☐ Kurang baik

☐ Tidak baik

Kesimpulan

Apakah petugas telah memberikan pelayanan secara prima (sikap, keterampilan dan penempatan)

Klik dan Kirim

* Harus diisi minimal 3 kata

Submit Data

* Harus diisi minimal 3 kata

14

2. Hasil Pengolahan Data SKM

TABEL PERHITUNGAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)																			
BALAIKARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATARAM																			
PERIODE TRIWULAN II 2025																			
NO	JENIS LAYANAN	JENIS KELAMIN	USIA	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	NILAI UNsur PELAYANAN									KRITIK DAN SARAN		NILAI PER JENIS LAYANAN	NRR PER JENIS LAYANAN	
						U 1	U 2	U 3	U 4	U 5	U 6	U 7	U 8	U 9					
1	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate)	Laki-laki	46-50	SMA	Pelaku Usaha KKP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Mantap, Terima kasih	100,00		
2	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate)	Perempuan	dibawah 25	SD	Pelaku Usaha KKP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pelayanan yg di berikan sangat memuaskan	100,00		
3	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate)	Laki-laki	25-45	SD	Pelaku Usaha KKP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	much dan sangat membantu	100,00		
4	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate)	Laki-laki	25-45	SD	Pelaku Usaha KKP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	sangat mudah dan bers	100,00		
5	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate)	Laki-laki	25-45	SD	ASN	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Sebelum di tingkatkan pelayanannya	100,00		
6	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate)	Laki-laki	25-45	SMA	Pelaku Usaha KKP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Badan mutu Kip mantap	100,00		
7	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate)	Laki-laki	25-45	SMA	Pelaku Usaha KKP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pelayanan dari portgus baik dan sangat membantu	83,33		
8	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate)	Laki-laki	25-45	SMA	Pegawai Swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	baik dan sangat membantu	88,89		
9	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate)	Laki-laki	25-45	SMA	Pelaku Usaha KKP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Sudah sesuai dengan jangl layanannya. Terima kasih	100,00		
10	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate)	Perempuan	dibawah 25	SD	Pegawai Swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	pelayanan bismillah malaran sudah sangat bagus	100,00		
11	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate)	Perempuan	25-45	SD	Pegawai Swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	semoga tetap memberikan yang terbaik untuk pelaya	100,00		
12	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate)	Laki-laki	46-50	SMA	Pelaku Usaha KKP	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	semoga lebih cepat dan dimngkat	75,00		
13	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate)	Perempuan	25-45	SD	Pegawai Swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	SEMOGA KUALITAS TETAP BAIK	100,00		
14	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate)	Perempuan	25-45	SD	Pegawai Swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Semoga pelayanan tetap baik	100,00		
15	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate)	Perempuan	25-45	SD	Pegawai Swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pertahanan pelayanan yang baik	100,00		
16	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate)	Perempuan	dibawah 25	SD	Pelaku Usaha KKP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	pelayanan sangat bagus dan nyapa	100,00		
17	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate)	Perempuan	25-45	SD	Pegawai Swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	semoga semakin baik kedepannya	100,00		
18	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate)	Laki-laki	25-45	SD	Pelaku Usaha KKP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Sangat baik dan menjelaskan detail	100,00		
19	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate)	Perempuan	dibawah 25	SD	Pelaku Usaha KKP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	sudah sangat bagus dan pelayanan oke	100,00		
20	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate)	Laki-laki	46-50	SMA	Pelaku Usaha KKP	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	layanan di tingkatkan dan cepat	77,78		
21	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate)	Perempuan	25-45	SD	Pegawai Swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	semoga selalu jadi yang terbaik	100,00	96,82	
22	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate)	Laki-laki	25-45	SD	Pegawai Swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	baik dan membantu	86,11		
23	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate)	Perempuan	dibawah 25	SD	Pelaku Usaha KKP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	sangat memuaskan sekali pelayanannya	100,00		
24	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate)	Perempuan	25-45	SD	Pegawai Swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Semoga semakin baik kedepannya	100,00		
25	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate)	Perempuan	dibawah 25	SD	Pelaku Usaha KKP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	sudah sangat memuaskan	100,00		
26	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate)	Perempuan	dibawah 25	SD	Pelaku Usaha KKP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	sudah sangat cepat dan bagus	100,00		
27	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate)	Perempuan	25-45	SD	Pegawai Swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	semoga semakin sukses kedepannya	100,00		
28	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate)	Laki-laki	25-45	SD	Pegawai Swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	baik dan sangat membantu	86,11		
29	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate)	Perempuan	dibawah 25	SD	Pegawai Swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	pelayanan peribahan untuk diposr sangat baik	100,00		
30	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate)	Perempuan	25-45	SD	Pegawai Swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pertahanan pelayanan yang sudah baik	100,00		
31	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate)	Perempuan	25-45	SD	Pegawai Swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pertahanan pelayanan yang baik	100,00		
32	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate)	Perempuan	25-45	SD	Pegawai Swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pertahanan pelayanan yang baik	100,00		
33	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate)	Perempuan	25-45	SD	Pegawai Swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pertahanan pelayanan yang baik	100,00		
34	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate)	Perempuan	25-45	SD	Pegawai Swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	pertahanan pelayanan yang baik	100,00		
35	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate)	Perempuan	dibawah 25	SD	Pelaku Usaha KKP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	sudah sangat memuaskan	100,00		
36	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate)	Perempuan	dibawah 25	SD	Pelaku Usaha KKP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	sudah sangat bagus	100,00		
37	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate)	Perempuan	dibawah 25	SD	Pegawai Swasta	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	umuk pelayanan mutu sudah sangat baik karena sd	86,36		
38	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate)	Laki-laki	25-45	SMA	Pegawai Swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	baik dan sangat cep	100,00		
39	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate)	Laki-laki	25-45	SD	ASN	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pelu di tingkatkan lagi karena	81,07		
40	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate)	Perempuan	25-45	SD	Pegawai Swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	semakin baik untuk kedepannya	100,00		
41	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate)	Perempuan	25-45	SD	Pegawai Swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Terimakasih untuk bantuannya selama ini	100,00		
42	Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik	Perempuan	25-45	SMA	Pegawai Swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Terus perhalihan pelayanannya	97,22		
43	Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik	Laki-laki	25-45	SD	Pegawai Swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	pelayanan yang awalnya kami bingung menuliskan	100,00	87,96	
44	Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik	Laki-laki	25-45	SD	Pegawai Swasta	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	upgrade terus lebih cepat dan tidak ribet	66,67		
45	Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik	Laki-laki	25-45	SMA	Pelaku Usaha KKP	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	kecepatan pelayanan harus di tingkat	72,22	72,22	
46	Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik	Perempuan	25-45	SMA	Wiraswasta Non KKP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	terus perhalihan dalam pelayanan dan sopitkau kedat	86,11	86,11	
47	Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	Laki-laki	25-45	SMA	Pelaku Usaha KKP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Terima kasih atas respon pelayanannya	94,44	94,44	
48	Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan	Perempuan	dibawah 25	SD	Pelaku Usaha KKP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pelayanan sangat memuaskan	97,77		
49	Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan	Laki-laki	25-45	SD	ASN	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	pelayanan terus, pertanahan	100,00		
50	Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan	Perempuan	25-45	SD	Pelaku Usaha KKP	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	sangat mudah dan di bantu dengan baik	94,47		
51	Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan	Laki-laki	25-45	SD	Pegawai Swasta	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	Bagus dan terus tingkatkan	86,55		
52	Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan	Perempuan	25-45	SD	Pegawai Swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	semoga semakin baik untuk kedepannya	100,00		
53	Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan	Laki-laki	25-45	SMA	Pelaku Usaha KKP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	BAIK DAN MUDAH	94,44	96,21	
54	Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan	Perempuan	25-45	SD	Pegawai Swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	tingkatkan dan perhalihan	100,00		
55	Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan	Perempuan	25-45	SD	Pegawai Swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Seratakn meningkatkan pelayanan yg sudah sangat b	94,44		
56	Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan	Perempuan	dibawah 25	SD	Pegawai Swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pelayanan yg baik cepat, murah, Penger sangat mome	100,00		
57	Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan	Perempuan	25-45	SD	Pegawai Swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Terus pertanahan pelayanan yang baik	100,00		
58	Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan	Perempuan	25-45	SD	Pegawai Swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	semoga pelayannya semakin baik untuk kedepannya	100,00		
JUMLAH NILAI PER-UNSUR						224	224	222	225	220	219	219	223	220					
RATA-RATA PER-UNSUR						3,86	3,86	3,63	3,80	3,79	3,78	3,78	3,84	3,79					
NILAI INDEKS PER-UNSUR						0,41	0,41	0,41	0,42	0,42	0,42	0,42	0,41	0,42					
NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT						95,59													
															SANGAT BAIK				
															88,96				

NO	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	23	40%
		Perempuan	35	60%
2	Usia	Dibawah 25	13	22%
		25-45	42	72%
		46-60	3	5%
		>60	0	0%
3	Pendidikan	SD	0	0%
		SMP	0	0%
		SMA	12	21%
		D3	3	5%
		S1	40	69%
		S2	3	5%
		S3	0	0%
4	Pekerjaan	ASN	3	5%
		TNI/POLRI	0	0%
		Pelaku Usaha KKP	22	38%
		Pegawai Swasta	32	55%
		Wirasusaha Non KKP	1	2%
		Pelajar/Mahasiswa	0	0%
5	Jenis Layanan	Uji Profisiensi bagi laboratorium pengujian penyakit ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan	0	0%
		Penyediaan koleksi standar/bahan acuan/kontrol positif	0	0%
		Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air	11	19%
		Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/ HACCP)	1	2%
		Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate for Fish and Fishery Products) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	41	71%
		Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	1	2%
		Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan	1	2%
		Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik	3	5%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat ikan Yang Baik	0	0%
	Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat ikan Yang Baik	0	0%	

3. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM



4. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Periode Sebelumnya

**Laporan Hasil Tindak Lanjut Pelaksanaan
Survei Kepuasan Masyarakat
Periode Triwulan I Tahun 2025**



**Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan
hasil Perikanan Mataram.**

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu

Hasil Kelautan dan Perikanan

2025

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam laporannya, World Bank menjelaskan bahwa pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat dicapai jika ekspektasi dan kebutuhan dari pengguna layanan diakomodir dalam proses penyediaan pelayanan. Hal ini juga sejalan dengan salah satu asas dari penyelenggaraan pelayanan publik yang tertulis dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu asas partisipatif. Asas partisipatif selanjutnya diatur dalam bab khusus Pengikutsertaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Selanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai pembina pelayanan publik nasional telah merumuskan berbagai instrumen pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan publik untuk menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik. Salah satu instrumen tersebut adalah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan SKM. Pertama, untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan. Kedua, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Terakhir, untuk mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Untuk

mencapai berbagai tujuan tersebut, maka Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Mataram perlu menyusun rencana tindak lanjut dan laporan hasil tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar proses *continuous improvement* dalam proses layanan publik dapat dipastikan dan pada akhirnya terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB II

DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Mataram periode Triwulan I tahun 2025 menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode Triwulan I Tahun 2025

No	Unsur	IKM	Mutu Layanan
1	Persyaratan	95.83	A
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	95.83	A
3	Waktu Penyelesaian	94.79	A
4	Biaya/Tarif	95.83	A
5	Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan	96.88	A
6	Kompetensi Pelaksana	95.83	A
7	Perilaku Pelaksana	95.83	A
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	95.83	A
9	Sarana dan Prasarana	96.88	A

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Oleh karena itu, perlu disusun sebuah rencana tindak lanjut perbaikan terhadap unsur-unsur dengan nilai rendah. Untuk

memastikan rencana tindak lanjut dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan baik, maka perlu disusun skala prioritas perbaikan unsur yang terdiri dari 3 unsur dengan nilai terendah. Kerangka rencana tindak lanjut dari ketiga unsur tersebut, dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM

No	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu (Triwulan II 2025)			Penanggung Jawab
			April	Mei	Juni	
1	U-3 Waktu Penyelesaian	Membuat kompensasi layanan (permintaan maaf, pemberian cenderamata, pemberian sanksi kepada petugas layanan dsb)		√		Tim Pelayanan Publik
2	U1- Persyaratan	- Publikasi persyaratan layanan melalui media cetak, Sosialisasi secara daring kepada pengguna jasa terkait persyaratan pelayanan		√		Tim Pelayanan Publik
3	U2 - Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Publikasi prosedur layanan melalui media cetak (banner, brosur, pamflet dsb) dan media elektronik serta melakukan Sosialisasi secara daring kepada pengguna jasa terkait Sistem mekanisme dan prosedur		√		Tim Pelayanan Publik

BAB III

REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan)	Dokumentasi Kegiatan	Tantangan / Hambatan
1	Membuat kompensasi Layanan (permintaan maaf dan kompensasi keterlambatan), Kaji ulang janji layanan menyesuaikan aturan yang berlaku	Sudah	Membuat kompensasi Layanan pemberian kompensasi keterlambatan dalam memberikan pelayanan	 	Terkadang pengguna jasa sungkan untuk menerima kompensasi.

2	Sosialisasi secara daring kepada pengguna jasa terkait persyaratan pelayanan	Sudah	Melakukan Sosialisasi kepada pengguna jasa terkait persyaratan Pelayanan pada saat melaksanakan Forum Konsultasi Publik		Tidak ada hambatan saat pelaksanaan
3	Sosialisasi secara daring kepada pengguna jasa terkait Sistem mekanisme dan prosedur	Sudah	Melakukan Sosialisasi secara daring kepada pengguna jasa sekaligus melaksanakan Forum Konsultasi Publik terkait pemberlakuan sistem, mekanisme dan Prosedur yang ada dalam pelayanan Sertifikasi		Tidak ada hambatan saat pelaksanaan

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan data-data dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, sekiranya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Mataram telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanyak 100%
2. Guna memastikan RTL tetap terimplementasi, maka perlu disusun berbagai strategi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Strategi yang dikembangkan untuk mengatasi masalah tersebut, dan mendorong diimplementasikannya RTL antara lain :

No	RTL	Strategi Penyelesaian	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Stakeholder Terkait
1	Membuat kompensasi Layanan (permintaan maaf dan kompensasi keterlambatan), Kaji ulang janji layanan menyesuaikan aturan yang berlaku	Membuat kompensasi Layanan pemberian kompensasi keterlambatan dalam memberikan pelayanan	<3 bulan	Tim pelayanan publik	Pengguna jasa lingkup Balai Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Mataram.
2	Publikasi persyaratan layanan melalui media cetak,	Sosialisasi secara daring kepada pengguna jasa terkait	<3 bulan	Tim pelayanan publik	Pengguna jasa lingkup Balai Balai Karantina Ikan,

	Sosialisasi secara daring kepada pengguna jasa terkait persyaratan pelayanan	persyaratan pelayanan			Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Mataram.
3	Publikasi prosedur layanan melalui media cetak (banner, brosur, pamflet dsb) dan media elektronik serta melakukan Sosialisasi secara daring kepada pengguna jasa terkait Sistem mekanisme dan prosedur	Melakukan Sosialisasi secara daring kepada pengguna jasa sekaligus melaksanakan Forum Konsultasi Publik terkait pemberlakuan sistem, mekanisme dan Prosedur yang ada dalam pelayanan Sertifikasi	<3 bulan	Tim pelayanan publik	Pengguna jasa lingkup Balai Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Mataram.

Mataram, 02 Juli 2025

Plt. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Mataram.



M. Farchan

M. Farchan, S.Pi, MP.
NIP. 19700205 199103 1 003

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 504/SJ.3/RC.610/III/2025

Yth. : 1. Kepala Biro dan Pusat lingkup Sekretariat Jenderal
2. Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan
3. Inspektur I

Dari : Plt. Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi

Hal : Hasil Rapat Pembahasan Perubahan Pengukuran Indikator Kinerja
Indeks Profesionalitas ASN dan Penyesuaian Target Tahun 2025 s.d.
2029

Lampiran : 1 (satu) berkas

Tanggal : 13 Maret 2025

Menindaklanjuti rapat pembahasan perubahan pengukuran Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN dan penyesuaian target tahun 2025 s.d. 2029 berdasarkan undangan Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi a.n. Sekretaris Jenderal, Nomor B.1015/SJ.3/TU.330/II/2025, tanggal 27 Februari 2025, yang telah dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2025, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. rapat dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Manajemen Kinerja, Informasi Kepegawaian, dan Digitalisasi Pelayanan, Biro SDM Aparatur dan Organisasi dan dihadiri oleh pegawai yang menangani kepegawaian, kinerja pegawai dan kinerja organisasi dari Biro dan Pusat lingkup Sekretariat Jenderal dan Sekretariat Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP);
2. rapat dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 dan rapat pembahasan penyesuaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN bersama dengan Biro Perencanaan yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2025;
3. berdasarkan surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, terdapat beberapa penyesuaian pada pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, yaitu:
 - a. dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan, sehingga pengukuran bobot dimensi kualifikasi berubah menjadi:

Dimensi	Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Diangkat Kedalam Jabatan	Pendidikan yang Diperoleh Pegawai (Bobot Nilai)					
				S3	S2	SI / DIV	DIII	DII / DI / SLTA / Sederajat	Di Bawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
	Nonmanajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Keterampilan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
			DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
			S2	25	20	10	10	10	10
		Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10

- b. indikator dimensi kompetensi yang digunakan terdiri atas bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil penilaian kinerja dan riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal and nonklasikal, sehingga pengukuran dimensi kompetensi berubah menjadi:

No	Instrumen Perhitungan	Jabatan Manajerial			Jabatan Nonmanajerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1.	Hasil Penilaian Kinerja					
	- Sangat Baik	25	25	25	25	25
	- Baik	20	20	20	20	20
	- Butuh Perbaikan	15	15	15	15	15
	- Kurang / <i>Misconduct</i>	10	10	10	10	10
	- Sangat Kurang	5	5	5	5	5
2.	Diklat Kepemimpinan					
	- Sudah	10	10	10	-	-
	- Belum	0	0	0	-	-
3.	Diklat Fungsional					
	- Sudah	-	-	-	10	-
	- Belum	-	-	-	0	-
4.	Diklat Teknis					
	- Sudah	-	-	-	-	10
	- Belum	-	-	-	-	0
5.	Pengembangan Kompetensi 20 JP Setahun					
	PNS					
	>= 20 JP	5	5	5	5	5
	<20 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional
	PPPK					
	>= 24 JP	5	5	5	5	5
	<24 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional

- c. formula pengukuran nilai Indeks Profesionalitas ASN disesuaikan menjadi:
- pengukuran nilai Indeks Profesionalitas ASN KKP

$$IP\ ASN\ KKP = \frac{\text{Total nilai IP ASN seluruh pegawai ASN KKP}}{\text{Jumlah pegawai ASN KKP}}$$

- pengukuran nilai Indeks Profesionalitas ASN Unit Organisasi Level I

$$IP\ ASN\ Unit\ Organisasi\ Level\ I = \frac{\text{Total nilai IP ASN seluruh pegawai ASN Unit Organisasi Level I}}{\text{Jumlah pegawai ASN Unit Organisasi Level I}}$$

- pengukuran nilai Indeks Profesionalitas ASN Unit Organisasi Level II

$$IP\ ASN\ Unit\ Organisasi\ Level\ II = \frac{\text{Total nilai IP ASN seluruh pegawai ASN Unit Organisasi Level II}}{\text{Jumlah pegawai ASN Unit Organisasi Level II}}$$

- d. pegawai ASN yang diukur terdiri dari PNS dan PPPK dengan status kepegawaian yang aktif di SIASN.
- berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, KKP perlu melakukan penyesuaian pengukuran Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN KKP dan telah disepakati perubahan target Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN KKP, Unit Organisasi Level I, serta Biro dan Pusat lingkup Sekretariat Jenderal tahun 2025 s.d. 2029; dan
 - berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan penyesuaian Manual Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN dan perubahan target Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN tahun 2025 s.d. 2029 sebagaimana yang tertera pada Lampiran, untuk dapat dipedomani dan ditindaklanjuti.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Riza Trianzah

Tembusan:

Sekretaris Jenderal

Manual Indikator Kinerja

Nama Indikator : **Indeks Profesionalitas ASN KKP**
Kinerja

Definisi : 1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.
2. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN KKP merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada:
a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;
b. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara; dan
c. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 terkait penyesuaian perhitungan dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN.

Formula Perhitungan : 1. Nilai Indeks Profesionalitas ASN diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:
a. Kualifikasi;
b. Kompetensi;
c. Kinerja; dan
d. Disiplin.
2. Indikator dimensi kualifikasi yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh ASN, meliputi:
a. Pendidikan S-3 (Strata Tiga);
b. Pendidikan S-2 (Strata Dua);
c. Pendidikan S-1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat);
d. Pendidikan D-III (Diploma Tiga);

- e. Pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/ sederajat; dan
 - f. Pendidikan di bawah SLTA.
3. Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan, sehingga formula pengukuran bobot dimensi kualifikasi adalah sebagai berikut:
- a. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal lebih tinggi/di atas persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima);
 - b. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 20 (dua puluh); dan
 - c. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal di bawah persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 10 (sepuluh).

Dimensi	Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Diangkat Kedalam Jabatan	Pendidikan yang Diperoleh Pegawai (Bobot Nilai)					
				S3	S2	SI / DIV	DIII	DII / DI / SLTA / Sederajat	Di Bawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
	Nonmanajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Keterampilan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
			DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
			S2	25	20	10	10	10	10
		Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10

4. Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, indikator dimensi kompetensi yang digunakan, terdiri dari:
- a. Bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil predikat kinerja pada tahun sebelumnya; dan

- b. Riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan nonklasikal yang diperoleh selama tahun berjalan, meliputi:
- 1) Diklat Kepemimpinan (khusus bagi Jabatan Manajerial);
 - 2) Diklat Fungsional (khusus bagi Jabatan Fungsional);
 - 3) Diklat Teknis bagi (khusus bagi Jabatan Pelaksana); dan
 - 4) Pengembangan Kompetensi 20 (dua puluh) Jam Pelajaran (JP) dalam satu tahun terakhir bagi PNS atau 24 (dua puluh empat) JP dalam satu tahun terakhir bagi PPPK.

Pengukuran dimensi kompetensi adalah sebagai berikut:

No	Instrumen Perhitungan	Jabatan Manajerial			Jabatan Nonmanajerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1.	Hasil Penilaian Kinerja					
	- Sangat Baik	25	25	25	25	25
	- Baik	20	20	20	20	20
	- Butuh Perbaikan	15	15	15	15	15
	- Kurang / <i>Misconduct</i>	10	10	10	10	10
	- Sangat Kurang	5	5	5	5	5
2.	Diklat Kepemimpinan					
	- Sudah	10	10	10	-	-
	- Belum	0	0	0	-	-
3.	Diklat Fungsional					
	- Sudah	-	-	-	10	-
	- Belum	-	-	-	0	-
4.	Diklat Teknis					
	- Sudah	-	-	-	-	10
	- Belum	-	-	-	-	0
5.	Pengembangan Kompetensi 20 JP Setahun PNS					
	>= 20 JP	5	5	5	5	5
	<20 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional
	PPPK					
	>= 24 JP	5	5	5	5	5
	<24 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional

5. Indikator dimensi kinerja yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya, dengan pengukuran sebagai berikut:

Dimensi	Predikat Kinerja	Bobot Nilai	
		Maksimal	Perolehan
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/ <i>Misconduct</i>		15
	Sangat Kurang		10

6. Indikator dimensi disiplin yang digunakan adalah riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir yang mencakup:
- Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
 - Hukuman disiplin ringan;
 - Hukuman disiplin sedang; dan
 - Hukuman disiplin berat,

Pengukuran dimensi disiplin adalah sebagai berikut:

Dimensi	Nama Hukuman Disiplin	Bobot Nilai
Disiplin	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

7. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi, meliputi:
- Dimensi kualifikasi dihitung dari jenjang pendidikan formal terakhir yang diperoleh pegawai ASN dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diperbaharui dengan pemukhtahiran riwayat kepegawaian pada SIASN BKN yang terintegrasi dengan MyASN BKN dan SIMPEGNAS BKN;

- b. Dimensi kompetensi diolah data hasil predikat kinerja dari e-kinerja BKN dan data riwayat pengembangan kompetensi dari SIASN BKN sesuai pemuktahiran riwayat pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh pegawai ASN pada MyASN BKN dan oleh operator pada SIASN BKN;
 - c. Dimensi kinerja diolah data predikat kinerja dari e-kinerja BKN atau data riwayat Kinerja pada SIASN BKN; dan
 - d. Dimensi disiplin diolah data riwayat disiplin pegawai ASN dari integrasi IDIS BKN dengan SIASN BKN dan/atau peremajaan data hukuman disiplin pada SIASN BKN.
8. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, terdiri atas:
 - a. Kualifikasi memiliki bobot 25% (dua puluh lima persen);
 - b. Kompetensi memiliki bobot 40% (empat puluh persen);
 - c. Kinerja memiliki bobot 30% (tiga puluh persen); dan
 - d. Disiplin memiliki bobot 5% (lima persen).
9. Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$\text{Nilai IP ASN} = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

$$\text{IP ASN KKP} = \frac{\text{Total nilai IP ASN seluruh pegawai ASN KKP}}{\text{Jumlah pegawai ASN KKP}}$$

10. Kategori penilaian tingkat Indeks Profesionalitas ASN, antara lain:

Nilai	Kategori
91-100	Sangat tinggi
81-90	Tinggi
71-80	Sedang
61-70	Rendah
60 ke bawah	Sangat rendah

11. Penilaian Indeks Profesionalitas ASN menghitung pegawai dengan status kepegawaian aktif di SIASN BKN yang berkedudukan hukum sebagai ASN, yang terdiri dari:
 - a. PNS; dan
 - b. PPPK yang telah diangkat sebelum tahun penilaian Indeks Profesionalitas ASN.
12. Penilaian Indeks Profesionalitas ASN mengecualikan pegawai PNS dengan status berikut:
 - a. Calon PNS (CPNS);
 - b. Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN);
 - c. Dipekerjakan (DPK); dan
 - d. Tugas Belajar Dibiayai.

Satuan : Indeks

Tingkat Validitas : Outcome

Sumber Data : Badan Kepegawaian Negara

Pola Perhitungan : Nilai posisi akhir

Polarisasi : Maximize

Periode Pelaporan : Semesteran

Manual Indikator Kinerja

Nama Indikator : **Indeks Profesionalitas ASN Unit Organisasi Level I**
Kinerja

Definisi : 1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.
2. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN Unit Organisasi Level I merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN Unit Organisasi Level I yang diukur setiap tahun oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada:
a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;
b. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara; dan
c. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 terkait penyesuaian perhitungan dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN.

Formula
Perhitungan : 1. Nilai Indeks Profesionalitas ASN diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:
a. Kualifikasi;
b. Kompetensi;
c. Kinerja; dan
d. Disiplin.
2. Indikator dimensi kualifikasi yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh ASN, meliputi:
a. Pendidikan S-3 (Strata Tiga);
b. Pendidikan S-2 (Strata Dua);
c. Pendidikan S-1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat);
d. Pendidikan D-III (Diploma Tiga);
e. Pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/ sederajat; dan

f. Pendidikan di bawah SLTA.

3. Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan, sehingga formula pengukuran bobot dimensi kualifikasi adalah sebagai berikut:
 - a. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal lebih tinggi/di atas persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima);
 - b. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 20 (dua puluh); dan
 - c. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal di bawah persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 10 (sepuluh).

Dimensi	Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Diangkat Kedalam Jabatan	Pendidikan yang Diperoleh Pegawai (Bobot Nilai)					
				S3	S2	SI / DIV	DIII	DII / DI / SLTA / Sederajat	Di Bawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
	Nonmanajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Keterampilan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
			DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
			S2	25	20	10	10	10	10
		Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10

4. Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, indikator dimensi kompetensi yang digunakan, terdiri dari:
 - a. Bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil predikat kinerja pada tahun sebelumnya; dan
 - b. Riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan nonklasikal yang diperoleh selama tahun berjalan, meliputi:

- 1) Diklat Kepemimpinan (khusus bagi Jabatan Manajerial);
- 2) Diklat Fungsional (khusus bagi Jabatan Fungsional);
- 3) Diklat Teknis bagi (khusus bagi Jabatan Pelaksana); dan
- 4) Pengembangan Kompetensi 20 (dua puluh) Jam Pelajaran (JP) dalam satu tahun terakhir bagi PNS atau 24 (dua puluh empat) JP dalam satu tahun terakhir bagi PPPK.

Pengukuran dimensi kompetensi adalah sebagai berikut:

No	Instrumen Perhitungan	Jabatan Manajerial			Jabatan Nonmanajerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1.	Hasil Penilaian Kinerja					
	- Sangat Baik	25	25	25	25	25
	- Baik	20	20	20	20	20
	- Butuh Perbaikan	15	15	15	15	15
	- Kurang / <i>Misconduct</i>	10	10	10	10	10
	- Sangat Kurang	5	5	5	5	5
2.	Diklat Kepemimpinan					
	- Sudah	10	10	10	-	-
	- Belum	0	0	0	-	-
3.	Diklat Fungsional					
	- Sudah	-	-	-	10	-
	- Belum	-	-	-	0	-
4.	Diklat Teknis					
	- Sudah	-	-	-	-	10
	- Belum	-	-	-	-	0
5.	Pengembangan Kompetensi 20 JP Setahun					
	PNS					
	>= 20 JP	5	5	5	5	5
	<20 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional
	PPPK					
	>= 24 JP	5	5	5	5	5
	<24 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional

5. Indikator dimensi kinerja yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya, dengan pengukuran sebagai berikut:

Dimensi	Predikat Kinerja	Bobot Nilai	
		Maksimal	Perolehan
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/ <i>Misconduct</i>		15
	Sangat Kurang		10

6. Indikator dimensi disiplin yang digunakan adalah riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir yang mencakup:
- Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
 - Hukuman disiplin ringan;
 - Hukuman disiplin sedang; dan
 - Hukuman disiplin berat,

Pengukuran dimensi disiplin adalah sebagai berikut:

Dimensi	Nama Hukuman Disiplin	Bobot Nilai
Disiplin	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

7. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi, meliputi:
- Dimensi kualifikasi dihitung dari jenjang pendidikan formal terakhir yang diperoleh pegawai ASN dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diperbaharui dengan pemukhtahiran riwayat kepegawaian pada SIASN BKN yang terintegrasi dengan MyASN BKN dan SIMPEGNAS BKN;
 - Dimensi kompetensi diolah data hasil predikat kinerja dari e-kinerja BKN dan data riwayat pengembangan kompetensi dari SIASN BKN sesuai pemukhtahiran riwayat pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh pegawai ASN pada MyASN BKN dan oleh operator pada SIASN BKN;

- c. Dimensi kinerja diolah data predikat kinerja dari e-kinerja BKN atau data riwayat Kinerja pada SIASN BKN; dan
 - d. Dimensi disiplin diolah data riwayat disiplin pegawai ASN dari integrasi IDIS BKN dengan SIASN BKN dan/atau peremajaan data hukuman disiplin pada SIASN BKN.
8. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, terdiri atas:
- a. Kualifikasi memiliki bobot 25% (dua puluh lima persen);
 - b. Kompetensi memiliki bobot 40% (empat puluh persen);
 - c. Kinerja memiliki bobot 30% (tiga puluh persen); dan
 - d. Disiplin memiliki bobot 5% (lima persen).
9. Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$\text{Nilai IP ASN} = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

$$\text{IP ASN Unit Organisasi Level I} = \frac{\text{Total nilai IP ASN seluruh pegawai ASN Unit Organisasi Level I}}{\text{Jumlah pegawai ASN Unit Organisasi Level I}}$$

10. Kategori penilaian tingkat Indeks Profesionalitas ASN, antara lain:

Nilai	Kategori
91-100	Sangat tinggi
81-90	Tinggi
71-80	Sedang
61-70	Rendah
60 ke bawah	Sangat rendah

11. Penilaian Indeks Profesionalitas ASN menghitung pegawai dengan status kepegawaian aktif di SIASN BKN yang berkedudukan hukum sebagai ASN, yang terdiri dari:
- a. PNS; dan
 - b. PPPK yang telah diangkat sebelum tahun penilaian Indeks Profesionalitas ASN.

12. Penilaian Indeks Profesionalitas ASN mengecualikan pegawai PNS dengan status berikut:

- a. Calon PNS (CPNS);
- b. Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN);
- c. Dipekerjakan (DPK); dan
- d. Tugas Belajar Dibiayai.

Satuan : Indeks

Tingkat Validitas : Output kendali rendah

Sumber Data : Badan Kepegawaian Negara

Pola Perhitungan : Nilai posisi akhir

Polarisasi : Maximize

Periode Pelaporan : Semesteran

Manual Indikator Kinerja

Nama Indikator : **Indeks Profesionalitas ASN Unit Organisasi Level II**
Kinerja

Definisi : 1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.
2. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN Unit Organisasi Level II merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN Unit Organisasi Level II yang diukur setiap tahun oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada:
a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;
b. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara; dan
c. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 terkait penyesuaian perhitungan dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN.

Formula Perhitungan : 1. Nilai Indeks Profesionalitas ASN diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:
a. Kualifikasi;
b. Kompetensi;
c. Kinerja; dan
d. Disiplin.
2. Indikator dimensi kualifikasi yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh ASN, meliputi:
a. Pendidikan S-3 (Strata Tiga);
b. Pendidikan S-2 (Strata Dua);
c. Pendidikan S-1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat);
d. Pendidikan D-III (Diploma Tiga);
e. Pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/ sederajat; dan

f. Pendidikan di bawah SLTA.

3. Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan, sehingga formula pengukuran bobot dimensi kualifikasi adalah sebagai berikut:
 - a. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal lebih tinggi/di atas persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima);
 - b. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 20 (dua puluh); dan
 - c. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal di bawah persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 10 (sepuluh).

Dimensi	Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Diangkat Kedalam Jabatan	Pendidikan yang Diperoleh Pegawai (Bobot Nilai)					
				S3	S2	SI / DIV	DIII	DII / DI / SLTA / Sederajat	Di Bawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
	Nonmanajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Keterampilan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
			DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
			S2	25	20	10	10	10	10
		Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10

4. Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, indikator dimensi kompetensi yang digunakan, terdiri dari:
 - a. Bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil predikat kinerja pada tahun sebelumnya; dan
 - b. Riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan nonklasikal yang diperoleh selama tahun berjalan, meliputi:

- 1) Diklat Kepemimpinan (khusus bagi Jabatan Manajerial);
- 2) Diklat Fungsional (khusus bagi Jabatan Fungsional);
- 3) Diklat Teknis bagi (khusus bagi Jabatan Pelaksana); dan
- 4) Pengembangan Kompetensi 20 (dua puluh) Jam Pelajaran (JP) dalam satu tahun terakhir bagi PNS atau 24 (dua puluh empat) JP dalam satu tahun terakhir bagi PPPK.

Pengukuran dimensi kompetensi adalah sebagai berikut:

No	Instrumen Perhitungan	Jabatan Manajerial			Jabatan Nonmanajerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1.	Hasil Penilaian Kinerja					
	- Sangat Baik	25	25	25	25	25
	- Baik	20	20	20	20	20
	- Butuh Perbaikan	15	15	15	15	15
	- Kurang / <i>Misconduct</i>	10	10	10	10	10
	- Sangat Kurang	5	5	5	5	5
2.	Diklat Kepemimpinan					
	- Sudah	10	10	10	-	-
	- Belum	0	0	0	-	-
3.	Diklat Fungsional					
	- Sudah	-	-	-	10	-
	- Belum	-	-	-	0	-
4.	Diklat Teknis					
	- Sudah	-	-	-	-	10
	- Belum	-	-	-	-	0
5.	Pengembangan Kompetensi 20 JP Setahun					
	PNS					
	>= 20 JP	5	5	5	5	5
	<20 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional
	PPPK					
	>= 24 JP	5	5	5	5	5
	<24 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional

5. Indikator dimensi kinerja yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya, dengan pengukuran sebagai berikut:

Dimensi	Predikat Kinerja	Bobot Nilai	
		Maksimal	Perolehan
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/ <i>Misconduct</i>		15
	Sangat Kurang		10

6. Indikator dimensi disiplin yang digunakan adalah riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir yang mencakup:
- Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
 - Hukuman disiplin ringan;
 - Hukuman disiplin sedang; dan
 - Hukuman disiplin berat,

Pengukuran dimensi disiplin adalah sebagai berikut:

Dimensi	Nama Hukuman Disiplin	Bobot Nilai
Disiplin	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

7. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi, meliputi:
- Dimensi kualifikasi dihitung dari jenjang pendidikan formal terakhir yang diperoleh pegawai ASN dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diperbaharui dengan pemukhtahiran riwayat kepegawaian pada SIASN BKN yang terintegrasi dengan MyASN BKN dan SIMPEGNAS BKN;
 - Dimensi kompetensi diolah data hasil predikat kinerja dari e-kinerja BKN dan data riwayat pengembangan kompetensi dari SIASN BKN sesuai pemukhtahiran riwayat pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh pegawai ASN pada MyASN BKN dan oleh operator pada SIASN BKN;

- c. Dimensi kinerja diolah data predikat kinerja dari e-kinerja BKN atau data riwayat Kinerja pada SIASN BKN; dan
 - d. Dimensi disiplin diolah data riwayat disiplin pegawai ASN dari integrasi IDIS BKN dengan SIASN BKN dan/atau peremajaan data hukuman disiplin pada SIASN BKN.
8. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, terdiri atas:
 - a. Kualifikasi memiliki bobot 25% (dua puluh lima persen);
 - b. Kompetensi memiliki bobot 40% (empat puluh persen);
 - c. Kinerja memiliki bobot 30% (tiga puluh persen); dan
 - d. Disiplin memiliki bobot 5% (lima persen).
 9. Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$\text{Nilai IP ASN} = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

$$\text{IP ASN Unit Organisasi Level II} = \frac{\text{Total nilai IP ASN seluruh pegawai ASN Unit Organisasi Level II}}{\text{Jumlah pegawai ASN Unit Organisasi Level II}}$$

10. Kategori penilaian tingkat Indeks Profesionalitas ASN, antara lain:

Nilai	Kategori
91-100	Sangat tinggi
81-90	Tinggi
71-80	Sedang
61-70	Rendah
60 ke bawah	Sangat rendah

11. Penilaian Indeks Profesionalitas ASN menghitung pegawai dengan status kepegawaian aktif di SIASN BKN yang berkedudukan hukum sebagai ASN, yang terdiri dari:
 - a. PNS; dan
 - b. PPPK yang telah diangkat sebelum tahun penilaian Indeks Profesionalitas ASN.

12. Penilaian Indeks Profesionalitas ASN mengecualikan pegawai PNS dengan status berikut:

- a. Calon PNS (CPNS);
- b. Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN);
- c. Dipekerjakan (DPK); dan
- d. Tugas Belajar Dibiayai.

Satuan : Indeks

Tingkat Validitas : Output kendali rendah

Sumber Data : Badan Kepegawaian Negara

Pola Perhitungan : Nilai posisi akhir

Polarisasi : Maximize

Periode Pelaporan : Semesteran

Usulan Penyesuaian Target Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2025 s.d. 2029

1. Usulan Target Indeks Profesionalitas ASN Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 s.d. 2029

Instansi	2025		2026		2027		2028		2029	
	Semester	Semester	Semester	Semester	Semester	Semester	Semester	Semester	Semester	Semester
	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
KKP	75	82	75	82,5	76	83	76	83,5	77	84

2. Usulan Target Indeks Profesionalitas ASN pada Unit Organisasi Level I di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 s.d. 2029

Unit Organisasi Level I	2025		2026		2027		2028		2029	
	Semester	Semester	Semester	Semester	Semester	Semester	Semester	Semester	Semester	Semester
	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
SETJEN	75	82	75	82,5	76	83	76	83,5	77	84
DJPKRL*	77	84	77	84,5	78	85	78	85,5	79	86
DJPT	77	84	77	84,5	78	85	78	85,5	79	86
DJPB	74	81	74	81,5	75	82	75	82,5	76	83
DJPDSPKP	74	81	74	81,5	75	82	75	82,5	76	83
DJPSPDKP	74	81	74	81,5	75	82	75	82,5	76	83
ITJEN	76	83	76	83,5	77	84	77	84,5	78	85
BPPSDMKP	74	81	74	81,5	75	82	75	82,5	76	83
BPPMHKP	75	82	75	82,5	76	83	76	83,5	77	84

3. Usulan Target Indeks Profesionalitas ASN pada Unit Organisasi Level II lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2025 s.d. 2029

Unit Organisasi Level II SETJEN	2025		2026		2027		2028		2029	
	Semester I	Semester II	Semester I	Semester II	Semester I	Semester II	Semester I	Semester II	Semester I	Semester II
Biro Perencanaan	75	82	75	82,5	76	83	76	83,5	77	84
Biro Keuangan dan BMN	75	82	75	82,5	76	83	76	83,5	77	84
Biro SDMAO	75	82	75	82,5	76	83	76	83,5	77	84
Biro Hukum	75	82	75	82,5	76	83	76	83,5	77	84
Biro Humas dan KLN	75	82	75	82,5	76	83	76	83,5	77	84
Biro Umum dan PBJ*	75	82	75	82,5	76	83	76	83,5	77	84
Pusdatin	75	82	75	82,5	76	83	76	83,5	77	84